

Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Daerah Berbasis *Sustainable Development*

(Studi Pada desa wisata Poncokusumo, Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi ujian sarjana

Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

MUHAMMAD DIMAS NUGROHO

115030107111010



**ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

MALANG

2016

GAGAL ITU JADI MOTIVASI, BUKAN DI AKHIRI



MUHAMMAD DIMAS, 2016



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA
DAERAH BERBASIS *SUSTAINABLE DEVELOPMENT* (Studi Pada Desa
Wisata Poncokusumo, Kabupaten Malang)

Disusun Oleh : Muhamamad Dimas Nugroho

NIM : 115030107111010

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi : Publik

Malang, 04 Agustus 2016

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota



Drs. Minto Hadi, M.Si

NIP. 19540127 198103 1 003



Andy Kurniawan, SAP, MAP

NIK. 2011078603201001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU) No 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 08 Agustus 2016

Mahasiswa



Nama: Mubarramad Dimas Nugroho

NIM : 115030600111011

RINGKASAN

Muhammad Dimas Nugroho, 2016. **Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Daerah Berbasis *Sustainable Development* (Studi Pada Desa Wisata Poncokusumo Kabupaten Malang)**. Drs. Minto Hadi, M.Si. Andy Kurniawan, SAP, MAP.

Penelitian ini dibuat bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Malang dalam pengembangan Pariwisata di Desa wisata Poncokusumo Kabupaten Malang, mengetahui dampak positif dan negatif dari Pengembangan Pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Poncokusumo dan mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Poncokusumo *pasca* Pengembangan Pariwisata Desa wisata Poncokusumo. Dalam hal ini Pengembangan kawasan merupakan upaya terpadu untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan antar wilayah dan menjaga kelestarian lingkungan hidup pada suatu wilayah. Pengembangan kawasan sangat diperlukan karena setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda. Dalam perkembangannya setiap wilayah harus mampu meningkatkan nilai strategis ekonomi masyarakatnya dan pemerintah daerah sebagai pemegang tanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja bagi masyarakat di daerahnya. Agrowisata sendiri diartikan sebagai upaya mengembangkan kawasan pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis, yang diharapkan dapat melayani dan mendorong kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya. Kawasan agrowisata terdiri dari kota pertanian dan desa-desa sentra produksi pertanian yang ada di sekitarnya, dengan batasan yang tidak ditentukan oleh batasan administratif pemerintahan, tetapi lebih ditentukan dengan memperhatikan skala ekonomi kawasan yang ada.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti melakukan observasi non partisipasi dimana peneliti dalam mendapatkan data untuk bahan penelitian hanya mengumpulkan data, yaitu peneliti mengumpulkan data dari hasil wawancara dengan beberapa Kepala Desa Poncokusumo Kabupaten Malang tentang Pengembangan Agrowisata Desa Poncokusumo Kabupaten Malang. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah analisa model Miles and Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, kondensi data, penyajian data, dan *conclusions: drawing/verifying*.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Wisata Poncokusumo Kabupaten Malang adalah sebagai salah satu Desa wisata Kabupaten Malang dalam mengembangkan potensi pariwisata dimana kegiatan pengembangan Pariwisata bisa memberikan dampak Positif bagi Desa Poncokusumo Kabupaten Malang.

Saran dari peneliti yaitu agar terus memberikan sosialisiasi dan penyuluhan agar masyarakat Desa Poncokusumo lebih antusias dalam menjalani pengembangan pariwisata di Desa Poncokusumo sendiri, dan Balai Desa sebagai pemerintah Daerah juga lebih mendekati kepada masyarakat desa guna memberikan sosialisiasi dari dampak Agrowisata itu sendiri.

SUMMARY

Muhammad Dimas Nugroho, 2016. **Implementation Of The Policy Of Regional Tourism Development Based on Sustainable Development (Study On The Poncokusumo Tourism Village Malang)**. Drs. Minto Hadi, M.Si. Andy Kurniawan, SAP, MAP.

This research aims to analyze Implementation of Government policy in the area of Malang tourism development in tourist village Poncokusumo Malang, to knowing the positive and negative impacts of tourism development economic growth against the villagers Poncokusumo and knowing the factors restricting economic growth and supporting villagers Poncokusumo post-war development of tourism Poncokusumo tourism village. In this case the development of the region is a concerted effort to spur the development of the social economy, reduce the gap between the region and maintain the environment's preservation in a region. The development of the region is very necessary as each region has different characteristics. In the process each region should be able to enhance the strategic value of the economy of the community and local governments as the holder's responsibilities in implementing development policies that aim to increase the number and types of job opportunities for the community in its territory. The Orchard itself was interpreted as an effort to develop agricultural area that grows and develops because of the operation of the system and business sustainability, which is expected to be able to serve and encourage agricultural development activities (agribusiness) in the surrounding area. Agrowisata consists of city farms and villages existing agricultural production centers around it, with the restriction that no administrative restrictions are determined by the Government, but rather is determined having regard to the scale of economic regions.

This research uses descriptive research methods with qualitative approaches. Data collection using observation, interview and documentation. Researchers conducting the non participation of observation where researchers in obtaining data for research material just collecting data, that is the researchers collect data from interviews with some of the heads of the Poncokusumo village of Malang about the Agrotourism's Development at Poncokusumo Malang Village. While the data analysis technique used is the analysis model Miles and Huberman that consists of data collection, condention of presentation of data, and conclusions: drawing/verifying.

Based on the results of research conducted, the implementation of government policies in Malang Area tourism development in tourist village Poncokusumo Malang was as one of the tourist village of Malang in developing the tourism potential of tourism development activities which could give a positive impact to the village of Malang Poncokusumo.

Advice from researchers, namely in order to continue to provide socialization and extension in order for the village community Poncokusumo more enthusiastic through the development of tourism in the village of Poncokusumo, and also the village local government can more closer to the people of the village to provide socialization from the impact of the Agrotourism itself.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang sudah melimpahkan segala, Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Daerah Berbasis *Sustainable Development* (Studi pada Desa wisata Poncokusumo, Kabupaten Malang)”**.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terwujud tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Dr. Chairul Saleh, Msi selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang.
3. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang.
4. Bapak Drs. Minto Hadi, M.Si selaku Ketua Komisi Pembimbing skripsi yang selama ini sudah bersedia memberikan waktunya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas saran, masukan, arahan, nasihat dan semangat kepada penulis yang tentu sangat bermanfaat bagi penulis.
5. Bapak Andy Kurniawan, SAP, MAP selaku Anggota Komisi Pembimbing skripsi yang selama ini sudah bersedia memberikan waktunya untuk penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas saran, masukan, arahan, nasihat dan semangat kepada penulis yang tentu sangat bermanfaat bagi penulis.

6. Bapak/Ibu dosen Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, dan juga memberi kesempatan bagi penulis untuk berdiskusi dan bertanya kepada Bapak/Ibu dosen. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat.
7. Seluruh staf/pegawai Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah membantu kelancaran segala urusan penelitian skripsi ini.
8. Kepala Badan, pemimpin, dan staf Balai Desa Poncokusumo yang sudah mengizinkan penulis melakukan riset di tempat.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis sudah berusaha sekuat tenaga untuk memperoleh hasil terbaik. Namun apabila masih ada kekurangan dan ketidak sempurnaan, maka dengan kerendahan hati, penulis membuka diri terhadap saran dan kritik dari semua pihak untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan referensi bagi pihak lain. Amin.

Malang, Agustus 2016

PENULIS

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT dan Rosul-Nya Nabi Muhammad SAW, karena atas izin-Nya pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Tiada henti penulis ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang sudah mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang sudah menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi. Alhamdulillahirobilalamin akhirnya skripsi ini sudah selesai dan penulis persembahkan karya ini kepada :

1. Allah SWT, terima kasih ya Allah atas kelancaran dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala bantuan dan limpahan rahmat dari-Mu kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Nabi Muhamaad SAW, terima kasih atas segala pesan dan perilaku Rasul yang sangat menginspirasi penulis.
3. Kepada kedua orang tua, Ibu Tri Mulyani S.pd. yang telah bekerja keras tidak mengenal lelah dan sakit demi memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya, Ibu yang luar biasa selalu mengingatkan untuk mengingat Allah agar jarak antara Ibu dan saya didekatkan dalam doa, terima kasih atas doanya, terima kasih atas kesabarannya, terima kasih atas semangat dan nasihatnya. Terima kasih untuk semuanya Bu I Love You So Much. Kepada Bapak A Suhada yang juga sudah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga agar bisa menyekolahkan anak-anaknya dengan tidak mengalami kekurangan. Terima kasih untuk kedua orangtua saya, tanpa kalian saya tidak akan sampai tahap ini.
4. Terima kasih kepada Ibu (nenek) dari Istri saya Silvilia Agies Vinda Paramita untuk bisa tinggal sementara demi menyelesaikan Skripsi ini.

5. Terima kasih kepada kedua Mertua Ayah Agus Tiantoro. dan Mamy Erika. Terima kasih banyak atas doa dan dukungannya hingga tahap ini. Kasih sayangnya yang terus menyemangati dan menginspirasi saya untuk terus menjadi lebih baik.
6. Terima kasih kepada Istri tercantik, Silvilia Agies Vinda Paramita SAP. Terima kasih atas doa dan dukungannya dan marah-marahnya juga. Terima kasih atas cinta dan kasih sayangnya dan memotivasi untuk terus menjadi lebih baik. Semoga semakin baik dan sukses untuk kita. Amin.
7. Terima kasih kepada anak saya tercinta, Muhammad Basstra Harta Nugroho. Terimakasih nak, kehadiranmu terus membuat motivasi besar untuk semakin baik dan sukses kelak untuk Abang Basstra. Amin
8. Terima kasih untuk Mama Suta (Tante) dan Om Joko yang telah merawat dari kecil dan pasca melahirkan, terima kasih semangat dan bantuannya yang Subhanalloh kalian orang baik yang luar biasa.
9. Terima kasih kepada keluarga besar dari Istri di Malang, keluarga besar dari Mamy di Malang dan di Bangka keluarga besar di Bekasi dan di Jakarta, dan terima kasih kepada sahabat Eka Nurdiansyah, S.Pd, Aldy Irhamsyah, Taufik Akbar SE, dan semua sahabat di Bekasi. Terima kasih semua atas doa, dukungan, bantuan, semoga Allah SWT senantiasa menjaga dan membalas atas segala kebaikan kalian. Amin.
10. Terima kasih kepada sahabat terbaik : Muna Namira S.Psi, Belinda Dewi Mawarni S.Pd, Dwi Ariningtyas WS, Indah Riski SE, Lia A Eviant, Rr Nia Nurmutia, Sakti rama, Syahputra Es Sasha. Terima kasih selalu memberikan doa dan dukungan yang luar biasa, memberikan semangat dan kebahagiaan ketika saya mulai kesulitan. Semoga kita dilimpahkan kesehatan kebahagiaan dan kesuksesan. Amin.
11. Terima kasih kepada sahabat, istri dan coach skripsi yang cantik, Silvilia Agies Vinda Paramita,S.AP (Vivi). Terima kasih atas bimbingannya, dukungannya dan

semangatnya yang ngga pernah bosan mengingatkan untuk terus menyelesaikan skripsi.

12. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan : Dannang Sukardo S.H, Hammurabi Wiasadono, Vega Alif Wijaya S.H, I Gede Danendra S.H, Habibi Rz S.H, Ilham Arfian S.H, Bayu Surya Handoko S.AP, Noven Aulia, Bimo Soerjo Putro, Adhika Ratdiananto S.Pn, Imam Nur Akbar S.Pn, M.Aulia Rahman S.AP, Rizki Dwi Satrio S.AP, Galih Darmawan, Vinna Kumala S.AP, Hanif Ginayuh, Vanni Kumala S.AP, Ella Alfianita S.AP, Ruth Natalia S.AP, Siti fauzia S.AP, Resita Lendy Renora S.AP, Ferina Safitri S.AP, Okki Kurnita S.AP, Olivia Dia Anggraeni S.AP, Retno Handayani S.AP, Mimi Qamarina, Rr. Safitri Damayanti S.AP (Demi), Prastyo Eka SAP dan seluruh teman dan sahabat FIA Publik 2011 yang telah mendukung dan membantu saya. Kepada teman dan sahabat TK, SD, SMP dan SMA Negri 4 Bekasi Khususnya Bip-bip 2011.
13. Terima Kasih Kepada teman Band yang terus menginspirasi Yoso Putro SE, Bagus Fikri SE, Cahya Wandika, Eka Nurdiansyah S.pd (SABDA), dan juga kepada Jerry Brilliant, dan Randy Julyantara (Fur Eyes).
14. Dan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu saya selama menyelesaikan studi di Malang. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan kalian. Amin.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua.

Malang, Agustus 2016

PENULIS

DAFTAR ISI

MOTTO.....	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN ORSINILITAS SKRIPSI.....	iii
RINGKASAN.....	iv
SUMMARY.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR/BAGAN.....	xv
DADTAR TABEL.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kontribusi Penelitian.....	8
E. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kebijakan Publik.....	12
1. Macam – macam Kebijakan.....	15
2. Implementasi Kebijakan.....	17
a. Model Implementasi Kebijakan.....	23
b. Keberhasilan dan kegagalan Implementasi Kebijakan.....	26
B. Sustainable Development.....	28
a. Macam-macam Sustainable Development.....	30
b. Pilar-pilar Sustainable Development	38
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Fokus Penelitian.....	43
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	45
D. Sumber dan Jenis Data.....	46



E. Teknik Pengumpulan Data.....	47
F. Analisa Data.....	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Malang.....	53
1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang.....	60
2. Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang.....	61
3. Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang.....	62
4. Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang.....	64
B. Gambaran Umum Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.....	64
C. Gambaran Umum Desa wisata Poncokusumo Kabupaten Malang.....	71
D. Penyajian Data Fokus Penelitian.....	74
1. Implementasi Kebijakan pengembangan pariwisata Daerah di Desa wisata Poncokusumo Berbasis <i>Sustainable Development</i>	74
a. Komunikasi antara Pemerintah dan Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan pariwisata daerah di Desa Wisata Poncokusumo.....	74
b. Alokasi Sumber Daya untuk Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan pariwisata daerah di Desa Wisata Poncokusumo.....	79
c. Disposisi dalam Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan pariwisata daerah di Desa Wisata Poncokusumo.....	84
d. Struktur Birokrasi dalam Kebijakan Pengembangan pariwisata daerah di Desa Wisata Poncokusumo.....	86
2. Faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dari pengembangan pariwisata di Desa wisata Poncokusumo.....	88

a.	Faktor penghambat.....	88
b.	Faktor pendukung.....	93
E.	Pembahasan.....	97
1.	Implementasi Kebijakan pengembangan pariwisata Daerah di Desa wisata Poncokusumo Berbasis <i>Sustainable Development</i>	97
a.	Komunikasi antara Pemerintah dan Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan pariwisata daerah di Desa Wisata Poncokusumo.....	97
b.	Alokasi Sumber Daya untuk Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan pariwisata daerah di Desa Wisata Poncokusumo.....	102
c.	Disposisi dalam Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan pariwisata daerah di Desa Wisata Poncokusumo.....	106
d.	Struktur Birokrasi dalam Kebijakan Pengembangan pariwisata daerah di Desa Wisata Poncokusumo.....	108
2.	Faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dari pengembangan pariwisata di Desa wisata Poncokusumo.....	109
a.	Faktor penghambat.....	112
b.	Faktor pendukung.....	116

BAB V Penutup

A.	Kesimpulan.....	122
B.	Saran.....	125

DAFTAR PUSTAKA

repository.ub.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN



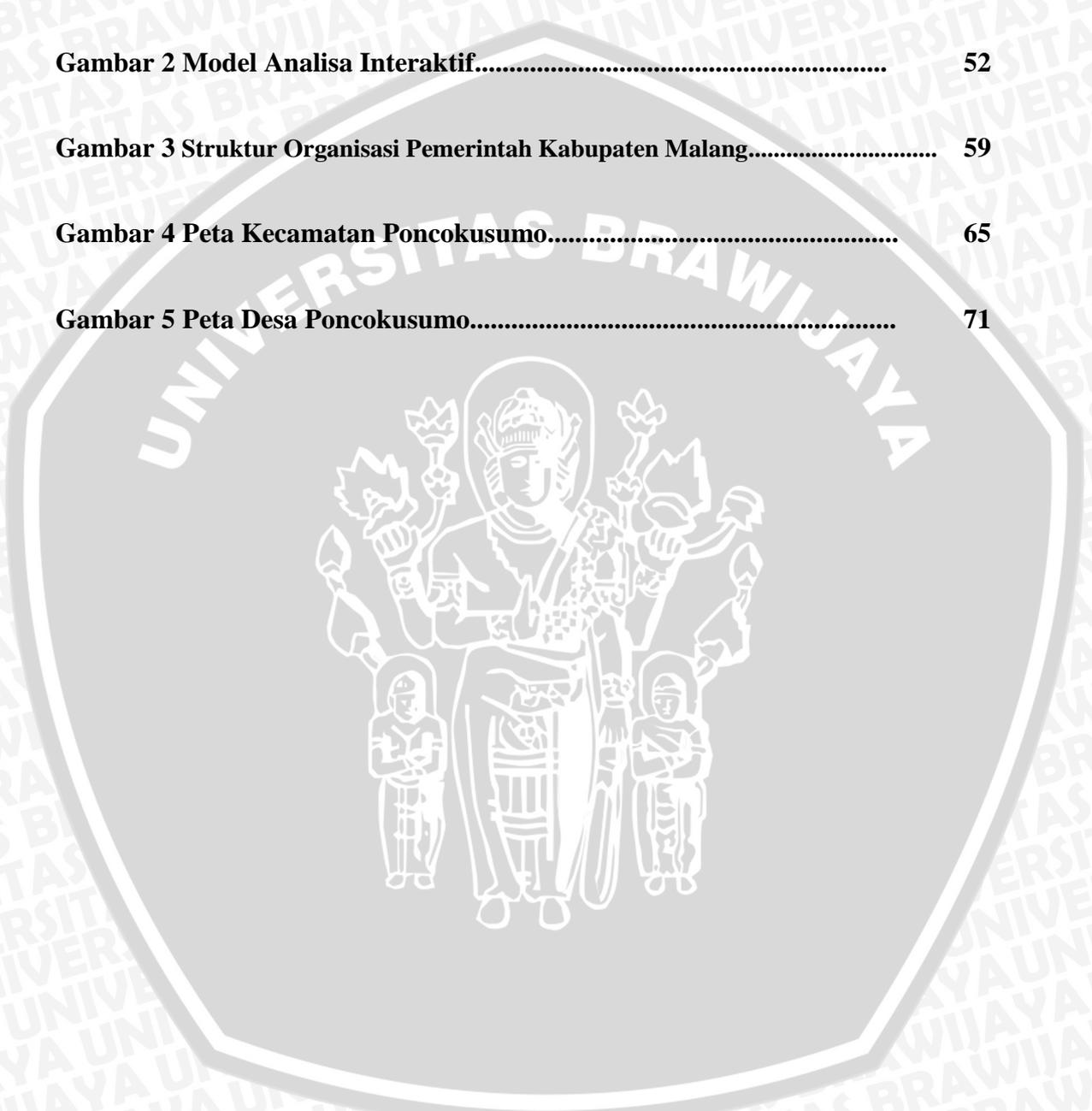
Daftar Tabel

Tabel 1 Tahap-tahap Kebijakan Menurut Winarno.....	15
Tabel 2 Batas wilayah Kecamatan Poncokusumo.....	65
Tabel 3 Luas wilayah Kecamatan Poncokusumo.....	66
Tabel 4 Mata Pencaharian Kecamatan Poncokusumo.....	67
Tabel 5 Batas- batas Wilayah Kecamatan Poncokusumo.....	67
Tabel 6 Penggunaan Kecamatan Poncokusumo.....	68
Tabel 7 Sarana dan Prasaran Fasilitas Kesehatan.....	68
Tabel 8 Potensi usaha Industri.....	70
Tabel 9 Potensi Wisata.....	70
Tabel 10 Batas Desa Poncokusumo.....	72
Tabel 11 Pembagian Wilayah Desa.....	72



Daftar Gambar

Gambar 1 <i>Implementation as a Political and Administrative Process</i>	23
Gambar 2 Model Analisa Interaktif.....	52
Gambar 3 Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Malang.....	59
Gambar 4 Peta Kecamatan Poncokusumo.....	65
Gambar 5 Peta Desa Poncokusumo.....	71



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pariwisata mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi di berbagai negara. Banyak negara menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan dalam memperoleh devisa, lapangan kerja, maupun pengentasan kemiskinan. Di Indonesia sendiri mempunyai banyak tempat wisata yang tersebar di seluruh penjuru salah satunya di Desa wisata Poncokusumo Kabupaten Malang. Desa wisata Poncokusumo mempunyai potensi sebagai daerah pariwisata, daerah budaya dan daerah agrowisata. dari potensi tersebut tidak salah jika Desa wisata Poncokusumo merupakan salah satu tujuan wisata dan edukasi. Potensi pariwisata Desa wisata Poncokusumo diantaranya adalah wisata agro, wisata budaya, wisata alam dari pegunungan semeru hingga edukasi dan sejarah.

Pengembangan kawasan merupakan upaya terpadu untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan antar wilayah dan menjaga kelestarian lingkungan hidup pada suatu wilayah. Pengembangan kawasan sangat diperlukan karena setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda. Dalam perkembangannya setiap wilayah harus mampu meningkatkan nilai strategis ekonomi masyarakatnya dan pemerintah daerah sebagai pemegang tanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja bagi masyarakat di daerahnya.

Dalam pengembangan suatu wilayah, kebijakan dan strategi pemerintah memiliki peran yang sangat penting. Peran tersebut antara lain melalui intervensi langsung berupa kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, seperti penyediaan barang dan layanan publik, prakarsa strategis, pemberdayaan masyarakat kecil, pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat dan strategi lainnya yang mempercepat pertumbuhan suatu wilayah (Nugroho, 2006:188)

Pada konteks pengembangan wilayah, pembangunan daerah merupakan tujuan bagi setiap Negara dimana kemajuan bidang ekonomi menjadi unsur penting di dalamnya meskipun bukan satu-satunya. Hal ini berarti bahwa pembangunan merupakan proses perubahan secara berkelanjutan menuju ke arah yang lebih baik untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Pembangunan adalah suatu proses multidimensi yang melibatkan perubahan-perubahan dalam struktur, sikap dan faktor kelembagaan, juga mempercepat pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakadilan dan penghapusan kemiskinan absolut (Nugroho, 2006:142)

Pasca diberlakukannya undang-undang otonomi daerah, Pemerintah Daerah menghadapi tantangan baru dalam mewujudkan Pemerintahan yang mandiri dan otonom. Kemandirian yang dimaksud adalah kemandirin dalam melaksanakan tugasnya secara tanggung jawab, pemenuhan kebutuhan masyarakat secara otonom dengan menekankan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah yang melalui potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal. Menjawab berbagai tantangan dalam pembangunan suatu daerah, ide pengembangan kawasan agrowisata

dianggap mampu menjawab tantangan pemerataan pembangunan dan pembangunan berkelanjutan yang merupakan salah satu pendekatan pembangunan pedesaan berbasis pertanian.

Agrowisata diartikan sebagai upaya mengembangkan kawasan pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis, yang diharapkan dapat melayani dan mendorong kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya. Kawasan agrowisata terdiri dari kota pertanian dan desa-desa sentra produksi pertanian yang ada di sekitarnya, dengan batasan yang tidak ditentukan oleh batasan administratif pemerintahan, tetapi lebih ditentukan dengan memperhatikan skala ekonomi kawasan yang ada. (Soemarno, 2008). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 pasal 1 ayat 24 tentang Penataan Ruang, bahwa kawasan wisata adalah kawasan yang terdiri dari satu atau lebih pusat kegiatan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem pemukiman dan sistem agribisnis.

Pengembangan Kawasan Agrowisata pada prinsipnya bukan merupakan kegiatan yang bersifat *'exclusive'* tetapi lebih bersifat *'complement'* terhadap 3 (tiga) agenda prioritas pembangunan di Jawa Timur, tahun 2009-2014, yaitu meningkatkan percepatan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, terutama melalui pengembangan agroindustri/agrobisnis, serta pembangunan dan perbaikan infrastruktur terutama pertanian di pedesaan, memperluas lapangan kerja, meningkatkan efektifitas penanggulangan kemiskinan, memberdayakan ekonomi rakyat terutama rakyat kecil dan meningkatkan

kesejahteraan rakyat dan memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta meningkatkan perubahan pengelolaan sumber daya alam dan penataan ruang (<http://agropolitan-jatim.net.,2011>)

Kebijakan dalam RTRW Provinsi Jawa Timur 2011-2031 yang mendukung pemantapan sistem Agrowisata dalam rangka peningkatan pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat sehingga menetapkan wilayah Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional yang dicapai melalui pemertahanan keberadaan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang salah satunya merupakan Kabupaten Malang yang ditetapkan sebagai Lokasi Pengembangan Kawasan Agrowisata di Jawa Timur. Sesuai dengan prioritas pengembangan Jawa Timur 2009-2014 dan sejalan dan sejalan dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Timur tahun 2005-2025 yaitu “Jawa Timur sebagai pusat Agrobisnis terkemuka, berdaya saing global dan berkelanjutan”.

Pada tahun 2006 Bupati Malang menetapkan Desa Poncokusumo sebagai salah satu Desa wisata di kabupaten Malang, desa Poncokusumo dalam beberapa tahun ini mengalami kesenjangan fokus pembangunan di wilayah agrowisatanya dimana pemerataan terkait *guet house* bagis para wisatawan, dan juga melakukan penanaman wisata apel di pekarangan rumah warga itu sendiri, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang nomor 10 tahun 2013 tentang penyelenggaraan Kepariwisata dan juga pada Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2010 tentang pengusaha pariwisata alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman wisata Alam. Implementasi kebijakan juga suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak

diimplementasikan. Oleh karena itu, program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupu agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh pelaksana. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. (Winarno, 2002; 30).

Dalam rangka untuk mendukung program pengembangan kawasan Agrowisata, pemerintah daerah juga menawarkan bantuan seperti pelatihan pendamping untuk para wisatawan, dan juga penyuluhan dan pelatihan untuk mendapatkan sertifikat bagi masyarakat desa yang ingin rumahnya dijadikan *gust house* untuk para wisatawan.

Dengan adanya program-program tersebut menunjukkan bahwa perhatian peningkatan pengembangan perekonomian masyarakat di Desa Poncokusumo harus lebih banyak terfokus kepada bidang pertanian. Dalam hal ini bukan berarti harus tetap mempertahankan bidang pertanian dengan segala ciri tradisionalnya, namun harus lebih mengarah kepada transformasi modern dan pemberdayaan masyarakat yang nantinya mampu memberikan nilai tambah terhadap sektor pertanian di Desa Poncokusumo agar lebih meningkatkan mutunya sebagai salah satu Desa yang menjadi Pengembangan Kawasan Agrowisata.

Perkembangan Desa wisata Poncokusumo dari tahun ke tahun semakin berkembang pesat, tiap tahunnya pengunjung yang datang untuk berwisata di desa wisata Poncokusumo semakin meningkat diiringi dengan terus perbaikan sistem pariwisata dan perbenahan agar memberikan kenyamanan kepada wisatawan dan menarik wisatawan untuk berkunjung. Desa Wisata Poncokusumo sebagai kawasan yang masih melestarikan adat istiadatnya memiliki peran yang sangat besar terhadap pelestarian agrowisatanya. Kebun apel yang dijadikan salah satu tempat tujuan agrowisata, dan juga ada fasilitas penjemputan mobil jeep untuk wisata ke gunung Bromo dan juga ada penyewaan Motor *Trail*. Dalam hal ini peran masyarakat dan Pemerintah Daerah sangat dalam mengembangkan potensi pariwisata. Masyarakat juga bisa ikut mempromosikan pariwisata yang ada disekitar mereka.

Sejak di tetapkannya Desa Poncokusumo sebagai salah satu wisata di kabupaten Malang, Desa wisata Poncokusumo memiliki pengembangan dan beberapa kendala yang di alami salah satunya infrastruktur yaitu jalan menuju Desa wisata Poncokusumo yang belum memadai untuk para wisatawan khususnya untuk kendaraan, dan juga jalan menuju pekarangan/perkebunan apel yang masih kurang layak untuk para wisatawan, kendala selanjutnya adalah dimana buah yang belum siap panen atau dipetik ketika wisatawan datang karena kurangnya lahan pekarangan/perkebunan.

Dengan penjelasan paparan latar belakang diatas, maka penulis tertarik mengangkat judul penelitian tentang **“Implementasi Kebijakan Pengembangan**

Pariwisata Daerah Berbasis *Sustainable Development* (Studi Pada Desa Wisata Poncokusumo, Kabupaten Malang)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah yang ada adalah :

- 1.) Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Daerah di Desa wisata Poncokusumo berbasis *Sustainable Development*?
- 2.) Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam pembangunan berkelanjutan dari pengembangan pariwisata di Desa wisata Poncokusumo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk :

- 1.) Mengetahui dan menganalisis bentuk kebijakan pariwisata di Desa wisata Poncokusumo berbasis *Sustainable Development*.
- 2.) Untuk mendeskripsikan, dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan pariwisata daerah berbasis *Sustainable Development* di Desa Wisata Poncokusumo.

D. Kontribusi Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan adanya kontribusi yang dapat diterima semua pihak yang terkait dengan tulisan ini. Adapun kontribusi yang ingin dicapai adalah antara lain :

1. Kontribusi Akademis

a) Mahasiswa

- 1) Penelitian ini dapat meningkatkan respon mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah sekaligus untuk menerapkan disiplin ilmu yang telah diperoleh
- 2) Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi peneliti lain sekaligus dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk mengadakan penelitian selanjutnya.

b) Bagi perguruan

- (1) Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pustaka untuk mengadakan penelitian selanjutnya.
- (2) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan bahan kajian tentang analisis pembangunan.

2. Kontribusi Praktis

(a) Bagi Pemerintah

- (1) Penelitian ini memberikan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Malang Balai Desa Poncokusumo khususnya untuk pembangunan berkelanjutan dalam bidang pengembangan pariwisata di Desa wisata Poncokusumo.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui secara garis besar yang dideskripsikan dalam penulisan skripsi ini, maka dapat dilihat dalam sistematika pembahasan yang merupakan susunan keseluruhan skripsi secara singkat. Adapun sistematika pembahasan dapat dirinci sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan terdiri dari lima sub bab. Pertama, latar belakang yang menguraikan tentang pembangunan berkelanjutan dalam bidang pengembangan pariwisata. Kedua, rumusan masalah penelitian yang meliputi bentuk kebijakan pengembangan pariwisata di Desa wisata Poncokusumo berbasis *Sustainable Development*, dampak pembangunan berkelanjutan dari pengembangan pariwisata di Desa wisata Poncokusumo. Ketiga, tujuan penelitian yang hendak dicapai antara lain mengetahui, menganalisis, mengidentifikasi bentuk kebijakan pariwisata di Desa wisata Poncokusumo berbasis *Sustainable Development*, dampak pembangunan berkelanjutan dari pengembangan pariwisata di Desa wisata Poncokusumo. Keempat, kontribusi penelitian yang meliputi kontribusi akademis dan praktis. Kelima, sistematika penulisan yang merupakan uraian singkat dari bab-bab penulisan skripsi.

BAB II. KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini antara lain tentang teori pemerintah daerah, teori pembangunan dan pemeliharaan, mekanisme kelayakan pembangunan dan

pemeliharaan pariwisata, dan pengembangan berkelanjutan. Teori-teori tersebut digunakan sebagai landasan dan pedoman dalam melakukan penelitian dan penganalisaan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan langkah-langkah teknis dan praktis sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Pertama, mengenai jenis penelitian yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kedua, fokus penelitian antara lain analisis bentuk program pemerintah dalam pengembangan pariwisata di Desa wisata Poncokusumo berbasis Sustainable Development, dampak pembangunan berkelanjutan dari pengembangan pariwisata di desa wisata Poncokusumo. Sehingga diketahui program pemerintah dalam bidang pembangunan serta peran *stakeholder* serta peran masyarakat dalam bidang pembangunan. Dampak dari bentuk program pengembangan pariwisata di desa wisata Poncokusumo berbasis Sustainable Development, dampak pembangunan berkelanjutan dari pengembangan pariwisata di Desa wisata Poncokusumo. Ketiga, lokasi penelitian di Balai Desa Poncokusumo Kabupaten Malang. Keempat, sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Kelima, teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Keenam, Instrumen penelitian melalui peneliti sendiri, *field note*, dan pedoman wawancara. Ketujuh, keabsahan data yaitu antara lain standar kepercayaan (*creadibility*), standar keteralihan (*tranferability*), standar ketergantungan

(*dependability*), dan standar kepastian (*comfortability*). Ke delapan, analisis data melalui tahap-tahap reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang temuan-temuan penelitian yang dihasilkan dari pengolahan dan analisis data yang dilakukan, serta dilanjutkan dengan analisis peneliti terhadap temuan-temuan penelitian yang di kaitkan dengan teori teori yang ada di dalam bab dua.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari dua sub bab pokok yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan ditarik dengan menemukan benang merah pokok permasalahan yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Sehingga dari kesimpulan tersebut peneliti dapat memberikan saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya pemerintah Kabupaten Malang untuk mengimplementasikan kebijakan pengembangan pariwisata daerah berbasis *sustainable development* guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah kebijakan yang di buat oleh administratur negara, atau administratur publik. Jadi, kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak di kerjakan oleh pemerintah. Ini karena kebijakan publik berkenan dengan setiap aturan main dalam kehidupan bersama, baik yang berkenan dengan hubungan antar warga maupun antara warga dan pemerintah. Kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan kehidupan orang seseorang atau golongan. Kebijakan publik mengatur semua yang ada di domain lembaga administratur publik. Dikatakan sebagai kebijakan publik jika manfaat yang di peroleh masyarakat yang bukan pengguna langsung dari produk yang dihasilkan jauh lebih banyak atau lebih besar dari pengguna langsungnya. Konsep ini disebut konsep *externality* atau dijadikan istilah sarapan menjadi eksternalitas. Misalnya, pemerintah membangun jalan raya. Pengguna manfaat bukan saja pemilik mobil, namun juga masyarakat yang sebelumnya terasing menjadi terbuka, kegiatan ekonomi meningkat sehingga kesejahteraan ikut pula meningkat, dan seterusnya. (Nugroho, 2006; 23-27)

Kebijakan publik untuk negara-negara berkembang bersifat pasti. Meskipun memahami kebijakan publik, dalam konteks negara-negara berkembang, mungkin kurang menarik bagi para pakar kebijakan publik, tetapi kajiannya semakin kritis

karena premis saat ini menyatakan bahwa tidak pernah ada negara miskin, selalu ada negara dengan kebijakan yang terburuk. Keberhasilan dan kegagalan negara-negara berkembang semakin tergantung pada bagaimana keberhasilan negara-negara tersebut dalam mengembangkan kebijakan-kebijakan publik yang unggul. (Nugroho, 2009, Nugroho, 2014; 41).

Kebijakan publik adalah keputusan Negara atau Pemerintah (sebagai pemegang kekuasaan) untuk *me-manage* kehidupan publik (sebagai lingkungan) agar dapat mencapai misi bangsa. Di negara-negara berkembang, kebijakan publik adalah keputusan bangsa atau negara menyangkut strategi untuk mewujudkan misi bangsa, visi pemimpin bangsa. Kebijakan publik adalah strategi untuk membawa masyarakat saat ini memasuki transisi ke arah masyarakat ideal. Konsep masyarakat ideal sebagian besar dinyatakan Undang – undang Dasar Nasional. (Nugroho, 2014;47).

Istilah kebijakan dalam kehidupan sehari – hari sering di gunakan untuk menunjuk sesuatu kegiatan yang mempunyai maksud berbeda. Para ahli mengembangkan berbagai macam definisi untuk menjelaskan apa yang di maksud dengan kebijakan publik. Masing-masing definisi memberi penekanan yang berbeda – beda, namun suatu definisi yang menekankan tidak hanya pada apa yang di usulkan pemerintah. Sementara itu para ilmuwan dalam mengkaji kebijakan publik dapat menempatkan ilmu politik sebagai ilmu yang bebas nilai atau sebaliknya, ia dapat terlibat aktif dalam memecahkan persoalan-persoalan masyarakat. Dan dengan demikian tidak bebas nilai. (Winarno, 2002; 30)

Kebijakan publik di negara-negara berkembang selalu berada dalam konteks perkembangan. Kebijakan publik merupakan platform utama rekayasa perubahan sosial agar dapat mencapai visinya ke arah negara bangsa yang baru dan sejahtera. Oleh karena itu, ide kebijakan publik di beberapa bagian bersifat universal, tetapi di bagian lain hanya bersifat kritis untuk negara-negara berkembang. Masalahnya adalah, sebagian besar kebijakan publik di negara berkembang, di banyak kawasan, seperti ekonomi, politik, sosial dan infrastruktur; semata merupakan proses copy paste dari negara Barat dan negara maju; sedangkan kondisi di negara maju sangat berbeda dengan kondisi di negara berkembang. (Nugroho, 2014; 139)

Kebijakan publik pendorong keberhasilan utama bagi negara-negara berkembang untuk dapat menjadi bangsa yang unggul. Tantangan berikutnya adalah bahwa para pembuat kebijakan terperangkap kedalam keberhasilannya berdasarkan keunggulan kebijakan sebelumnya. Ini dapat berarti pada isi atau proses, atau dapat berarti keduanya, dan di sebut kepuasan dengan diri sendiri. (Nugroho, 2014; 332).

Dalam kebijakan publik adapun proses pembuatan kebijakan merupakan proses yang kompleks karena melibatkan proses maupun variabel yang harus di kaji, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses–proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap berikut adalah tahap–tahap proses pembuatan kebijakan. (Winarno, 2002; 28-29).

Tabel 1 Tahap-tahap kebijakan menurut Winarno

Sumber (Winarno, 2002; 28-29)

Dalam penelitian ini, peneliti lebih fokus membahas dalam tahap implementasi kebijakan dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata daerah berbasis *sustainable development*.

1. Macam – macam Kebijakan

Kebijakan publik menurut James E. Anderson ada beberapa macam yaitu:

1. *Substantive* dan *Procedural Politic*, suatu kebijakan dilihat dari substansi masalah yang dihadapi dan kebijakan dilihat dari pihak – pihak yang terlibat dalam perumusannya (*policy stakeholders*)
2. *Distributive, redistributive and Regulatory poicies*, suatu kebijakan yang mengatur tentang:

- a. Pemberian pelayanan/keuntungan kepada individu-individu, kelompok-kelompok, perusahaan-perusahaan, misalnya: kebijakan untuk melindungi produk-produk local
 - b. Pemindahan alokasi kekayaan, pemilikan atau hak – hak, misalnya: kebijakan pemilikan hak atas kepemilikan tanah
 - c. Pembatasan/pelarangan terhadap perbuatan/tindakan, misalnya: kebijakan tentang larangan memiliki dan menggunakan senjata api, minuman keras, zat- zat adiktif dan psiko tropika, menjual- belikan hewan – hewan langka/ yang dilindungi oleh Negara
3. *Material policy*, suatu kebijakan yang mengatur tentang pengalokasian/penyediaan sumber- sumber material yang nyata bagi penerimanya. Misalnya: kebijakan rumah sederhana (Tipe 21) bagi setiap developer yang akan membuat komplek perumahan, rumah susun sederhana (Rusunrawa) bagi warga yang tinggal di pemukiman sangat padat, rumah anti gempa bagi warga korban gempa maupun banjir yang tidak terduga
4. *Public Good Policies*, suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang/pelayanan oleh pihak swasta, untuk kepentingan individu/perorangan di pasar bebas dengan imbalan biaya tertentu. Misalnya: penyediaan tempat-tempat hiburan/wisata, hotel, restaurant, villa, resort, kolam renang air tawar, kolam renang air laut, taxi. Selain itu ada kebijakan barang layanan publik yang apabila barang atau jasa tersebut, termasuk kategori *private goods* tetapi

merupakan bagian dari jasa-jas publik, maka disebut *publicly provided goods* artinya barang-barang private yang disediakan oleh negara. Misalnya: penyediaan tempat-tempat wisata yang dikelola oleh pemerintah.(Nugroho, 2014 : 112).

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi secara administratif adalah implementasi yang dilakukan dalam keseharian operasi dari birokrasi pemerintahan. Kebijakan di sini mempunyai ambiguitas atau kemenduaan yang rendah dan konflik yang rendah. Implementasi secara politik adalah implementasi yang perlu dipaksakan secara politik, karena walaupun ambiguitasnya rendah, namun tingkat konfliknya tinggi. Implementasi secara eksperimen dilakukan pada kebijakan yang mendua, namun tingkat konfiliknya rendah. Implementasi secara simbiolik dilakukan pada kebijakan yang mempunyai ambiguitas tinggi dan konflik yang tinggi. (Nugroho, 2006; 125).

Implementasi kebijakan juga suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupu agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, namun beberapa

yang lain mungkin akan ditentang oleh pelaksana. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. (Winarno, 2002; 30).

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (*output*) maupun sebagai hasil. Sementara itu implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sarana-sarana ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut. (Winarno, 2002; 101-102).

Dalam melakukan studi implemtasi, tujuan–tujuan dan saran–saran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan di ukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan–tujuan itu tidak dipertimbangkan, dalam menentukan ukuran–ukuran dasar dari sasaran–sasaran, kita dapat menggunakan pernyataan–pernyataan dari para pembuat keputusan sebagaimana direfleksikan dalam banyak dokumen seperti regulasi–regulasi dan garis–garis pedoman program yang menyatakan kriteria untuk evaluasi pencapaian kebijakan. Akan tetapi, dalam beberapa hal ukuran–ukuran dasar dan sasaran–sasaran kebijakan harus dideduksi. (Winarno, 2002; 111).

Implementasi merupakan proses yang dinamis. Faktor–faktor yang mungkin mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan dalam tahap–tahap awal mungkin akan mempunyai konsekuensi yang kecil dalam tahap selanjutnya. Dengan demikian, studi implementasi yang dilakukan secara *longitudinal* menjadi sangat penting dimana hubungan–hubungan diidentifikasi pada suatu waktu tidak harus diperpanjang secara kasual pada periode waktu lainnya. (Winarno, 2002; 119).

Implementasi kebijakan adalah isu yang paling kritis untuk negara–negara berkembang. Dalam pembahasan pertama kita, implementasi kebijakan berperan sampai 60% dari keberhasilan kebijakan. Ada tiga alasan yang di kenali. Pertama, alasan dalam hal perumusan. Kebijakan mungkin menjadi terlalu sulit untuk diimplementasikan karena dirumuskan dengan tidak jelas atau ragu–ragu, sehingga pengimplementasi kebijakan tidak mampu untuk

melaksanakannya. Kedua, alasan karena adanya kontrol yang lemah dalam implementasi kebijakan, sehingga terjadi bias, baik di sengaja maupun tidak di sengaja atau terjadi penyalahgunaan. Ketiga adalah tentang pemerintahan, atau etintas politik; bahwa legislatif oleh karena itu, mereka cenderung melakukan sabotase kebijakan yang disiapkan oleh eksekutif. Pemerintahan kemudia membahayakan implementasi kebijakan karena ada konflik prioritas kebijakan yang dilembagakan. Kasus ketigas adalah kasus yang paling sering terjadi di negara–negara berkembang yang menyebabkan perkembangan berada dalam kemacetan. Pendekatan yang dikemukakan adalah melalui kekuasaan eksekutif dan diputuskan dengan cara otoriter. (Nugroho, 2014; 232).

Implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial dalam proses kebijakan publik. Tanpa adanya implementasi kebijakan, sebuah keputusan kebijakan hanya akan menjadi catatan–catatan di atas meja para pejabat. Implementasi kebijakan yang berhasil menjadi faktor penting dari keseluruhan proses kebijakan. Untuk memperbaiki implementasi kebijakan, maka ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Pertama, didalam mengusulkan langkah-langkah perbaikan harus dipahami terlebih dahulu hambatan–hambatan yang muncul dalam proses implementasi kebijakan dan mengapa hambatan tersebut timbul. Model kebijakan yang diuraikan mungkin akan sangat membantu di dalam mengkaji faktor–faktor apa yang menghambat implementasi dan mengapa faktor tersebut muncul. Kedua, adalah perlu mengubah keadaan–keadaan yang menghasilkan faktor–faktor

ini. Dalam bagian-bagian sebelumnya dibicarakan usaha-usaha untuk membatasi hambatan-hambatan terhadap pelaksanaan kebijakan yang efektif. Di Amerika Serikat, sumber dari kebanyakan masalah pelaksanaan tertanam mendalam dalam struktur pemerintahan dan politik. Pejabat-pejabat tinggi di negara ini sangat sibuk dan tidak mempunyai keahlian yang memadai untuk menguraikan undang-undang. Selain itu, para pembuat keputusan melakukan tawar-menawar dan kompromi agar dapat mencapai kesepakatan mengenai kebijakan-kebijakan yang akan di buat. Kelompok-kelompok penekan mempunyai akses yang bebas terhadap para pembuat kebijakan, dan pembuat-pembuat kebijakan merasa khawatir kalau kelompok-kelompok dalam masyarakat menjauhkan diri, sementara mereka berusaha menghindari pertanggung jawaban bagi banyak keputusan kepada publik. dan masih banyak lagi faktor-faktor yang menghambat proses implementasi yang efektif. Seperti misalnya, para hakim yang tidak selalu menjelaskan keputusan-keputusan yang mereka buat dan lain sebagainya. Kondisi ini tentu akan menjadi faktor penghambat bagi implementasi kebijakan yang efektif. Oleh karena itu, usulan yang dapat di berikan untuk masalah seperti ini adalah harus ditujukan untuk mendorong faktor-faktor tersebut dapat dieliminasi. Misalnya, kurangnya kemampuan anggota legislatif dapat diatasi melalui pendidikan, *work shop* maupun *training*. Kurangnya saluran-saluran komunikasi yang efektif diatasi dengan penciptaan saluran-saluran baru yang lebih singkat masalah implementasi kebijakan dapat diatasi dengan cara pengenalan terhadap masalah yang timbul beserta latar belakang yang

melingkupnya, baru dibuat usulan–usulan untuk memperbaiki masalah yang telah diidentifikasi penyebabnya. (Winarno, 2002; 162-163).

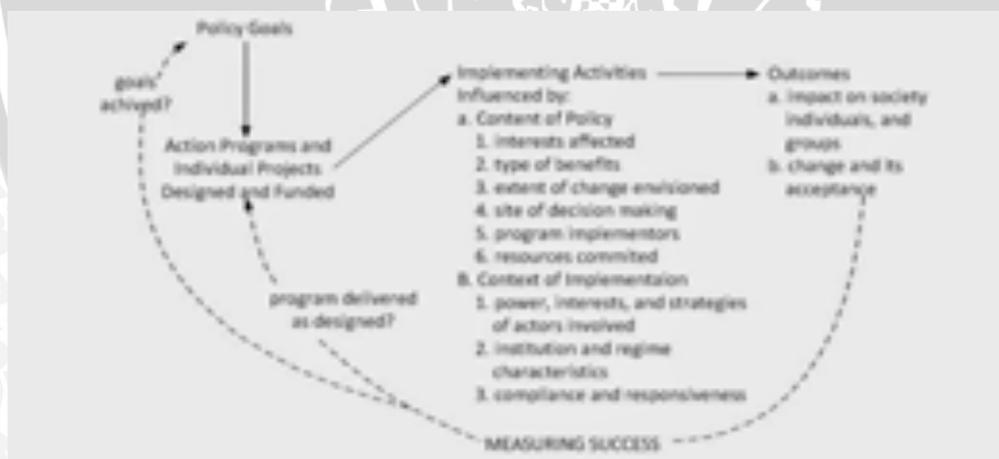
Implementasi kebijakan merupakan proses yang rumit dan kompleks. Namun, di balik kerumitan dan kompleksitasnya tersebut, implementasi kebijakan memegang peran yang cukup vital dalam proses kebijakan. Tanpa adanya tahap implementasi kebijakan, program–program kebijakan yang telah disusun hanya akan menjadi catatan–catatan resmi di meja para pembuat kebijakan. Kedua model implementasi kebijakan yang di kemukakan memberikan referensi yang cukup berarti untuk mengkaji implementasi kebijakan. Dengan adanya kedua model tersebut, kita menjadi lebih mudah mengidentifikasi variabel–variabel yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Melalui kedua model ini, kita juga dapat melihat kendala–kendala yang mungkin timbul selama proses implementasi kebijakan sehingga harapan untuk memperbaiki implementasi kebijakan di masa datang menjadi terbuka lebar. (Winarno, 2002; 163).

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program–program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. (Nugroho, 2006; 141).

a. Model implementasi kebijakan

Merilee S. Grindle (1980) mencatat bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tergantung pada isi kebijakan dan konteks implementasinya, yang disebut sebagai derajat kemampuan implementasi. Dalam hal ini, terkait dengan kepentingan publik yang berusaha dipengaruhi oleh kebijakan jenis keuntungan yang dihasilkan derajat perubahan yang dimaksud, posisi pembuat kebijakan dan pengimplementasi kebijakan serta sumber daya yang dihasilkan. Dalam hal konteks, ada tiga variabel utama yang harus diperhatikan yaitu kekuatan, kepentingan aktor yang terlibat, karakter institusi, dan tingkat kepatuhan. (Nugroho, 2014 : 221)

Gambar 1 *Implementation as a Political and Administrative Process*



(Sumber : Nugroho, 2014 : 224)

Menurut Grindle (1980) keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh *Content of implementation* dan *Context of implementation*. *Content of implementation* mencakup kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan;

jenis manfaat yang dihasilkan; derajat perubahan yang diinginkan; kedudukan pembuat kebijakan; siapa pelaksana program; dan sumber daya yang dikerahkan. *Context of implementation* mencakup kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat; karakteristik lembaga dan penguasa; dan kepatuhan dan daya tanggap. (Nugroho, 2014 : 224)

Malcolm Goggin, Ann Bowman, dan Jame Lester (1990) mempromosikan model komunikasi implementasi kebijakan dan menyebutnya sebagai generasi ketiga. Goggin, Bowman, dan Lester kelihatannya senang mengikuti pemahaman Mazmanian dan Sabatier karena para pakar menyebutkan tentang minat mereka untuk membuat implementasi kebijakan menjadi lebih ilmiah dengan menempatkan model penelitian dasar yang ditunjukkan dengan adanya variabel independen, variabel yang saling terkait, dan variabel dependen dan menempatkan faktor komunikasi sebagai pembangkit implementasi kebijakan. (Nugroho, 2014 : 221)

Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun (1978) mencatat bahwa keberhasilan implementasi kebijakan paling tidak memerlukan sepuluh prasyarat. Permintaan pertama, adalah adanya jaminan bahwa kondisi implementasi eksternal tidak akan memberikan dampak kepada badan tersebut. Permintaan kedua, adalah bahwa ada cukup sumber daya untuk implementasi. Ketiga, sumber daya yang terintegrasi benar-benar ada. Keempat, adalah menyangkut pertanyaan apakah kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan didasarkan pada alasan kualitas yang kuat, kelima, seberapa banyak alasan terjadinya kualitas. Keenam, adalah seberapa lemah antar hubungan di

variabel. Ketujuh, adalah tentang kedalaman pemahaman terhadap tujuan-tujuan kebijakan. Kedelapan, adalah mempertanyakan apakah pekerjaan telah diperinci dan ditempatkan dalam susunan yang benar. Kesembilan, diperlukan komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Dan kesepuluh, badan pengimplementasi dapat meminta kepatuhan total. (Nugroho, 2014 : 220-221).

George Edward (1980, 1) mencatat bahwa isu utama kebijakan publik adalah kurangnya perhatian kepada implemtasi kebijakan publik. Dinyatakan dengan tegas bahwa tanpa implemtasi yang efektif, keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilakukan. Oleh karenanya Edward menyarankan untuk memberikan perhatian kepada empat isu utama. Empat isu pokok tersebut adalah:

1. Komunikasi

Berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan atau politik.

2. Sumber Daya

Berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khusus sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik secara efektif.

3. Disposisi

Berkenaan dengan kesediaan dari para implementator untuk peduli kebijakan tersebut. Kecakapan tidaklah mencukupi tanpa kesediaan untuk melaksanakan kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggaraan implementasi kebijakan publik. Ketika suatu kebijakan sudah dibuat maka tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan, dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut. (Nugroho, 2014 : 225-226).

b. Keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan

Sebuah kebijakan harus mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan Michael Lipsky (1980:3) agar berhasil menimplementasikan kebijakan, perencana dan pembuat kebijakan harus meletakkan pemerintah sebagai perhatian mereka. Oleh karena itu diperlukan langkah tambahan dalam perencanaan kebijakan dan pra-implementasi yaitu kesiapan kebijakan. Langkah ini adalah untuk mempersiapkan pengimplementasi agar dipersiapkan dengan baik tentang kebijakan apa yang dia pegang, bagaimana mengimplementasikannya, dan membuat sebagai bagian penting dari keberhasilan kebijakan. (Nugroho; 2014 : 251).

Meyres dan Vorsanger (2003) mengenal peran kritis birokrat level jalanan, sebagai institusi yang betul-betul bertanggung jawab pada implementasi kebijakan agar berhasil, dan menjelaskan bahwa:

“para pekerja garis depan di badan-badan publik berperan penting tetapi sering kali mengabaikan dalam membentuk penyampaian kebijakan, output, dan dampak. Mereka diabaikan oleh kebanyakan pejabat kebijakan, yang terkejut oleh distorsi implementasi arah kebijakan atau arah kebijakan yang tidak disampaikan. Mereka diabaikan oleh para pakar proses kebijakan, yang pentingnya sering berakhir dengan adopsi arahnya. Dan mereka diabaikan oleh evaluator program yang salah mengasumsi kan bahwa perlakuan kebijakan yang mereka evaluasi secara akurat dideskripsikan oleh arah tersebut.”

Di negara-negara berkembang, birokrat jalanan melakukan hampir semua implementasi kebijakan dari indentifikasi, kartu, paspor, dan surat izin mengemudi, pelayanan kesehatan, dan pelayanan sosial. (Nugroho, 2014 : 249).

Untuk negara-negara berkembang, kebijakan publik sebaiknya tidak gagal dalam perumusannya atau pembuatan keputusannya, karena akan memperlemah kredibilitas pembuat kebijakan, pemerintah yang berkuasa. Namun perumusan kebijakan tidak dapat dipisahkan dari implementasi kebijakan, oleh karena itu perumusan kebijakan di negara-negara berkembang dianggap gagal jika:

- 1) Kebijakan berhasil dirumuskan, tetapi tidak mampu untuk di implementasikan. Hal ini dinamakan sebagai kegagalan manajemen, karena kebijakan kemudian *undermanage* atau tidak mampu di-manage.

- 2) Kebijakan berhasil dirumuskan, akan tetapi implementasinya mahal. Hal ini dinamakan kegagalan administratif.
- 3) Kebijakan berhasil dirumuskan dan implementasinya juga berhasil, tetapi hasilnya tidak seperti yang didesain. Kegagalan ini dinamakan kegagalan desain.
- 4) Kebijakan berhasil dirumuskan, implementasinya sama berhasilnya seperti desain, tetapi cocok dengan kearifan kebijakan dari hasil yang diharapkan. Kegagalan ini dinamakan kegagalan teori (Patton dan Sawicki, 1993:365).
- 5) Kebijakan berhasil dirumuskan, tetapi implementasinya diambil alih oleh kepentingan politik lain dan/ atau administrasi lain, oleh karenanya menciptakan hasil yang berbeda total. Kegagalan ini dinamakan kegagalan yang kerual rel.

Tujuan isu pembuat kebijakan di negara-negara berkembang adalah: bagaimana menghindari kegagalan kebijakan karena kebijakan harus dikembangkan menjadi kebijakan pemerintah, dan bagaimana membuat kegagalan akuntabel karena kadang-kadang kegagalan datang diluar kapasitas pembuat kebijakan dan sulit untuk ditangani. (Nugroh, 2014 : 251-252).

B. Sustainable Development

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) telah menjadi agenda global dalam setiap proses pembangunan. Oleh karenanya, seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah dalam berbagai sektor pembangunan harus menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan baik dalam setiap

kebijakan maupun rencana pembangunan yang akan dilaksanakan, tentu saja termasuk di dalamnya pembangunan sektor kepariwisataan.

Konsep pembangunan berkelanjutan dimunculkan pertama kali oleh *World Commission on Environment and Development Report* pada tahun 1987 dengan mendefinisikan *Sustainable Development* sebagai *'meeting the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs'*.

Berdasarkan definisi tersebut, *World Tourism Organization (WTO)*, telah menerapkannya pada sektor-sektor kepariwisataan dengan mendefinisikan *Sustainable Tourism Development* menjadi:

"Sustainable tourism development meets the needs of present tourists and host regions while protecting and enhancing opportunity for the future. It is envisaged as leading to management of all resources in such a way that economic, social, and aesthetic needs can be fulfilled while maintaining cultural integrity, essential ecological processes, and biological diversity, and life support system."

Definisi tersebut mengungkapkan kunci-kunci implementasi pembangunan pariwisata harus memenuhi paling tidak tiga kisi-kisi sebagai berikut:

- a. *"positive socioeconomic change"* yang artinya perubahan harus membawa keadaan sosial dan ekonomi menjadi lebih baik.
- b. *"does not undermine the ecological and social systems"* yang artinya menghindari penggunaan sumber daya alam dan buatan secara gegabah dan tanpa perhitungan.
- c. *"integrated policy, planning, and social learning processes"* yang artinya implementasi pembangunan berkelanjutan bergantung pada integrasi antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini juga merupakan jantung dari perencanaan, prinsip, dan praktek kepariwisataan.

Hal tersebut telah diadopsi di Indonesia seperti yang disebutkan dalam Piagam Pariwisata Berkelanjutan (1995) bahwa pembangunan pariwisata berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat didukung secara ekologis sekaligus layak secara ekonomi, juga adil secara etika, dan berkeadilan sosial terhadap masyarakat. Artinya, pembangunan berkelanjutan adalah upaya terpadu dan terorganisasi untuk mengembangkan kualitas hidup dengan cara mengatur penyediaan, pengembangan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya secara berkelanjutan. Hal tersebut hanya dapat terlaksana dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang melibatkan partisipasi aktif dan seimbang antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan tidak saja terkait dengan isu-isu lingkungan, tetapi juga isu demokratisasi, hak asasi manusia, dan isu lain yang lebih luas cakupannya. (Nugroho, 2014: 224).

a. Macam-macam *Sustainable Development*

Kebijakan pengembangan pariwisata adalah implementasi Sismenas yang melekat kepada sistem kelembagaan yang sedang berlaku. Kelembagaan pemerintah dalam wujud peraturan dan perundangan menjadi landasan langsung maupun tidak langsung pengembangan dan operasional pariwisata. Beberapa produk aturan tersebut dikemukakan sebagai berikut:

- a. Tap MPR IX/2001 Reformasi Agraria dan Pengolahan Lingkungan Hidup
- b. UU 5/1983: Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia
- c. UU 9/1985: Perikanan

- d. UU 5/1990: Konservasi Keanekaragaman hayati
- e. UU 5/1994 tentang Konservasi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati
- f. UU 10/2009 tentang Kepariwisataaan;
- g. UU 26/2007: Penata Ruang.
- h. UU 32/2009: Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- i. UU 19/2004: Kehutanan
- j. UU 32/2004: Pemerintahan (Otonomi) Daerah
- k. UU 33/2004: Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
- l. UU 27/2007: Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – pulau kecil
- m. UU 36/2010: Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata alam
- n. PP 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)
- o. PP 10/2010: Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
- p. PP 3/2008: Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan
- q. PP No 68/1998 Tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
- r. Pepres Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014

s. **Pepres 12 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP)**

Peraturan perundangan di tingkat pusat tersebut menyajikan konsep, definisi dan beban tugas pengelolaan dalam sistem kebijakan nasional. Kebijakan nasional terdistribusi dalam sektor terkait pariwisata dilandasi hirarki perundangan yang sistematis. Suatu peraturan selain mengacu kepada peraturan yang lebih tinggi atau melengkapi aturan yang sejajar dengannya, juga membuka peluang dan kreasi implementasi bagi peraturan dalam hirarki di bawahnya. Kebijakan pariwisata dapat mengacu kepada hubungan antar industri maupun terlaksananya fungsi-fungsi organisasi. Hubungan antar industri ditunjukkan dengan keterkaitan sektor jasa pariwisata dengan sektor lain, misalnya kehutanan, perkotaan, pendidikan, dan infrastruktur. Sementara hubungan fungsional organisasi mengacu kepada fungsi – fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. (Nugroho, 2015; 224-226).

Seiring berkembangnya tujuan –tujuan pariwisata di luar wilayah taman nasional atau otoritas Kementerian Kehutanan. Serta semangat pembangunan otonomi daerah, sesuai Permendagri No 33 Tahun 2009 pelaku usaha pariwisata dapat berbentuk perseorangan dan/ atau badan hukum atau pemerintah daerah atau kerja sama di antara mereka. Pemerintah daerah juga bertanggung jawab dalam pengendalian melalui pemberian izin pengembangan pariwisata pemantauan pengembangan pariwisata penertiban atas penyalahgunaan izin pengembangan pariwisata dan penanganan penyelesaian masalah atau konflik yang timbul dalam penyelenggaraan

pariwisata. Pengendalian pariwisata dilakukan antara lain terhadap fungsi kawasan pemanfaatan ruang pengembangan sarana dan prasarana kesesuaian spesifikasi konstruksi dengan desain teknis dan kelestarian kawasan pariwisata.

Peran Balai Desa Ponokusumo dalam kebijakan pengembangan pariwisata menitikberatkan dalam aspek kemasan layanan, substansi dan promosi/pengembangan kebudayaan. Telah diterbitkan Peraturan Bersama Mendagri dan Menbudbar No 42 dan 40 tahun 2009 Tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan. Secara teknis Ditjen Destinasi Wisata, Ditjen Pemasaran dan Ditjen Kebudayaan menangani implementasi kebijakan khususnya pariwisata. Beberapa aturan teknis (yang senantiasa berubah setiap periode tertentu mengikuti perkembangan) yang dapat terkait dengan pariwisata meliputi:

1. KM.5/PW.007/MKP04 tentang Kewenangan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal bidang Nilai Budaya
2. KM.56/PW.007/MKP/04 tentang Kewenangan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal bidang Sejarah dan Purbakala
3. KM.59/KP.107/MKP/04 tentang Penetapan Pemberian Penghargaan kepada Juru Pelihara Benda Cagar Budaya/Situs
4. KM.62/PW.205/MKP/04 tentang Prosedur Pembuatan Film oleh Pihak Asing di Indonesia
5. 39/KP.102/MKP/2004 tentang Pemebrian Anugrah Kebudayaan Kepada Individu atau Kelompok Peduli Tradisi

6. 27/PW.202/MK/04 tentang Pedoman Penyelenggaraan Promosi Kebudayaan dan Pariwisata di Lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Nugroho, 2015; 231-232).

Dalam IBSAB (Bappenas, 2003) dinyatakan bahwa ada delapan arahan untuk pengembangan konservasi keanekaragaman hayati , yakni:

1. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan keanekaragaman hayati berbasis pengetahuan dan kearifan lokal. Untuk itu, diperlukan dukungan ketersediaan dan akses data dan informasi perihal potensi, fungsi, jumlah, dan distribusi keanekaragaman hayati. Kegiatan – kegiatan yang menyangkut keanekaragaman hayati tersebut dilaksanakan secara bertanggungjawab dan adil, yang diformulasikan melalui kebijakan harga dan perolehan keuntungan yang mampu mengkonservasi sumber daya keanekaragaman hayati, menghasilkan kesejahteraan kepada penduduk lokal, dan mengentaskan kemiskinan.
2. Mendorong dan memperluas kegiatan penelitian dan pengembangan untuk pengelolaan keanekaragaman hayati . proses ini dilanjutkan pula dengan diseminasi dan program kerja sama yang menghasilkan nilai tambah nyata dan melibatkan partisipasi di antara pemerintah pusat dan daerah, swasta, masyarakat lokal, dan dukungan internasional.
3. Meningkatkan konservasi fungsi dan keseimbangan ekosistem di tingkat lokal, regional dan nasional untuk menghasilkan manfaat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pada saat sekarang dan akan

datang. Konservasi ekosistem diarahkan kepada terbangunnya keunggulan kompetitif pengelolaan agar menghasilkan manfaat ekonomi dan dapat berkompetisi dalam pasar global.

4. Membangun kegiatan – kegiatan ekonomi yang berkelanjutan berbasis teknologi ramah lingkungan dan sosial disesuaikan dengan tujuan – tujuan perbaikan distribusi kesejahteraan, perlindungan hak – hak dan peningkatan martabat penduduk lokal.
5. Mengembangkan sistem pengelolaan keanekaragaman hayati (mencakup aspek konservasi, rehabilitasi dan pemanfaatan), yang berkelanjutan dan berbasis pengetahuan indegeous lokal. Sistem dibangun melalui proses perncanaan, implementasi monitoring dan evaluasi secara terintegrasi, melibatkan penduduk lokal, LSM, swasta dan pemerintah dalam kerangka pelaksanaan *good governance*.
6. Membangangun dan mengembangkan kerangka kelembagaan dan kebijakan yang efektif di tingkat nasional, regional dan lokal disertai implementasi penegakan hukum untuk mendukung pengelolaan keanekaragaman hayati. Kelembagaan nasional tersebut bersifat saling sinergi dan *accountable* disesuaikan dengan kesepakatan – kesepakatan keanekaragaman hayati di tingkat internasional.
7. Mendorong dan memulai pelaksanaan desentralisasi dan dekonsentrasi wewenang pengelolaan keanekaragaman hayati di tingkat pemerintah daerah dan masyarakat lokal. Hal ini dilakukan secara bertahap dan selektif didukung bantuan teknis agar pemerintah daerah mampu

melaksanakan pengelolaan secara berkelanjutan berbasis partisipasi lokal

8. Mengembangkan mekanisme penyelesaian masalah dalam pengolahan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati di tingkat nasional, nasional dan internasional berorientasi kepada kesepakatan yang menguntungkan semua pihak, terbuka dan bertanggungjawab. (Nugroho, 2015; 233-237).

Pariwisata khususnya menuju pariwisata indonesia, kendala akses menuju pariwisata memang problem yang tidak sederhana. Hal itu juga tidak lepas dari rendahnya jumlah pengunjung. Semakin banyak pengunjung, secara alamiah akan mengundang investasi infrastruktur. Tantangan tersebut menjadi peluang dikembangkannya sarana transportasi oleh penduduk setempat. (Nugroho, 2015; 242).

Upaya konservasi keanekaragaman hayati telah membuka jalan pengembangan jasa pariwisata. Kerja sama internasional dalam rangka *Natural Resources Management* Program atau lainnya, misalnya *WWF* atau *Conservation International*, sudah barang tentu memerlukan tindak lanjut dalam pasca program. Itu sebabnya, diperlukan mekanisme pendanaan jangka panjang terhadap aktivitas – aktivitas konservasi tingkat kabupaten dan lokal untuk memastikan bahwa insiatif – insiatif konservasi tidak berhenti. Pengalaman menunjukkan bahwa keberlanjutan aktifitas itu akan membangkitkan permintaan jasa pariwisata. (Nugroho, 2015; 244).

Konsistensi kebijakan konservasi memerlukan dukungan *stakeholder* di tingkat daerah. Keberadaan LSM lokal yang kredibel akan menjadi cermin kepercayaan dan kepanjangan tangan lembaga donor melanjutkan program-program konservasi. Kepercayaan lembaga asing juga datang bila program-program konservasi melibatkan masyarakat. Tidak kalah pentingnya adalah kinerja Pemda dan unsur Pariwisata yang selama ini menjadi faktor kritikal konsistensi kebijakan. (Nugroho, 2015; 244).

Perkembangan pariwisata indonesia secara menyeluruh merupakan hasil kerja berbagai pihak. Antara lain pemerintah, baik pusat maupun daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun masyarakat. Dewasa ini masih di sarankan bahwa sinergi dari upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mengembangkan pariwisata nasional masih belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan antara lain, masih adanya perbedaan persepsi yang perlu mendapatkan klarifikasi. Berbagai kemudahan yang telah diberikan untuk mendorong investasi di sub sektor pariwisata, tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya bahkan kemudahan tersebut yang semula diajukan untuk mendorong pengembang yang serius dan profesional telah memicu tumbuhnya pengembangan amatiran yang memanfaatkan kemudahan tadi untuk memperoleh keuntungan ekonomis jangka pendek, tanpa memikirkan pencapaian tujuan kepariwisataan nasional yang akan berdampak positif dalam jangka panjang. (Sedarmayanti: 2014; 29).

Perencanaan di tingkat nasional masih kurang dipahami oleh daerah dan banyak daerah yang menyusun rencana hanya karena alasan politis yakni

karena harus memiliki suatu rencana. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang profesional dan berpengalaman yang memahami permasalahan kepariwisataan secara utuh. Selain itu, pariwisata lebih banyak tumbuh atas kekuatan pasar, terkonsentrasi di tempat – tempat yang sudah maju dan memudahkan proses penerimaan maupun pemasaran. Kurang berkembang di tempat yang seharusnya dikembangkan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan kawasan barat – timur maupun dalam rangka mendistribusikan arus wisatawan guna mengurangi kepadatan di tempat – tempat tertentu yang dapat mengancam keseimbangan lingkungan fisik maupun sosial. Kebijakan pembangunan pariwisata nasional merupakan upaya untuk mendorong para pelaku di sektor kepariwisataan dalam mencapai sasaran yang digariskan dan tujuan yang ditetapkan. Dalam menunjang kebijakan nasional tersebut, strategi pengembangan kebudayaan dan pariwisata tidak ditujukan kepada penyeragaman dengan dalih nasionalisasi, tetapi kesatuan dan persatuan bangsa harus dibangun dalam kebhinekaan, sehingga justru karakter lokal harus mengemuka tanpa meninggalkan bingkai kenasionalannya. (Sedarmayanti, 2014; 30).

b. Pilar *Sustainable Development*

Berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan, maka indikator pembangunan berkelanjutan tidak akan terlepas dari aspek-aspek penting itu sendiri, yaitu aspek ekonomi, social, ekologi/lingkungan.

1. Aspek Ekonomi

Aspek ekonomi pariwisata merupakan ukuran terpenting yang mencerminkan keberlanjutan pengelolaan. Ukuran tersebut dalam wujud nilai tambah maupun manfaat ekonomi lain merupakan energi bagi keberlanjutan aktivitas stakeholder dalam setiap interaksi dan aliran dalam sistem ekonomi pariwisata. Distribusi manfaat mengalir tidak hanya kepada pemerintah, sektor swasta dan penunjangnya, maupun pengunjung, tetapi juga untuk pemberdayaan sosial dan ekonomi penduduk lokal dan konservasi lingkungan. Salah satu stakeholder tidak berfungsi, mengakibatkan kelumpuhan aktivitas ekonomi lainnya dan senantiasa menghasilkan kerugian yang signifikan di pihak penduduk lokal. Dalam posisi ini, aspek sosial dan lingkungan senantiasa mengalami ancaman kerusakan.(Nugroho, 2015 : 52).

Dalam aspek ekonomi ini memiliki 3 aspek di dalamnya yaitu aspek ekonomi mikro, makro, dan manfaat yang tidak terukur. Ketiganya tidak hanya menyajikan nilai atau manfaat yang berbeda, tetapi juga berimplikasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pengembangan manajemenpariwisata. Peran peran ekonomi tersebut memiliki perannya masing-masing yaitu:

1) Ekonomi Mikro

Konsep ekonomi mikro dapat diberlakukan di dalam menelaah kegiatan wisata khususnya pariwisata. Hal itu meliputi kajian produk,

kemasan, kualitas dan kuantitas, pelaku dan harga. Keputusan individu masuk dalam industri pariwisata dipengaruhi oleh pilihan-pilihan tersebut. Umumnya produk wisata memiliki karakteristik yang sama dengan barang konsumsi. (Nugroho, 2015 : 54).

2) Ekonomi Makro

Kajian makro ekonomi jasa pariwisata umumnya atau ekonomi wisata membahas tentang pembagian ekonomi, pendapatan dan tenaga kerja, maupunketertarikan ekonomi. Sektor pariwisata tidak berjalan sendirian dalam perekonomian suatu wilayah. Ia membutuhkan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, listrik dan air bersih, selain dukungan dari sektor perdagangan maupun pakaian, makanan dan minuman, baik dari dalam maupun luar negeri. Peran sektor pariwisata dapat dilihat dari ukuran tenaga kerja, pendapatan, PDRB maupun output total. (Nugroho, 2015 : 64).

3) Nilai Ekonomi Lingkungan

Manfaat ekonomi wilayah pariwisata tidak hanya diukur melalui pendekatan pasar. Karenanya upaya memberdayakan penduduk lokal pada dasarnya adalah dengan menghitung peran dan budaya mereka dalam peran konservasi terhadap lingkungannya. Fisik lingkungan dan budaya, yang sehari-hari dihadapi, akan memberikan dampak langsung bagi keberlangsungan hidupnya. (Nugroho, 2015 : 75).

2. Aspek Sosial

Aspek sosial menyajikan peran penting dalam mendukung kinerja sektor pariwisata. Aspek sosial bukan hanya menidentifikasi stakeholder tetapi juga mengorganisasikannya sehingga menghasilkan manfaat (dan intensif ekonomi) yang optimal bagi masing-masing stakeholder. Stakeholder dalam sektor pariwisata meliputi siapapun yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sektor pariwisata. Mereka adalah penduduk lokal, pemerintah, kelompok masyarakat nirlaba (LSM atau yang sejenis), sektor swasta, wisatawan, dan pihak lain yang tidak secara langsung terkait dengan pariwisata. (Nugroho, 2015 : 79).

3. Aspek Lingkungan

Kualitas lingkungan dalam arti luas, meliputi sumber daya alam dan buatan, memiliki hubungan yang kompleks dengan aktivitas pariwisata. Hubungan tersebut melibatkan beragam aktivitas yang dapat menghasilkan dampak-dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah lahirnya manfaat berupa perlindungan dan konservasi lingkungan, lahirnya kesadaran tentang nilai-nilai lingkungan dan implikasi upaya-upaya komprehensifnya tentang pembiayaan investasi dan pengelolaannya. Sedangkan dampak negatifnya adalah aktifitas-aktifitas selama pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, bandara, dan sebagainya. Dampak-dampak tersebut bisa bersifat langsung atau tidak dapat terprediksi saat sekarang. (Nugroho. 2015 :101).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Yoseph dan Yoseph, 1979, penelitian adalah *art and science* guna mencari jawaban terhadap suatu permasalahan. Karena seni dan ilmiah maka penelitian juga akan memberikan ruang-ruang yang akan mengakomodasi adanya perbedaan tentang apa yang dimaksud dengan penelitian. Penelitian dapat juga diartikan sebagai cara pengamatan atau inkuiri dan mempunyai tujuan untuk mencari jawaban permasalahan atau prosesor penemuan, baik itu *discovery* maupun *invention*. *Discovery* diartikan hasil temuan yang memang sebetulnya sudah ada, sebagai contoh misalnya penemuan Benua Amerika adalah penemuan yang cocok untuk arti *discovery*. Sedangkan *invention* dapat diartikan sebagai penemuan hasil penelitian yang betul-betul baru dengan dukungan fakta. Misalnya hasil Kloning dari hewan yang sudah mati dan dinyatakan punah, kemudian diteliti untuk menemukan jenis yang baru. Penelitian adalah proses ilmiah yang mencakup sifat formal dan intensif. Karakter formal dan intensif karena mereka terikat dengan aturan, urutan, maupun cara penyajiannya agar memperoleh hasil yang diakui dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Intensif dengan menerapkan ketelitian dan ketepatan dalam melakukan proses penelitian agar memperoleh hasil yang dapat dipertanggung

jawabkan, memecahkan problem melalui hubungan sebab dan akibat, dapat diulang kembali dengan cara yang sama dan hasil sama.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2005 : 6)

Pada dasarnya mempunyai tujuan-tujuan dengan menggunakan cara-cara tertentu untuk memahai suatu obyek (fenomena) yang ada. Uraian yang menjelaskan berbagai fenomena dalam penelitian ini diharapkan memberikan hasil yang maksimal sehingga dapat dikategorikan menjadi suatu penulisan yang bernilai ilmiah.

Penelitian ini mencoba melihat serta mendeskripsikan secara intensif tentang gambaran Implementasi Kebijakan pemerintah daerah khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan pihak swasta yang akan bekerja sama membangun pariwisata dengan memperhatikan dan mengedepankan percepatan pembangunan berkelanjutan di Desa wisata Poncokusumo Kabupaten Malang.

B. Fokus Penelitian

Salah satu faktor penting dalam suatu penelitian adalah menentukan fokus. Perlunya fokus penelitian ini adalah untuk membatasi masalah dalam penelitian

sehingga obyek yang akan diteliti tidak melebar dan terlalu luas. Fokus penelitian ini juga ditujukan agar penelitian ini bisa lebih terarah dan lebih terinci serta tidak menyimpang dari rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Menurut Moleong (2006 : 97) fokus pada dasarnya adalah masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya. Fokus penelitian merupakan tahap awal pelaksanaan penelitian, dengan demikian peneliti akan memperoleh gambaran secara umum tentang obyek yang akan diteliti.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti kemudian mengambil fokus penelitian sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Pengembangan pariwisata daerah Berbasis *Sustainable Development* (Studi pada Desa Wisata Poncokusumo)
 - a. Komunikasi antara Pemerintah dan Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan pariwisata daerah di Desa Wisata Poncokusumo.
 - b. Alokasi Sumber Daya untuk Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan pariwisata daerah di Desa Wisata Poncokusumo.
 - c. Disposisi dalam Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan pariwisata daerah di Desa Wisata Poncokusumo.

- d. Struktur Birokrasi dalam Kebijakan Pengembangan pariwisata daerah di Desa Wisata Poncokusumo.
2. Faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dari pengembangan pariwisata di Desa wisata Poncokusumo
 - a. Faktor penghambat.
 - b. Faktor pendukung.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana fenomena yang diteliti berlangsung sedangkan situs penelitian merupakan letak sebenarnya dimana peneliti mengadakan penelitian untuk mendapatkan data yang valid, akurat dan benar-benar dibutuhkan dalam penelitian.

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Desa wisata Poncokusumo Kabupaten Malang sedangkan situs penelitian adalah di Balai Desa Poncokusumo. Beberapa pertimbangan penulis mengambil lokasi penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Desa wisata Poncokusumo Kabupaten Malang

Desa wisata Poncokusumo adalah salah satu tempat wisata di Kabupaten Malang berbasis edukasi, Desa wisata Poncokusumo saat ini sedang di kembangkan fasilitas dan infrastruktur jalannya agar nantinya layak untuk bisa menjadi tempat wisata yang lebih baik untuk keluarga, karena Desa wisata

Poncokusumo juga dianggap sebagai tempat wisata di daerah Kabupaten Malang yang mempunyai potensi untuk pembangunan berkelanjutan dalam meningkatkan pertumbuhan sosial dan ekonomi.

2. Balai Desa Poncokusumo

Balai Desa Poncokusumo dianggap mampu memberikan informasi yang tepat dalam menjawab rumusan masalah yang sedang diamati oleh peneliti. Selain itu Balai Desa Poncokusumo sesuai sebagai media untuk mengaplikasikan ilmu dan membandingkan antara praktek dengan teori yang telah penulis peroleh di bangku kuliah

D. Sumber dan Jenis Data

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2012:157) “sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”. Dalam penelitian ini digunakan dua macam data, yaitu:

1. Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan pihak yang terkait dengan objek yang diteliti. Data primer diperoleh dengan cara diamati, dicatat, dan dianalisis untuk menjadi informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Desain yang dibuat dalam data primer harus menjamin pengumpulan data yang efisien dengan alat dan teknik serta karakteristik dari responden.

Dalam hal ini peneliti mencatat semua informasi yang didapat dari informan yaitu Bapak Bambang Selaku Kepala Desa Poncokusumo Kabupaten Malang, Bapak Hadi selaku Informan Desa dan juga Ketua Pokdarwisa (Kelompok Sadar Wisata), Pak Gatot selaku KAUR Desa Poncokusumo, Mas Dedi selaku anggota Pokdarwis, Ibu Irma selaku Kebayan Desa Poncokusumo, Ibu Lilik selaku Sekertaris Kepala Desa Poncokusumo, dan juga Pak Sodikin, Pak Joko, Pak Umar selaku Petani di Desa Poncokusumo.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari objek yang diteliti. Dalam menggunakan data sekunder peneliti harus mengadakan evaluasi terhadap sumber, keadaan data sekundernya dan menjamin limitasi-limitasi dari data tersebut. Data sekunder ini dapat berupa dokumen-dokumen struktur organisasi, dokumen kerjasama, dokumen atau formulir pada pengadaan barang/jasa dan dokumen penawaran.

Dalam hal ini peneliti diarahkan langsung oleh Pak Hadi selaku Informan Desa wisata Poncokusumo Kabupaten Malang untuk mengetahui seluruh kegiatan masyarakat Desa wisata Poncokusumo dengan terperinci dan program-program yang sedang dilaksanakan oleh masyarakat Desa wisata Poncokusumo Kabupaten Malang

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Observasi adalah proses pencatatan perilaku subyek (orang), obyek (benda), atau kejadian yang sistemik tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipasi, yakni peneliti tidak melibatkan diri dalam lingkungan yang diamati sehingga mempengaruhi objek amatan tersebut, peneliti hanya sebagai pengumpul data saja, yang akan diamati dalam proses observasi ini akan dilakukan secara fleksibel melihat kondisi objek dan lokasi penelitian pengamatan yang dilakukan oleh peneliti menggunakan semua panca indra yang dimiliki oleh peneliti dan disesuaikan dengan objek penelitian dan berlandaskan teori dan pengetahuan yang dimiliki oleh peneliti. Peneliti akan menggunakan catatan lapangan yang merupakan catatan-catatan yang digunakan untuk mencatat informasi yang diperoleh selama melakukan penelitian di lapangan. Instrumen ini digunakan agar peneliti terhindar dari kesalahan akan apa yang telah diamati.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian. Teknik wawancara yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan dengan mempersiapkan pokok-pokok

permasalahan terlebih dahulu yang kemudian di kembangkan dalam wawancara, kemudian responden akan menjawab secara bebas sesuai dengan permasalahan yang diajukan sehingga proses wawancara dapat terkontrol.

Wawancara dilakukan peneliti kepada beberapa informan/narasumber diantaranya adalah Bapak Bambang Selaku Kepala Desa Poncokusumo Kabupaten Malang, Bapak Hadi selaku Informan Desa dan juga Ketua Pokdarwisa (Kelompok Sadar Wisata), Pak Gatot selaku KAUR Desa Poncokusumo, Mas Dedi selaku anggota Pokdarwis, Ibu Irma selaku Kebayan Desa Poncokusumo, Ibu Lilik selaku Sekertaris Kepala Desa Poncokusumo, dan juga Pak Sodikin, Pak Joko, Pak Umar selaku Petani di Desa Poncokusumo, wawancara tersebut dilakukan secara terstruktur atau pertanyaan dibuat berdasarkan fokus dan teori yang peneliti gunakan, waktu wawancarapun sudah terstruktur.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ini merupakan data atau informasi yang diperlukan dari dokumen pemerintah daerah tentang data yang diperlukan seperti jumlah produk unggulan, luas lahan.

F. Analisa Data

Setelah data dilapangan terkumpul, maka peneliti mengelola data dengan menggunakan teknik yang sesuai untuk mendapatkan pemecahan masalah yang

diteliti sehingga tujuan penelitian dapat tercapai, yaitu mendapatkan gambaran tentang *Local Economic Development*. Jenis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Huberman (1984) dikutip Sugiyono (2013:246), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Miles, Huberman, dan Saldana (2013:12) menjelaskan empat alur kegiatan analisa data sebagaimana berikut:

1. *Data collection* (Pengumpulan data)

Pengumpulan data merupakan proses awal yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mendapatkan data yang valid. Proses ini dilakukan melalui observasi ke lapangan, wawancara dengan berbagai pihak yang terkait dengan permasalahan, serta dokumentasi berupa foto.

2. *Data condensation* (Kondensasi data)

Kondensasi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, penyederhanaan dan transformasi data mentah yang didapat dari lapangan. Kondensasi data berlangsung secara terus-menerus selama penelitian bahkan sebenarnya kondensasi data dapat dilakukan sebelum data terkumpul secara menyeluruh.

Kondensasi data dilakukan dengan cara, data yang diperoleh di lokasi penelitian

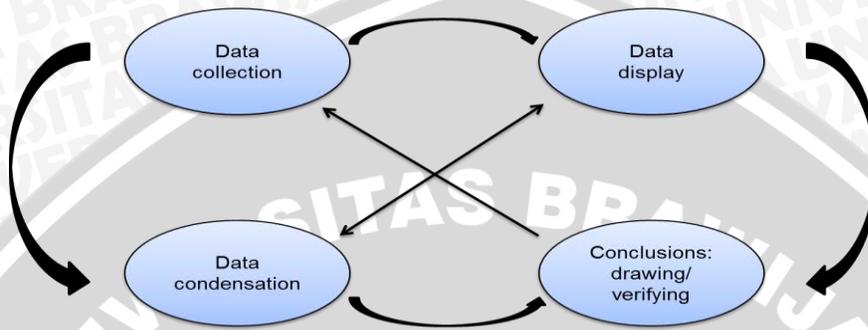
dituangkan dalam uraian atau laporan secara lengkap dan terinci. Selanjutnya laporan tersebut disederhanakan, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya. Hal ini dilakukan secara terus-menerus, baik selama proses penelitian berlangsung maupun pada tahap analisa data selanjutnya, yaitu penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hal ini bertujuan untuk memperkuat data terhadap sebuah konsep yang berbeda dengan reduksi data yang lebih terkesan melemahkan data dengan membuang data yang diperoleh di lapangan.

3. *Data display* (Penyajian data)

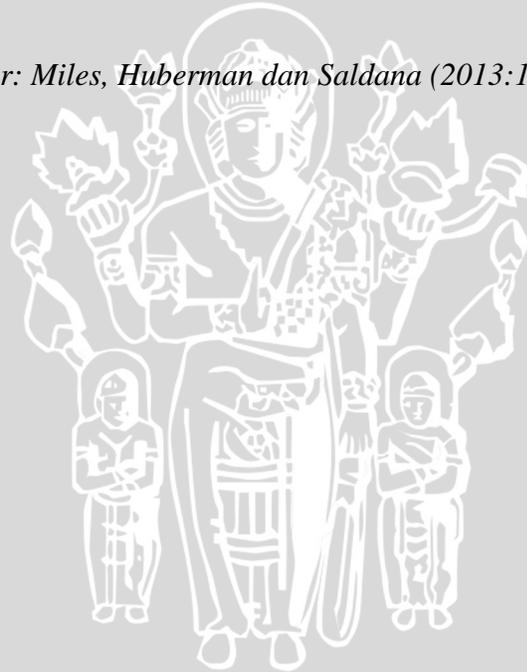
Merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memungkinkan penarikan kesimpulan. Dengan melihat penyajian-penyajian dapat dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan, lebih jauh dalam menganalisis untuk kemudian disusun secara sistematis sehingga data yang diperoleh dapat menjelaskan masalah yang diangkat.

SIKLUS PROSES ANALISIS DATA

Gambar 2 Model Analisa Interaktif



Sumber: Miles, Huberman dan Saldana (2013:14)



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Malang

Seiring dengan adanya kebijakan tentang otonomi daerah, maka pemerintah daerah yang awalnya bersifat sentralistik menjadi desentralistik. Sehingga pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur urusan daerahnya sendiri. Kebijakan tersebut dimulai sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan dilaksanakan serentak diseluruh daerah di Indonesia. Salah satu dari implementasi kebijakan otonomi daerah tersebut adalah Kabupaten Malang yang berhak mengurus daerahnya sendiri secara mandiri.

Kabupaten Malang sendiri merupakan salah satu Kabupaten di Indonesia yang terletak di Propinsi Jawa Timur dan merupakan Kabupaten yang terluas kedua wilayahnya setelah Kabupaten Banyuwangi dari 38 Kabupaten/ Kota yang ada di Jawa Timur. Dilansir dari website resmi Pemerintah Kabupaten Malang hal ini didukung dengan luas wilayahnya 3.534,86 km² atau sama dengan 353.486 ha dan jumlah penduduknya 2.446.218 jiwa (tahun 2010). Kabupaten Malang juga dikenal sebagai daerah yang kaya akan potensi diantaranya dari pertanian, perkebunan, tanaman obat keluarga dan lain sebagainya. Disamping itu juga dikenal dengan obyek-obyek wisatanya.

Pemerintah kabupaten Malang mengharapkan Pada tahun 2015 terwujudnya visi Kabupaten Malang yang mandiri, agamis, demokratis, produktif, maju, aman, tertib, dan berdaya saing atau bisa disebut dengan “MADEP MANTEB”

Adapun penjelasan visi yang dimaksud: Pada visi tersebut terdapat 8 kata kunci yaitu: mandiri, agamis, demokratis, produktif, aman, tertib, dan berdaya saing artinya dalam rangka mencapai tujuan umum pembangunan Kabupaten Malang yaitu Masyarakat sejahtera maka dalam 5 tahun yang akan datang ini diperlukan upaya mewujudkan:

1. Mandiri

Dimaknai dengan

- a. Kemandirian pengelolaan daerah berupa kebijakan Pemerintah Daerah yang mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengelola potensi SDA dan buatan yang didukung oleh kemampuan SDM, energi, infrastruktur dan pelayanan publik.
- b. Kemandirian masyarakat berupa sikap dan kondisi masyarakat yang memiliki semangat entrepreneurship untuk semakin mampu memenuhi kebutuhan dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri.

Inti dari pengertian kemandirian adalah semakin berkembangnya jiwa leadership di kalangan pemerintah dan semangat entrepreneurship di kalangan masyarakat luas.

1. Agamis

Dimaknai dengan kondisi masyarakat yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dan senantiasa

meningkatkan kualitas keamanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia yang diharapkan berdampak terhadap keamanan, ketertiban, dan produktifitas tinggi.

2. Demokratis

Dimaknai dengan penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan partisipasi masyarakat, dengan sikap saling menghargai perbedaan dalam berfikir, bertindak, maupun pengambilan keputusan bersama yang berlandaskan hukum dan keadilan.

3. Produktif

Dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas kinerja masyarakat sebagai pilar utama peningkatkan perekonomian daerah.

4. Maju

Dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas SDM dan hasil-hasil pembangunan yang ditandai dengan semakin meningkatnya indeks pembangunan manusia.

5. Aman

Dimaknai dengan semakin meningkatnya keamanan masyarakat dan terlaksananya penegakan hukum yang berkeadilan tanpa memandang kedudukan, pangkat, jabatan, seseorang, serta terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia.

6. Tertib

Dimaknai dengan semakin meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap berbagai peraturan hukum yang berlaku.

7. Berdaya saing

Dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas produk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi untuk bersaing di pasar lokal maupun nasional serta semakin meningkatnya daya saing daerah dalam rangka menarik minat investor

Hal ini sejalan dengan pesan filosofi pembangunan dalam lambang Kabupaten Malang yaitu : *Satata Gama Karta Raharja* atau terwujudnya Kabupaten Malang yang adil dan makmur materiil dan spirituil disertai kerukunan beragama atas dasar kesucian yang langgeng (abadi). Kesejahteraan yang utuh itu diyakini dapat dicapai dengan mewujudkan kemajuan secara komprehensif dari 8 kunci tersebut di atas.

Adapun misi Pemerintah Kabupaten Malang yang implementasikan dari keinginan menyatukan langkah dari gerak dalam melaksanakan visi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemandirian melalui pemberdayaan masyarakat kalangan *wong cilik* di Kabupaten Malang untuk keperluan pemanfaatan potensi sosial dan ekonomi serta untuk

- mengoptimalkan prakarsa-prakarsa cerdas dalam kehidupan masyarakat.
2. Meningkatkan pembinaan mental spiritual masyarakat di Kabupaten Malang sehingga kualitas kehidupan beragama tidak hanya ditumpukan pada kesalahan pribadi, tetapi juga tercermin pada menguatkan kesalehan ritual sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing yang kemudian diterjemahkan dalam kesalehan sosial.
 3. Meningkatkan pendidikan politik dan hukum kepada masyarakat Kabupaten Malang demi terwujudnya tatanan masyarakat madani yang berkeadaan dengan berlandaskan keadilan dan kebenaran.
 4. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Malang melalui reformasi sistem pelayanan kesehatan berdasarkan semangat populisme dan negara kesejahteraan.
 5. Meningkatkan pendidikan dasar bagi masyarakat Kabupaten Malang untuk keperluan menyongsong era globalisasi yang memprasyaratkan adanya kemampuan berpikir secara sistematis dan logis.
 6. Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan di Kabupaten Malang melalui peningkatan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya kesetaraan gender.

7. Mewujudkan revitalisasi pertanian dan ekonomi kerakyatan di Kibupate Malang sebagai bagian dari upaya peletakan dasar industrialisasi di pedesaan.
8. Mempercepat pembangunan ekonomi dan infrastruktur.
9. Membangun sumber daya manusia yang “Berdaya Saing” tinggi yang dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan, hukum dan sosial budaya.

Pemerintah Kabupaten Malang memiliki program pembangunan guna mewujudkan Kabupaten Malang yang lebih kompleks, berikut adalah program pembangunan Pemerintah Kabuapten Malang.

1. Mewujudkan masyarakat yang agamis dan berbudaya

Suatu kondisi masyarakat yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dan senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa srta berakhlak mulia yang berdampak terhadap keamanan, ketertiban dan produktifitas tinggi.

2. Mewujudkan pemerintahan dan masyarakat yang demokratis

Suatu kondisi penyelenggaraan pemerintahan yang senantiasa melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berlandaskan hukum dan keadilan; sedangkan dari sisi masyarakat terwujudkan suatu kondisi masyarakat yang modern dan majemuk, menjalani kehidupan yang bermasyarakat, berbangsa dab bernegara berdasarkan falsafah Negara

Pancasila, ditandai dengan perilaku bijaksana dan melaksanakan prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat.

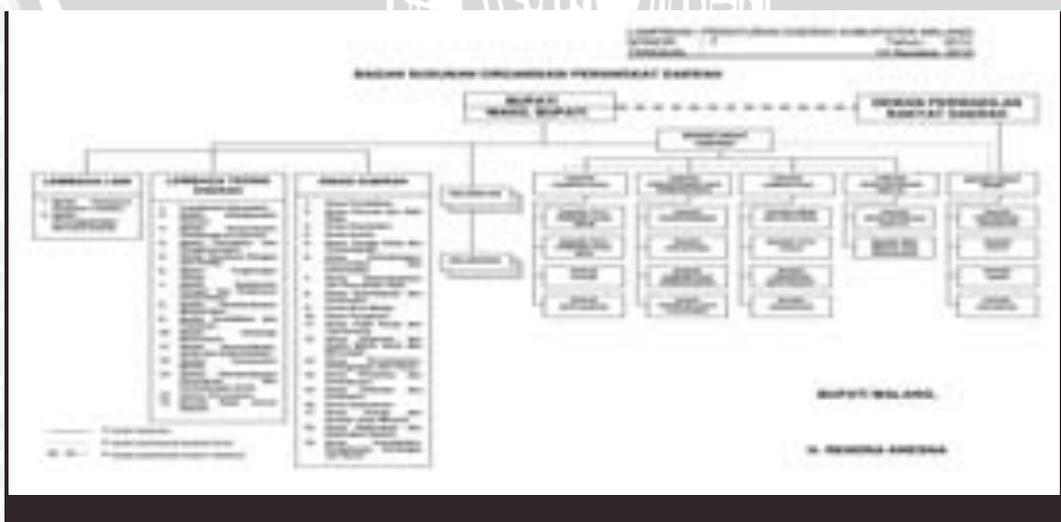
3. Mewujudkan pemerintahan dan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing

Suatu kondisi pemerintahan dan masyarakat yang semakin mampu menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan kemampuan sendiri dan berdaya saing tinggi yang ditandai dengan semakin berkembangnya jiwa leadership dikalangan pemerintahan dan semangat entrepreneurship di kalangan masyarakat luas.

4. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera

Masyarakat yang semakin meningkat kemampuannya dan memenuhi kebutuhan hidup dan adanya jaminan masa depan yang lebih baik.

Gambar 3 Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Malang



(Sumber : Kantor Kecamatan Poncokusumo)

1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang

Sejarah terbentuknya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang, Pada tahun 1989 sampai dengan 1996 waktu itu masih berstatus Cabang Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur di Malang yang berkantor di Jalan Kawi 41 Malang menjadi satu dengan kompleks Gedung APDN Malang, Kepala Cabang Dinas Pariwisata saat itu dipimpin oleh Bapak SUNARDI (almarhum)

Pada tahun 1996 sampai dengan 2004 terjadi perubahan dari Cabang Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur di Malang menjadi Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Malang dengan alamat kantor Jalan Gede No. 6 Malang yang dipimpin oleh Kepala Dinas :

1. SUNARDI pada tahun 1996 sampai dengan 1999
2. Dra. HARSARI pada tahun 1999 sampai dengan 2001
3. Drs. NURYANTO, MM pada tahun 2001 sampai dengan 2004

Pada tahun 2004 sampai 2008 terjadi perubahan lagi sesuai dengan Peraturan Bupati Malang dengan Nomor: 90 Tahun 2004 dari Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Malang menjadi Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Malang dengan alamat kantor Jalan KH. Agus Salim No. 7 Malang yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Malang yaitu Bapak PURNADI, SH. MSi.

Sedangkan pada tahun 2008 sampai 2013 terjadi perubahan lagi sesuai dengan Peraturan Bupati Malang Nomor: 11 Tahun 2008 dari Dinas

Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Malang menjadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang yang berkantor di Jalan Raya Singosari No. 275 Singosari – Malang dan dipimpin oleh Kepala Dinas:

1. Bapak PURNADI, SH. MSi. Pada ada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010
2. Ibu RATNA NURHAYATI, MSi. Pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013.

Setelah Ibu RATNA NURHAYATI, MSi. Menjabat sebagai Kepala Dinas pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 digantikan oleh Bapak Made Arya Wedanthara, SH, M.Si yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

2. Visi Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang

VISI

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata dan salah satu pelaku pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata daerah merumuskan Visi sebagai berikut “TERWUJUDNYA KEPARIWISATAAN KABUPATEN MALANG YANG BERBASIS MASYARAKAT “

MISI

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi tersebut guna memberikan arah dan tujuan ingin dicapai, maka ditetapkan Misi sebagai berikut :

- a. Membangun jati diri dan citra kepariwisataan Kabupaten Malang yang berbasis masyarakat;
- b. Mendorong perkembangan kepariwisataan Kabupaten Malang yang berkualitas dan memiliki daya saing melalui :
 - i. Pengembangan obyek dan daya tarik wisata yang berdasarkan kearifan lokal;
 - ii. Membangun sarana dan prasarana dalam keselarasan dan keharmonisan lingkungan;
 - iii. Mewujudkan kualitas pelayanan yang baik pada masyarakat;
 - iv. Mengoptimalkan sarana informasi dan menyelenggarakan promosi yang lebih berkualitas;
 - v. Meningkatkan peran serta masyarakat

3. Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

Malang

TUJUAN

Berdasarkan Visi Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2011 - 2015 maka diterapkan tujuan sebagai berikut

- a. Meningkatnya dukungan untuk mewujudkan citra kepariwisataan Kabupaten Malang yang berbasis masyarakat
- b. Meningkatkan pemahaman masyarakat atas nilai-nilai budaya daerah
- c. Meningkatnya peran serta masyarakat dan dukungan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan kekayaan budaya dan pengelolaan keragaman budaya

- d. Meningkatkan pengembangan destinasi wisata melalui pengembangan aksesibilitas, produk wisata, kelompok sadar wisata dan pembentukan desa wisata
- e. Meningkatkan jumlah masyarakat Kabupaten Malang yang melek/faham pariwisata melalui promosi dan informasi yang berkualitas
- f. Meningkatkan pembinaan usaha sarana pariwisata dan usaha jasa pariwisata

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

a. TUJUAN

1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan dan pengembangan seni budaya lokal di Kabupaten Malang;
2. Meningkatnya pengembangan kualitas dan kuantitas destinasi wisata;
3. Meningkatnya kualitas dan efektivitas promosi pariwisata daerah.

b. SASARAN

1. Terlaksananya pemberdayaan seniman, kelompok kesenian, budayawan lokal Kabupaten Malang.
2. Meningkatnya pengembangan obyek wisata secara kualitas dan kuantitas;
3. Terlaksananya peningkatan program kunjungan wisatawan di Kabupaten Malang.

4. Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

Malang

Berdasarkan Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2008–2010 maka ditetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatnya dukungan penyelenggaraan kebudayaan dan kepariwisataan.
2. Meningkatnya keselarasan, keserasian dan keseimbangan pembangunan kebudayaan dan kepariwistaan.

B. Gambaran Umum Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang

Kecamatan Poncokusumo merupakan salah satu wilayah diantara 33 Kecamatan yang saat ini terdapat di Kabupaten Malang, yang secara geografis merupakan kawasan dengan kondisi lahan berupa hamparan lahan yang cenderung berbukit-bukit karena berada di sebelah barat lereng gunung semeru yang sebagian besar merupakan lahan produktif berada pada ketinggian antara 600 sampai dengan 1200 meter diatas permukaan laut dengan curah hujan rata-rata antara 2300mm samapai dengan 2500 mm per tahun dan suhu rata-rata 21,7 derajat celcius serta berjarak tempuh ke ibu kota kabupaten kurang lebih sejauh 24 KM.

Gambar 4 Peta Kecamatan Poncokusumo

(Sumber : Balai Desa Wisata Poncokusumo)

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Poncokusumo adalah sebagai berikut :

Tabel 2 Batas wilayah Kecamatan Poncokusumo

1.	Sebelah utara : Kecamatan Tumpang
2.	Sebelah Timur : Kabupaten Lumajang
3.	Sebelah Barat : Kecamatan Tajinan
4.	Sebelah Selatan : Kecamatan Wajak

Sumber : Kantor Balai Desa Poncokusumo

Selain terdiri dari 17 Desa, wilayah Kecamatan Poncokusumo terdiri dari 47 Dusun, 168 RW dan 825 RT, yang dipimpin oleh Bapak Camat Drs. SUKARLIN, Msi Kecamatan Poncokusumo memiliki luas wilayah 20.632 ha. dengan penggunaan lahan sebagai berikut :

Tabel 3 Luas wilayah Kecamatan Poncokusumo

Perumahan dan pekarangan	: 1.810 Ha
Tanah sawah	: 1.736 Ha
Pertanian tanah kering, ladang dan tegala	: 6.803 Ha
Hutan Negara	: 9.376 Ha
Hutan rakyat	: 850 Ha
Lain-lain	: 57 Ha

Sumber : Kantor Balai Desa Poncokusumo

Secara administratif wilayah Kecamatan Poncokusumo terdiri atas 43 dusun dan 17 desa yaitu, : Desa Dawuhan, Karanganyar, Sumberejo, Jambesari, Pandansari, Ngebruk, Ngadireso, Pajaran, Wonorejo, Argosuko, Karangnongko, Wonomulyo, Belung, Wringinanom, Poncokusumo, Gubugklakah dan Desa Ngadas.

Sedangkan jumlah penduduk pada tahun 2010 sebanyak 99.389 jiwa terdiri dari 49.900 jiwa laki-laki, 49.480 jiwa perempuan dan 27.420 KK, dengan mata pencaharian sebagian besar adalah petani sebagaimana tergambar dalam prosentase mata pencaharian penduduk sebagai berikut :

Tabel 4 Mata pencaharian Kecamatan Poncokusumo

Petani	70 %
Pedagang	12 %
Jasa	15 %
PNS/ ABRI	3 %

Sumber : Kantor Balai Desa Poncokusumo

1. Kondisi Geografis

Tabel 5 Batas-batas wilayah

Sebelah Utara	Kecamatan Tumpang
Sebelah Timur	Kabupaten Probolinggo
Sebelah Selatan	Kec. Wajak dan Kab. Lumajang
Sebelah Barat	Kecamatan Tajinan
Luas wilayah	20.632 ha
Ketinggian	600-2300 meter dpl
Curah hujan	rata-rata 2000s/d3000 m3/dt

Sumber : Kantor Balai Desa Poncokusumo

Tabel 6 penggunaan lahan Kecamatan Poncokusumo

Perumahan dan pekarangan	1.810 ha
Tanah sawah	1.736 ha
Pertanian tanah kering, lading, tegalan	6.803 ha
Hutan negara	9.376 ha
Hutan rakyat	850 ha
Lain-lain	57 ha

Sumber : Kantor Balai Desa Poncokusumo

2. Demografi

Secara administratif Kecamatan Poncokusumo terbagi atas 17 desa yaitu Desa Dawuhan, Sumberejo, Ngadireso, Pandansari, Poncokusumo, Wonorejo, Wonomulyo, Ngebruk, Argosuko, Pajaran, Wringinanom, Belung, Gubugklakah, Ngadas, Karanganyar, Karangnongko dan Jambesari. Yang terbagi dalam : 804 RT, 169 RW, 43 dusun.

1. Sarana dan Prasarana

Tabel 7 Sarana dan Prasaran fasilitas kesehatan Kecamatan Poncokusumo

Puskesmas Pembantu	: 4 Unit
Posyandu	: 90 Unit

Polindes	: 14 Unit
Poliklinik swasta	: 2 Unit
Praktek dokter swasta	: 1
Dokter	: 2 orang
Bidan	: 32 orang
Farmasi	: 1 orang
Ahli Gizi	: 1 orang
Sanitarian	: 1 orang
Dokter gigi	: 1 orang
Mobil keliling	: 2 Unit

Sumber : Kantor Balai Desa Poncokusumo

Kecamatan Poncokusumo memiliki fasilitas kesehatan yang cukup memadai guna memberikan pelayanan terhadap masyarakat Kecamatan Poncokusumo, semua fasilitas yang ada sudah ada yang di gunakan beberapa masyarakat seperti Mobil keliling untuk memberikan pelayanan langsung terhadap masyarakat Kecamatan Poncokusumo.

2. Potensi usaha Industri Desa Poncokusumo

Tabel 8 Potensi Usaha Industri

POTENSI USAHA INDUSTRI DESA

No.	Jenis Usaha	Lokasi
1	Usaha Sate	Desa Poncokusumo
2	Usaha Keripik Jamur	Desa Poncokusumo
3	Usaha Marning Jagung	Desa Poncokusumo
4	Usaha Tusuk Sate	Desa Poncokusumo
5	Usaha Keranjang Buah	Desa Poncokusumo
6	Usaha Lain-lain	Desa Poncokusumo

(Sumber : Balai Desa Wisata Poncokusumo.)

Beberapa usaha industri juga dimiliki oleh masyarakat Kecamatan Poncokusumo seperti keranjang buah, tusuk sate, marning jagung, keripik jamur, dan yang lainnya, hal ini cukup memberikan dampak positif terhadap masyarakat Kecamatan Poncokusumo terkait ekonomi masyarakat, dan juga bisa meningkatkan kreatifitas masyarakat.

Tabel 9 Potensi Wisata

POTENSI WISATA

No.	Jenis Wisata	Lokasi
1	Pemukaman Lebak Orbo (Dak bond)	Desa Poncokusumo
2	Air terjun Coban Pelangi	Desa Gebogitakah
3	Arang lesem (jalbing)	Desa Gebogitakah
4	Air terjun Coban Trisula	Desa Hgardan
5	Wisata Religius Pertapaan Karmel	Desa Hgardeso
6	Wisata Budaya Temopor	Desa Hgardan
7	Pemandian Sumber Agung	Desa Argosuko

(Sumber : Balai Desa Wisata Poncokusumo)

Kecamatan Poncokusumo sendiri memiliki banyak potensi wisata di antaranya ada perkemahan ledok ombo, air terjun, arung jeram, wisata budaya tengkurap dan yang lainnya, yang bisa dioptimalkan oleh masyarakat Poncokusumo untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar yang memberikan dampak positif di dalamnya.

C. Gambaran Umum Desa wisata Poncokusumo Kabupaten Malang

Desa Poncokusumo adalah Desa Wisata di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Luas Kecamatan Poncokusumo adalah 20.632 hektar. Sebagian besar penduduk Poncokusumo bekerja sebagai petani. Kecamatan Poncokusumo mempunyai 17 desa dan jumlah penduduknya sebanyak 93.153 jiwa (Laki-laki 49.401 jiwa, Perempuan 49.752 jiwa). Kecamatan ini berada di ketinggian 1200-1400 Mdpl dan terletak di kaki Gunung Semeru. Desa Poncokusumo merupakan desa yang kaya akan produksi hortikultura, seperti bawang, tomat, kentang, kol dan tentu saja apel serta buah-buah lainnya. Terdapat kurang lebih 7 desa yang membudidayakan apel sebagai komoditas utama perkebunan mereka.

Gambar 5 Peta Desa Poncokusumo



(Sumber : Balai Desa Poncokusumo)

Wilayah Desa Poncokusumo terletak di Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur. Ditinjau dari Geografisnya, Desa poncokusumo berbatasan dengan :

Tabel 10 Batas Desa Poncokusumo

Sebelah Utara	: Desa Wringin Anom, Kecamatan Poncokusumo.
Sebelah Timur	:Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (Hutan Negara).
Sebelah Selatan	:Desa Pandansari, Kecamatan Poncokusumo.
Sebelah Barat	:Desa Wonorejo dan Desa Ngadireso

Sumber : Balai Desa Poncokusumo

Desa Poncokusumo mempunyai luas wilayah kurang lebih sekitar : 685,776 Ha. Keadaan tanah, luas penggunaan tanah dan penggunaan air. Keadaan tanah di desa Poncokusumo sangat subur, hal ini terbukti dengan banyaknya budidaya tanaman yang bisa di tanam di desa poncokusumo. Adapun pembagian untuk penggunaannya sebagai berikut :

Tabel 11 Pembagian wilayah Desa Poncokusumo

Sawah	:-
Perumahan / Pekarangan	: 67,884 Ha

Tegalan	: 605,668 Ha
Bondo Desa	: 1,200 Ha
Lapangan Olah Raga	: 0,300 Ha
Kuburan / Makam	: 1,924 Ha
Jalan	: 8,800 Ha

Sumber : Kantor Balai Desa Poncokusumo

Disamping itu ditinjau dari keadaan tanahnya, desa poncokusumo merupakan daerah berbukit-bukit atau pegunungan dan terletak ± 926 meter diatas permukaan air laut, mempunyai tingkat kemiringan tanah 30° - 45° dan suhu 22-26 derajat Celcius. Desa Poncokusumo terletak di lereng barat gunung Semeru atau berada di perbatasan selatan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kondisi air di desa poncokusumo termasuk melimpah hal ini dapat dibuktikan dengan sudah adanya swadaya dari masyarakat desa untuk mengalirkan air dari sumber mata air di lereng semeru ke rumah-rumah warga yang ada di desa tersebut. (Situs resmi Desa Poncokusumo).

Seiring dengan berjalannya waktu Desa wisata Poncokusumo memiliki perkembangan yang cukup pesat, salah satu faktor pendukung dari pesatnya perkembangan wisata di Desa Poncokusumo adalah agrowisatanya berbasis edukasi sebagai tujuan utama wisata di Desa wisata Poncokusumo kepada wistawan yang datang. Desa wisata Poncokusumo memberikan berbagai fasilitas wisata bagi para wisatawan yang datang seperti penginapan dari para petani kebun

guna mencapai pembangunan berkelanjutan. Seperti dalam teori yang diterangkan. Hal tersebut telah diadopsi di Indonesia seperti yang disebutkan dalam Piagam Pariwisata Berkelanjutan (1995) bahwa pembangunan pariwisata berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat didukung secara ekologis sekaligus layak secara ekonomi, juga adil secara etika, dan berkeadilan sosial terhadap masyarakat. Artinya, pembangunan berkelanjutan adalah upaya terpadu dan terorganisasi untuk mengembangkan kualitas hidup dengan cara mengatur penyediaan, pengembangan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya secara berkelanjutan. Hal tersebut hanya dapat terlaksana dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang melibatkan partisipasi aktif dan seimbang antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

D. Penyajian Data Fokus Penelitian

- 1. Implementasi Kebijakan pengembangan pariwisata Daerah di Desa wisata Poncokusumo Berbasis *Sustainable Development*.**
 - a. Komunikasi antara Pemerintah dan Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan pariwisata daerah di Desa Wisata Poncokusumo**

Setiap kebijakan tentunya tidak terlepas dari komunikasi antar semua anggota di dalam struktur organisasi tersebut. Komunikasi menjadi sangat penting, karena di dalam suatu implementasi kebijakan atau program komunikasi serta sosialisasi juga sangat dibutuhkan untuk mengkoordinasikan program kegiatan tersebut menjadi suatu keberhasilan baik secara waktu, tujuan maupun anggaran.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, untuk menilai bagaimana koordinasi antara aktor pelaksana, maka peneliti melihat dari perspektif peran masing-masing aktor tersebut sebagai berikut:

1. DISBUPAR Kabupaten Malang merupakan SKPD perencana kebijakan pembangunan dalam hal ini adalah pelaksana pengembangan pariwisata wilayah Kabupaten Malang yang di dalamnya termasuk pengembangan kawasan Agrowisata.
2. SKPD Pelaksana lainnya yang berkaitan dengan pengembangan kawasan Agrowisata merupakan SKPD yang berperan secara teknis dalam pelaksanaan pengembangan kawasan Agrowisata.
3. Lembaga Kemasyarakatan merupakan kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dari program-program SKPD. Dengan kelompok-kelompok masyarakat tersebut program-program SKPD dapat tersalurkan kepada masyarakat sesuai kebutuhannya.

Dalam kebijakan pengembangan kawasan agrowisata di Desa wisata Poncokusumo Kabupaten Malang ini, cara pemerintah berkomunikasi dengan masyarakat ini dengan dilakukannya sosialisasi serta pembinaan. Bentuk sosialisasi dari pemerintah dalam rangka mengkomunikasikan kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pembinaan ke wilayah yang sudah dikoordinasikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang, artinya di desa terdapat satu tim penyuluh.

2. Membentuk tim POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata), artinya dalam setiap RT/RW dalam satu desa dibentuk tim POKDARWIS yaitu yang beranggotakan Ketua pokdarwis, Bendahara dan Sekretaris. Tugas dari tim pokdarwis adalah sebagai berikut :
 - a. Mensosialisasikan kepada petani tentang hasil Pelatihan yang diberikan dari Pemerintah.
 - b. Mensosialisasikan program agrowisata
 - c. Menyalurkan dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah, misalnya setiap ada bantuan dana APBN tim Pokdarwis yang menyalurkan kepada petani dengan dibentuknya Ketua, Bendahara dan Sekretaris yang dibentuk melalui musyawarah agar ada kepercayaan satu sama lain. Lalu dana bantuan tersebut sebesar akan dikembangkan dan digulirkan setiap tahunnya dan harus berkembang, dan tetap didampingi oleh Balai Desa.

Hal ini dijelaskan oleh Pak Hadi selaku Ketua Pokdariwis Desa wisata Poncokusumo :

“tugas kita ya mengkoordinasikan serta bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kegiatan pokdarwis dengan mensosialisasikan kepada petani tentang hasil pelatihan yang diberikan oleh pemerintah, serta menyalurkan dana bantuan dari pemerintah. Agar memudahkan petani kalau ada yang membeli pupuk atau benih biar tidak usah jauh-jauh dan harganya terjangkau” (Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Februari 2016 pukul 09:00 wib di Balai Desa wisata Poncokusumo Kabupaten Malang.)

Berdasarkan berbagai bentuk sosialisasi tersebut diatas, Balai Desa Poncokusumo merumuskan koordinasi, yaitu dengan Kerjasama, Komunikasi, Konsultasi, dan Kebersamaan. Hal tersebut juga disampaikan oleh Pak Gatot KAUR Umun di Balai Desa Poncokusumo Kabupaten Malang sebagai berikut :

“kita selalu koordininasi dengan masyarakat, yaitu dengan kerjasama, komunikasi, konsultasi, kebersamaan ini harus dijaga mas. Karena kalau kita hanya memasukkan inovasi kita semua pasti bisa nanam. Tetapi kalau penyuluhnya tidak Klik dengan masyarakat itu yang sulit, jadi kita harus benar-benar ikut masuk ke masyarakat dan mau mendengarkan keluhan maupun kemauan masyarakat, nanti kita diskusikan bersama, kita saling belajar bersama, menanamkan sifat musyawarah biar enak” (wawancara dilakukan pada tanggal 10 April 2016 pukul 14:11 wib di Kantor Balai Desa Poncokusumo)

Hal tersebut juga disampaikan oleh bapak Sodikin selaku salah satu petani di Desa wisata Poncokusumo sebagai berikut:

“biasanya kita ada musyawarah di balai desa mas, ya cerita tentang kesulitan untuk masalah perkebunan dan wisata, petugas-petugas penyuluh nya juga ramah-ramah dan mau mendengarkan keluhan dari para petani. Jadi, kita kayak diskusi gitu mas biasanya saling bertukar pikiran juga” (Wawancara dilakukan pada tanggal 16 februari 2016 pukul 11.10 wib di Desa Poncokusumo Kabupaten Malang)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa bentuk komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah sudah diterapkan dengan baik, dan mau terjun ke lapangan secara langsung serta mendengarkan segala keluhan dari para petani dan dicarikan solusi bersama. Sementara itu masyarakat juga ikut dilibatkan dalam program ini hal tersebut bertujuan untuk terwujudnya komunikasi yang baik antara pemerintah dengan para organisasi maupun

masyarakat dengan tetap menjaga kesejahteraan masyarakat serta saling mendukung satu sama lain dan melestarikan sumberdaya yang ada untuk menjamin eksistensi generasi berikutnya.

Masyarakat yang dilibatkan dalam program ini antara lain Kepala Desa, perwakilan dari RT/RW, dan paling tidak ada Ketua, Bendahara dan Sekretaris dari POKDARWIS yang setiap bulan harus dikumpulkan untuk diadakan penyuluhan secara rutin setiap satu bulan sekali di setiap desanya. Dan ada sistem kerja penyuluh, jadi masyarakat diberikan kesempatan untuk saling bertukar pikiran dan melaporkan mengenai perkembangan tanamannya, lalu oleh tim penyuluh dilaporkan ke koordinator, ke dinas, lalu ke pusat. Seperti yang diungkapkan oleh Mas Dedi Selaku Anggota Pokdarwis Desa wisata Poncokusumo Kabupaten Malang sebagai berikut:

“setiap bulan selalu saya adakan rapat koordinasi, jadi untuk mengetahui laporan-laporan mengenai perkembangannya, apakah naik atau malah turun, lha itu juga salah satu bahan acuan untuk kita membuat revisi kedepannya agar sesuai dengan yang kita cita-citakan” (wawancara dilakukan pada tanggal 23 Februari 2016 pukul 9.52 wib di Kantor Balai Desa Poncokusumo Kabupaten Malang.)

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Ketua Pokdarwis Pak Hadi di Desa Poncokusumo Kabupaten Malang sebagai berikut :

“kita selalu mengadakan rapat hasil dengan mengkoordinasikan pelaporan dan pertanggungjawaban dana. Hal tersebut sebagai bahan evaluasi dari kami dan akan dilaporkan ke pusat, yakni dengan melihat apakah sudah sesuai atau belum dari target kita” (Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Februari 2016 pukul 09:05 wib di Desa Poncokusumo Kabupaten Malang)

Dari berbagai penjelasan diatas mengenai komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dapat dilihat bahwa komunikasi sudah dilakukan dengan baik dan maksimal, baik dari pemerintah maupun masyarakat bisa saling membantu dan bekerja sama. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menjaga kelestarian lingkungan dan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi daerah. Selain itu Desa Poncokusumo merupakan salah satu penghasil Apel terbaik di Kabupaten Malang.

b. Alokasi Sumber Daya untuk Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan pariwisata daerah di Desa Wisata Poncokusumo.

Dalam melaksanakan suatu kegiatan atau program tentu kesuksesan akan ditunjang dari sumber daya, karena sumber daya adalah sebagai alat teknis maupun nonteknis di dalam melaksanakan kegiatan sehingga kegiatan akan berjalan sesuai arah, rencana, waktu dan biaya. Karena sumber daya adalah pedoman untuk kelancaran dan berjalannya suatu kegiatan. Adapun sumber daya memiliki beberapa dimensi antara lain, sumber daya manusia dan sumber daya anggaran. Karena sumber daya tersebut memiliki pengaruh yang kuat terhadap berhasil maupun gagal nya suatu program kegiatan. Karena setiap elemen memiliki fungsi masing-masing yang saling berpengaruh untuk menunjang dari pada kelancaran suatu kegiatan.

Adapun alokasi sumber daya dalam kegiatan pengembangan kawasan Agropolitan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai berikut :

- 1) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan modal di dalam suatu kegiatan atau program yang fungsinya adalah menggerakkan jalannya rencana yang telah ditetapkan, dalam hal ini sumber daya manusia yang berperan di dalam menjalankan, merencanakan dan mensukseskan pengembangan kawasan Agrowisata adalah Seluruh Petani di Desa wisata Poncokusumo dan *Hinterland* nya.

Namun pada kenyataannya masyarakat di Desa Poncokusumo khususnya para petani sudah mandiri, namun karena masyarakat disana cenderung masih kekurangan dana untuk membeli pupuk dan kebutuhan kebun lainnya. Hal ini dikarenakan para petani disana masih membutuhkan subsidi pupuk maupun pembinaan dan penyuluhan dari pemerintah. Petani hanya menerapkan pola tanam seadanya saja. Namun setelah dilakukan pembinaan serta sosialisasi kepada masyarakat secara berkala mereka mulai berkembang dan selalu melakukan inovasi. Misalnya dulu para petani menjual hasil panen apelnya hanya ke tengkulak di pasar yang berada di Kecamatan Poncokusumo hanya dengan harga yang sangat rendah , hal ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan para petani disana tentang harga pasar apel.

Namun setelah dilakukan pembinaan serta sosialisasi mereka menjadi lebih selektif dalam menjual hasil panen mereka, sehingga pendapatan mereka menjadi meningkat. Tetapi meskipun seperti itu petani di Desa Poncokusumo juga belum siap dan antusias dengan dijadikannya desa kawasan agrowisata. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh

Mas Dedi selaku anggota Pokdarwis di Desa wisata Poncokusumo, sebagai berikut:

“Untuk masalah itu masyarakat disini ya masyarakatnya yang kurang antusias mas, kitanya udah berusaha koordinasi dengan baik, tapi ya memang belum terlalu merasakan dampak baiknya dari Agrowisata ini” (Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Februari 2016 pukul 10.15 wib di Desa Wisata Poncokusumo, Kabupaten Malang)

Pendapat lainnya juga dikemukakan oleh Irma selaku Kebayan Desa Poncokusumo, sebagai berikut:

“Ya kalo program pemberdayaanya sudah baik sih mas, tetapi petani disini selalu minta petunjuk dan minta bimbingan dari Balai Desa disini, supaya hasil panen mereka bisa meningkat dan tidak mengalami gagal panen. Biasanya mereka diberitahu mana pupuk yang bagus mana yang jelek gitu mas, tapi untuk antusiasnya masih kurang dari masyarakatnya” (Wawancara dilakukan pada tanggal 23 April 2015 pukul 13:22 wib di Kantor Kecamatan Ngimbang)

Menurut Bu Lilik selaku Sekertaris di Desa Poncokusumo di Kabupaten Malang, sebagai berikut:

“Kalo itu kita biasanya membimbing lagi misal ada yang mengeluh kepada kita, “bu pupuknya *mboten manjur?*” lha kita beri penyuluhan kalo pupuk organik itu bukan untuk menghijaukan tp untuk struktur tanahnya agar tetap bagus, jadi kalo ada masalah kita sebagai penyuluh ya harus bisa menjelaskan dengan baik kepada para petani agar bisa diterima dengan baik pula tapi ya petani juga kurang antusias gitu mas, mungkin memang belum ramai di datangi wisatawan” (Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Februari 2016 pukul 14.30 wib di Kantor Balai desa Poncokusumo)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Pemerintah dan Petani di Desa Poncokusumo masih belum siap dengan

adanya program pengembangan kawasan Agrowisata. Tetapi masih membutuhkan pembinaan dan sosialisasi dari Pemerintah setempat.

Pengembangan sumberdaya manusia juga diarahkan untuk menyatukan persepsi antara aparat pemerintah dan masyarakat tentang arah pengembangan agrobisnis yang akan dicapai dalam kawasan Agrowisata. Strategi ini akan memberikan pemahaman yang terarah bagi *stakeholder* mengenai berbagai konsep sistem dan usaha agrobisnis yang dapat dikembangkan di dalam kawasan serta memasukkan isu kelestarian lingkungan sebagai salah satu landasan pengembangan Agrowisata. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan nantinya berupa pelatihan dan pembimbingan.

Secara rinci strategi dari Pemerintah Daerah untuk pengembangan sumberdaya manusia adalah dengan sasaran-sasaran sebagai berikut:

- a. Pelatihan tentang konsep pengembangan sistem dan usaha agribisnis
- b. Pelatihan tentang beberapa keterampilan teknis yang berkaitan dengan usaha agrobisnis kebun yang dikombinasikan dengan budidaya
- c. Pelatihan tentang teknik-teknik bercocok tanam dengan menerapkan konsep konservasi tanah dan air

2) Sumber Daya Anggaran

Anggaran juga merupakan elemen penting lainnya selain sumber daya manusia, karena tanpa anggaran bisa jadi kegiatan akan mejadi vakum.

Karena anggaran memiliki fungsi sebagai operasional kegiatan, dalam arti untuk menghidupi suatu kegiatan. Program dan kegiatan tersebut didukung oleh beberapa sumber dana yaitu Dana APBD dan ADD.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa program dan kegiatan pengembangan kawasan agrowisata di Desa wisata Poncokusumo Kabupaten Malang menggunakan dana dari APBD. Hal ini disampaikan oleh Bu Lilik selaku Sekertaris Kepala Desa Poncokusumo di Balai Desa Poncokusumo, sebagai berikut:

“Kalau alokasi sumber dananya dari APBD. Kalau APBD itu dari Kabupaten dan itu didukung dari pembinaan-pembinaan dari Disbudpar, Balai Desa, Pokdarwis, terus selain itu dari Kabupaten dan tahun 2011 kalo tidak salah kita mendapat bantuan pembuatan jalan desa dari APBD. Ya itu memang selalu kita koordinasi lintas dengan bidang teknis nya untuk pengembangan kawasan agrowisata dari Disbudpar, Balai Desa terus Pokdarwis juga” (Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Februari 2016 pada pukul 10.05 wib di Balai Desa Poncokusumo Kabupaten Malang)

Hal tersebut juga disampaikan oleh Pak Hadi selaku ketua Pokdarwis di Desa Poncokusumo Kabupaten Malang, sebagai berikut:

“Kalau APBD dana dari Kabupaten, kalau ADD dari desa sendiri biasanya mas, nah itu dana untuk pupuk dan kebutuhan kebun lainnya agar mendapatkan kualitas apel yang baik” (Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Februari 2016 pukul 09:05 wib di Desa Poncokusumo Kabupaten Malang)

Hal tersebut juga disampaikan oleh Pak Bambang selaku Kepala Desa di Desa Poncokusumo Kabupaten Malang, sebagai berikut:

“Untuk APBD dana dari Kabupaten, kalau APBN dari pusat biasanya itu, dan dulu kita dapat APBD untuk dana perbaikan jalan, nah kalo APBN itu biasanya buat pupuk di kebun itu mas” (Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Februari 2016 pukul 11:00 wib di Desa Poncokusumo Kabupaten Malang)

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa alokasi sumber dana untuk pengembangan kawasan agrowisata berasal dari APBD dan APBN.

c. Disposisi dalam Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan pariwisata daerah di Desa Wisata Poncokusumo.

Dalam melaksanakan suatu kegiatan atau program tentu kesuksesan akan ditunjang oleh kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh, sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Disposisi ini akan muncul diantara pelaku kebijakan, manakala akan menguntungkan tidak hanya organisasinya, tetapi juga dirinya. Disposisi merupakan kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana (*implementators*) untuk melaksanakan kebijakan.

Adapun disposisi atau kesiapan dari para pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengembangan kawasan Agrowisata di Desa wisata Poncokusumo Kabupaten Malang masih belum dikatakan siap dan berhasil. Hal ini dapat dilihat dalam program-program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam menunjang pengembangan kawasan Agrowisata di Desa wisata Poncokusumo. Adapun program-program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana pengelolaan agrowisata
2. Pelatihan pendamping wisatawan

3. Program peningkatan pendapatan petani kecil
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana
5. Pelatihan sektor Jasa dan UKM

Hal tersebut diatas merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam mempersiapkan pengembangan kawasan berbasis agrobisnis di Desa Poncokusumo Kabupaten Malang. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Lilik selaku Sekertaris Kepala Desa di Desa Poncokusumo, sebagai berikut:

“kalau pemerintah daerah nya ya sudah sangat siap dengan program ini, kita selalu memberikan petunjuk agar hasil panen mereka bisa meningkatkan dan ketertarikan untuk konsep agrowisata khususnya petik apel itu sendiri” (Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Februari 2016 pukul 14.30 wib di Kantor Balai Desa Poncokusumo Kabupaten Malang)

Pendapat lainnya juga dikemukakan oleh Bapak Sodikin selaku Petani di Desa Poncokusumo sebagai berikut:

“menurut saya, peran pemerintah dalam program ini sudah sangat baik mas, tetapi sosialisasinya yang harus lebih ditingkatkan lagi secara merata ke RT/RW yang lain, sehingga semua masyarakat di Desa Poncokusumo ini paham tentang adanya program dari pemerintah ini” (Wawancara dilakukan pada tanggal 24 Februari 2016 pada pukul 11.31 Wib di Desa Poncokusumo Kabupaten Malang)

Tanggapan lainnya juga dijelaskan oleh Pak Hadi selaku Informan Desa wisata Poncokusumo sebagai berikut :

“untuk hal ini sebenarnya pemerintah sudah sangat siap dengan program ini, tetapi masyarakat desanya yang masih kurang merasakan dampak baiknya, jadi ya kurang antusias” (Wawancara

dilakukan pada tanggal 11 Februari 2016 pukul 14.30 wib di Kantor Balai Desa Poncokusumo Kabupaten Malang)

Dari penjelasan diatas mengenai disposisi (sikap) dari pemerintah daerah terhadap program pengembangan kawasan Agrowisata di Desa wisata Poncokusumo Kabupaten Malang ini sudah cukup baik, namun sosialisasi juga masih perlu ditingkatkan lagi, sehingga pemahaman masyarakat terhadap program ini bisa merata.

d. Struktur Birokrasi dalam Kebijakan Pengembangan pariwisata daerah di Desa Wisata Poncokusumo.

Keberhasilan implementasi kebijakan yang kompleks, perlu adanya kerjasama yang baik dari banyak orang. Oleh karena itu struktur birokrasi sangat diperlukan untuk menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan kebijakan. Program pengembangan pariwisata daerah merupakan pembangunan daerah yang bersifat lintas sektoral, koordinator program pengembangan pariwisata daerah di Desa wisata Poncokusumo adalah Balai Desa yang bertugas untuk mengkoordinasi dan mengevaluasi pelaksanaan program yang dijalankan oleh badan/ instansi terkait.

Berdasarkan Hasil wawancara yang dilakukan pada Desa Poncokusumo dapat diketahui dari Pengembangan Kawasan Agrowisata mempunyai beberapa SKPD dan lintas sektor. Hal tersebut pasti membutuhkan kerjasama dan integrasi yang baik antar SKPD untuk mengimplementasikan kebijakan pengembangan kawasan Agrowisata di Desa wisata Poncokusumo Kabupaten

Malang. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Ibu Lilik selaku Sekretaris Kepala Desa di Desa Poncokusumo sebagai berikut:

“ada tim khusus yang menangani masalah Agrowisata ini yaitu Pokdarwis sebagai koodinatornya, sedangkan dinas terkaitnya Disbudpar, Kecamatan Poncokusumo, dan Balai Desa ini” (Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Februari 2016 pada pukul 10.05 Wib di Kantor Balai Desa Poncokusumo Kabupaten Malang)

Hal tersebut juga disampaikan oleh Ibu Irma selaku Kebayan di Kantor Balai Desa Poncokusumo sebagai berikut:

“kalau tim khusus memang ada yaitu pokdarwis dan beberapa instansi yang terlibat dalam program ini. Kalau dalam hal koordinasi terus kita laksanakan, terus kita evaluasi. Kenapa koordinasi tidak berjalan secara mulus? Karena memang kalau ada program baru kita adakan rapat dan di koorninasikan, kalau tidak ada program ya tidak ada. Sehingga kalau cuma bergantung pada adanya program saya rasa koordinasi tim belum optimal” (Wawancara dilakukan pada tanggal 22 Februari 2016 pukul 11.01 Wib di Kantor Balai Desa Wisata Poncokusumo)

Tanggapan lain juga disampaikan oleh Pak Hadi Informan Desa wisata Pomcokusumo sebagai berikut :

“untuk dalam mengkoordinasikan dalam program agrowisata ini kita membentuk tim Pokdarwis dan kebetulan saya ketuanya, pokdarwis ini mengkoordinasikan dan mengevaluasi terkait program agrowisata ini” (Wawancara dilakukan pada tanggal 22 Februari 2016 pukul 13.00 Wib di Kantor Balai Desa Wisata Poncokusumo)

Dari hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan struktur birokrasi dari pengembangan kawasan Agrowisata melibatkan beberapa SKPD dan lintas sektor. Struktur birokrasi yang panjang juga mengakibatkan sulitnya koordinasi antar SKPD dalam implementasi kebijakan pengembangan kawasan Agrowisata di Desa wisata Poncokusumo Kabupaten Malang.

2. Faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dari pengembangan pariwisata di Desa wisata Poncokusumo

Dalam pelaksanaan program pengembangan pariwisata daerah mengembangkan pembangunan berkelanjutan di Desa wisata Poncokusumo, sejak pogram ini digulirkan pada tahun 2001 dan mulai di implementasikan pada tahun 2001 dengan pelaksanaan yang masih sampai sekarang dan tahun ini adalah tahun terakhir program tersebut diimplementasikan, tentu ada hambatan maupun dukungan dari pelaksanaan ini.

a. Faktor penghambat.

Penghambat pelaksanaan implementasi kebijakan pengembangan pariwisata daerah adalah salah satu indikator yang dijadikan pemacu upaya perbaikan dan untuk sebagai bahan revisi untuk rencana aksi selanjutnya. Berikut adalah beberapa faktor penghambat Implementasi Kebijakan pengembangan pariwisata daerah berbasis *sustainable development* di Desa wisata Poncokusumo:

1. Sumber Daya Manusia

Dalam konteks ini sumber daya manusia juga dapat menjadi faktor penghambat atau dalam pelaksanaan program ini. Hambatan datang dari tingkat antusiasme petani yang berbeda di dalam meningkatkan kualitas hasil panen, hal ini dikarenakan masih rendahnya pengetahuan dari para petani di Desa wisata Poncokusumo serta minimnya pola pikir petani

yang menjual hasil panennya kepada penjual-penjual di sekitar Desa Poncokusumo. Hal ini yang membuat para wisatawan yang datang bisa tidak mendapat buah atau sayur ketika sedang berkunjung. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Hadi selaku informan Desa Poncokusumo:

“sosialisasi yang belum merata mungkin, sehingga masih banyak petani yang hanya mendapatkan informasi melalui kabar petani yang lain saja bahkan kalo seperti ya memang agak susah mas kan kita penduduk desa, pokoknya kalau sudah panen ya biasanya sebagian dijual ke pasar sebagian untuk dimakan sehari-hari” (Wawancara dilakukan pada tanggal 24 februari 2016 pukul 11.09 wib di Desa Poncokusumo Kabupaten Malang)”

Hal serupa di ungkapkan oleh Pak Sodikin selaku petani Desa Wisata Poncokusumo sebagai berikut :

“untuk kesulitannya kita sebagian besar memang belum terlalu merasakan dampak positif dari agrowisata ini, karena ya memang mungkin masyarakat desa belum begitu mengereti dan tidak terlalu antusias” (Wawancara dilakukan pada tanggal 25 februari 2016 pukul 10.00 wib di Desa Poncokusumo Kabupaten Malang)”

Hal yang cukup menyulitkan para petani disampaikan oleh bapak Umar selaku petani di Desa wisata Poncokusumo sebagai berikut:

“Kalau kesulitan ya itu kitanya sendiri mas ga terlalu antusias, karena memang kurang mendapat dampak positifnya jadinya, kita kadang jual hasil panen ke pasar” (Wawancara dilakukan pada tanggal 23 februari 2016 pukul 10:05 wib di Desa Wisata Poncokusumo)

Dari wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa masih banyaknya petani yang kurang akan kesadaran pengetahuan, dalam hal pemasaran sehingga perlu ditingkatkan lagi pembinaan serta sosialisasi dari Balai Desa agar terciptanya pembangunan ekonomi masyarakat yang adil dan

merata, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun ada pula beberapa petani yang hanya menjual hasil panen kepada wisatawan.

2. Pemerintah Daerah

Hambatan ini datang dari para Aktor-aktor pelaksana yang bertanggung jawab dalam program Pengembangan Kawasan Agrowisata, yakni Balai Desa Poncokusumo sebagai leading sector dalam program ini sebagai pihak teknis yang berwenang dalam melaksanakan sosialisasi, pelatihan dan pengawasan/monitoring terhadap program tersebut. Serta dalam hal pendanaan masih menjadi salah satu pengambat juga. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Joko selaku Petani di Desa Poncokusumo, sebagai berikut:

“mungkin kurang sosialisai mas jadinya ya warga sini kurang begitu mengerti untuk agrowisatanya ini sendiri” (Wawancara dilakukan pada tanggal 24 februari 2016 pukul 11.09 wib di Desa Poncokusumo)

Hal tersebut juga disampaikan oleh Pak Hadi selaku Informan di Balai Desa Poncokusumo, sebagai berikut:

“kurangnya finansal pendanaan merupakan salah satu penghambat dari kita mas, serta masih belum maksimalnya sosialisasi operasional dari peralatannya juga, dan kita masih dalam proses menuju kesana” (Wawancara dilakukan pada tanggal 1 Maret 2016 pukul 11.10 wib di Kantor Balai Desa Poncokusumo)

Hal serupa juga ungkapkan oleh Bu Lilik selaku Sekertaris Kepala Desa Wisata Poncokusumo sebagai berikut :

“kekurangan finansial mungkin mas, dan juga antusias dari warganya memang kurang, tapi untuk sosialisasinya kita sudah

optimalkan, namun memang sepertinya harus lebih untuk warga desa agar mencapai desa wisata yang kita cita-citakan” (Wawancara dilakukan pada tanggal 1 Februari 2016 pukul 11.10 wib di Kantor Balai Desa Poncokusumo)

Jadi aspek dukungan serta sosialisasi dari pemerintah juga sangat berpengaruh terhadap program ini, sehingga perlu ditingkatkan lagi bentuk pembinaan serta penyuluhan kepada para petani disana untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Desa wisata Poncokusumo.

3. Sarana dan Prasarana

Sama halnya dengan sumber daya manusia, faktor sarana dan prasarana juga dapat menjadi faktor pendukung serta faktor penghambat. Di dalam hal ini faktor penghambat dari jalan menuju desa Poncokusumo yang masih sedikit harus diperbaiki. Sedangkan faktor penghambat dari Cuaca atau iklim disana adalah tidak menentunya kondisi cuaca yang cenderung jika seharusnya sudah mulai masuk musim kemarau 1 (satu) namun ternyata masih ada hujan, hal ini mengakibatkan menurunnya jumlah produksi hasil panen karena mengalami hasil panen yang tidak maksimal.

Dalam hal ini contohnya pada buah-buahan dan tanaman, akan cenderung mengalami kebusukan misal pada buah apel, jeruk, pisang, dan sayur. Sehingga hal ini menurunkan produktivitas hasil perkebunan. Namun jika sudah memasuki Musim kemarau 2 (dua) kondisi disana akan cenderung mengalami kekurangan air, namun dalam hal ini masih

cukup untuk memenuhi kebutuhan air disana namun terbatas, sehingga memerlukan pompa air dan irigasi. Seperti yang di ungkapkan oleh Ibu Lilik selaku Sekretaris Kepala Desa di Balai Desa Poncokusumo, sebagai berikut:

“ya ada kendalanya, kalau musim kemarau 2 (dua) disini mengandalkan adanya tadah hujan, kalau tadah hujan itu lewat pompa air, sedangkan irigasi itu harus ada pengairannya sendiri lewat sumur resapan. Kalau disini namanya JITUT mas yaitu Jaringan Irigasi Tersier Usaha Tani, jadi itu kalo kendala saat musim kemarau” (Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Februari 2016 pada pukul 15.00 wib di Balai Desa Poncokusumo)

Hal tersebut juga disampaikan oleh bapak Sodikin selaku Petani di Desa Wisata Poncokusumo, sebagai berikut:

“ya pasti ada mas kendalanya, misalnya sekarang ini kan harusnya musim kemarau ke 1 tp ternyata masih ada hujan, kalo untuk tanaman yang utara, tanaman pangan bagus , tapi kalo untuk wilayah selatan sayurnya ya agak sedikit terganggu. Berpengaruh juga terhadap tanaman buah-buahan karena pertumbuhannya agak terhambat” (Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Februari 2016 pada pukul 10.15 wib di Desa wisata Poncokusumo)

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Pak Hadi selaku Informan Desa Wisata di Balai Desa wisata Poncokusumo sebagai berikut :

“ya pasti ada mas kendalanya, misalnya jika wisatawan datang saat bukan musim apel, padahal mereka datang ke sini untuk memetik apel, nah hal inilah kendala yang biasa kita alami” (Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Februari 2016 pada pukul 10.15 wib di Kantor Balai Desa wisata Poncokusumo)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa faktor cuaca dan musim juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman sehingga menjadi terhambat. Dan jika pada musim kemarau ke dua jika kondisi lahan disana kekurangan air maka petani mengandalkan dengan

memakai jaringan irigasi dan sumur resapan, sehingga kebutuhan air dapat terpenuhi.

b. Faktor pendukung.

Disamping adanya faktor penghambat, terdapat pula faktor pendukung yang memaksimalkan program tersebut. Berikut adalah beberapa faktor penghambat Implementasi Kebijakan pengembangan pariwisata daerah Desa wisata Poncokusumo:

a. Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan kawasan agrowisata untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat, banyak sumber daya yang mendukung kelancaran program tersebut, baik itu dari Petani, Masyarakat, serta Balai Desa yang sangat antusiasme yang tinggi menjadi point positif di dalam pelaksanaan program ini. Disamping masih banyaknya petani yang menjual hasil panennya kepada pasar dengan harga yang lebih rendah, masih banyak pula petani yang sabar menunggu datangnya wisatawan. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Sodikin selaku Petani di Desa wisata Poncokusumo, sebagai berikut:

“kalau dalam hal ini saya kebetulan para petani di sini selalu berkebutan setiap harinya, jadi stok apel kita pasti ada. (Wawancara dilakukan pada tanggal 24 Februari 2016 pada pukul 11.40 wib di Desa wisata Poncokusumo)

Hal tersebut juga disampaikan oleh Pak Umar selaku Petani di Desa Poncokusumo, sebagai berikut :

“kalau saya hasil panen pasti saya jual ke wisatawan yang datang atau saya jual di warung saya sendiri sekalian nunggu wisatawan kalo belum ramai jadi ya saya juga selalu berkebun untuk tetap menyetok apelnya masi” (Wawancara dilakukan pada tanggal 26 Februari 2016 pada pukul 09.30 wib di Desa wisata Poncokusumo)

Hal ini juga disampaikan oleh Pak Hadi selaku Informan Balai Desa wisata Poncokusumo, sebagai berikut:

“selama ini para petani selalu berkebun, termasuk saya juga ikut berkebun dan ikut membantu jadi ya masyarakat di sini emang semangat berkebun mas dan wisatawan yang datang selalu meningkat tiap tahunnya, jadi kalau ada wisatawan ya kita bagi ga selalu satu rumah aja di jadikan home stay” (Wawancara dilakukan pada tanggal 1 April 2015 pada pukul 11.30 wib di Kantor Balai Desa Poncokusumo)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dilihat bahwa masih banyak petani yang mau untuk menjual dan menunggu wisatawan sehingga perekonomian mereka meningkat dan didukung oleh sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang mampu mengolahnya dengan baik. Serta adanya peningkatan wisatawan setiap bulannya.

b. Pemerintah Daerah

Dukungan dari pemerintah daerah baik itu dari Dinas yang terkait, maupun aktor-aktor yang terlibat di dalam mensukseskan program ini juga merupakan sebagai faktor pendukung dalam program tersebut yaitu dengan melalui dukungan dana, pengawasan, serta sosialisasi yang dilakukan secara berkala. Peran pemerintah sejauh ini dalam program

tersebut sudah dikatakan cukup maksimal baik dalam bentuk pendanaan, pemberian fasilitas pertanian serta sosialisasi atau pembinaan. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan wisatawan yang datang. Menurut Bapak Sodikin selaku petani, sebagai berikut:

“selama ini subsidi dari pemerintah baik, pupuk lancar, traktor ada, airnya lancar dari pompa air sama sumur, jalan ke perkebunan juga ada sumbangan mas buat jalan ke kebunnya, benih juga pernah ada sumbangan waktu itu” (Wawancara dilakukan pada tanggal 24 Februari 2016 pada pukul 11.28 wib di Desa wisata Poncokusumo)

Dapat dilihat bahwa dukungan dari pemerintah sekitar untuk petani sudah sangat siap baik dari pendanaan, fasilitas serta sosialisasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembinaan tentang hasil panen buah-buahan di Desa wisata Poncokusumo, jika dulunya masih bingung menjual hasil panenanya kepada siapa.

Pemerintah Daerah akhirnya melakukan inovasi yaitu dengan adanya kemitraan dengan melakukan promosi agar membuat Desa Poncokusumo dikenal sebagai Desa berbasis Agrowisata. Hal ini disampaikan oleh Ibu Lilik selaku Sekertaris Kepala Desa di Desa Poncokusumo, sebagai berikut:

“untuk meningkatkan daya tarik dari wisatawan sendiri kita melakukan beberapa promosi melalui situs internet, dengan bekerjasama dengan kantor kecamatan agar bisa lebih dikenal luas Desa Poncokusumo ini”(Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Februari 2016 pada pukul 15.10 wib di Kantor Balai Desa Poncokusumo)

Hal ini juga diungkapkan oleh Pak Hadi selaku Informan Desa Wisata Poncokusumo di Desa Poncokusumo Kabupaten Malang, sebagai berikut:

“di sini kita sedang melakukan cukup besar promosi, dari teman-teman yang punya facebook juga saya suruh promosi agar Desa Poncokusumo ini bisa lebih dikenal, dan juga cukup terbukti dengan sedikit adanya peningkatan wisatawan yang datang” (Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Februari 2016 pada pukul 10.05 wib di Desa Poncokusumo Kabupaten Malang)

Selain itu dukungan juga diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan bentuk pembuatan tempat wisata yang berwawasan lingkungan di Desa Poncokusumo serta. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk mengembangkan wilayah selatan sebagai Kota cepat tumbuh, artinya untuk mensejahterakan ekonomi masyarakatnya dengan menggunakan komoditas unggulan yang ada di Wilayah Selatan khususnya Kecamatan Ngimbang. Serta dengan mengurangi angka pengangguran sehingga perekonomian masyarakatnya merata.

c. Sarana dan Prasarana

Lokasi dalam konteks ini berkaitan dengan adanya dukungan sarana dan prasarana di Desa wisata Poncokusumo yang baik untuk pengembangan kawasan agrowisata, yaitu dengan semakin lengkapnya fasilitas dan Pra sarana di Kawasan tersebut. Adapun kegiatan utama yang diarahkan untuk dikembangkan di wilayah Desa wisata Poncokusumo adalah :

- a. Pengembangan pelayanan umum
- b. Pengembangan pertanian secara luas
- c. Penguatan kelembagaan masyarakat
- d. Pengembangan kegiatan industri (kerajinan rakyat). Serta

- e. Pembangunan jalan poros desa dan Perbaikan jalan Utama di Desa wisata Poncokusumo

Dengan dilengkapi berbagai macam fasilitas yang sudah dikembangkan di Desa wisata Poncokusumo seperti Fasilitas Pelayanan diantaranya terminal angkutan umum, fasilitas perdagangan dan jasa, serta fasilitas penginapan dirumah warga sekitar, kesemuanya itu semakin menguatkan peran wilayah Desa wisata Poncokusumo sebagai desa yang berperan sebagai kawasan Agrowisata.

E. Pembahasan

1. Implementasi Kebijakan Pengembangan pariwisata daerah Berbasis *Sustainable Development* (Studi pada Desa Wisata Poncokusumo)

a. Komunikasi antara Pemerintah dan Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan pariwisata daerah di Desa Wisata Poncokusumo.

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik yang sangat krusial. Bersifat krusial karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan. Untuk mencapai bentuk Implementasi yang baik ialah dengan cara komunikasi bersama antara dinas terkait dan masyarakat desa, sesuai dengan hasil wawancara ialah dengan cara yang dilakukan oleh Balai desa Poncokusumo ialah dengan bermusyawarah bersama untuk bertukar pikiran

terkait Agrowisata. Demikian pula dengan komunikasi, jika suatu kebijakan tidak dikomunikasikan dengan baik maka tujuan kebijakan juga tidak akan bisa diwujudkan. Dengan demikian, kalau menghendaki tujuan kebijakan dapat dicapai dengan baik, maka bukan saja pada tahap implementasi yang dipersiapkan dan direncanakan dengan baik, tetapi faktor komunikasi juga ada pada tahap implementasi kebijakan. Dalam posisi ini, aspek komunikasi senantiasa senantiasa dalam koordinasi suatu organisasi.

Setiap kebijakan tentunya tidak terlepas dari komunikasi antar semua anggota di dalam struktur organisasi tersebut. Dalam hal ini dicatat bahwa keberhasilan implementasi kebijakan paling tidak memerlukan sepuluh prasyarat. Permintaan pertama, adalah adanya jaminan bahwa kondisi implementasi eksternal tidak akan memberikan dampak kepada badan tersebut. Permintaan kedua, adalah bahwa ada cukup sumber daya untuk implementasi. Ketiga, sumber daya yang terintegrasi benar-benar ada. Keempat, adalah menyangkut pertanyaan apakah kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan didasarkan pada alasan kualitas yang kuat, kelima, seberapa banyak alasan terjadinya kualitas. Keenam, adalah seberapa lemah antar hubungan di variabel. Ketujuh, adalah tentang kedalaman pemahaman terhadap tujuan-tujuan kebijakan. Kedelapan, adalah mempertanyakan apakah pekerjaan telah diperinci dan ditempatkan dalam susunan yang benar. Kesembilan, diperlukan komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Dan kesepuluh, badan pengimplementasi dapat meminta kepatuhan total.

Sesuai dengan teori diatas, tentunya di dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan kawasan agrowisata ini juga terdapat komunikasi serta sosialisasi dari para pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan tersebut dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan dan semua variabel yang terkait ikut serta dalam pengimplementasikan kebijakan.

Dalam implementasi kebijakan pengembangan kawasan agrowisata ini komunikasi dimulai dari peraturan Gubernur Jawa Timur yang disampaikan oleh Bupati Kabupaten Malang dan disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab yakni Balai Desa Wisata Poncokusumo selaku leading sector dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam komunikasi kebijakan, juga dikenal adanya dimensi-dimensi, yakni dimensi transformasi (transmission), dimensi kejelasan (clarity), dan dimensi konsistensi (consistency). Dimensi transformasi menghendaki agar kebijakan publik tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (implementators) kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan. Kemudian dimensi kejelasan (clarity) menghendaki agar kebijakan ditransmisikan kepada para pelaksana, target grup, dan pihak lain yang berkepentingan sehingga diantara mereka mengetahui maksud, tujuan dan sasaran serta substansi dari kebijakan tersebut. Jika tidak jelas, mereka tidak tahu apa yang seharusnya dipersiapkan dan dilaksanakan agar tujuan tersebut dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Dalam dimensi kejelasan (clarity) kebijakan pengembangan kawasan agrowisata di Kabupaten Malang khususnya Desa wisata Poncokusumo ini sebelum di dimplementasikan, sudah disepakati oleh semua warga petani dan instansi-instansi yang terkait dengan dikuatkan oleh adanya peraturan yang jelas oleh Bupati Kabupaten Malang.

Kemudian untuk komunikasi dari pelaksanaan kebijakan pengembangan kawasan agrowisata di Desa wisata Poncokusumo ini, cara pemerintah berkomunikasi dengan masyarakat ini dengan dilakukannya sosialisasi serta pembinaan atau penyuluhan. Yang kemudian membentuk koordinasi melalui struktur organisasi untuk melaksanakan program ini kepada masyarakat khususnya para petani, sebagai bagian untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan serta pengawasan jalannya program tersebut kepada masyarakat. Komunikasi menjadi sangat penting untuk secara detail merencanakan, melaksanakan serta mengawasi jalannya program tersebut agar lebih mudah dikendalikan dengan baik. Dengan hal lain secara maksud, tujuan dan sasaran serta substansi program ini telah dapat diimplementasikan dengan baik dan diterima oleh masyarakat dengan antusiasme yang tinggi.

Terkait dengan konsistensi dalam pengembangan kawasan agrowisata di Desa wisata Poncokusumo telah dilaksanakan selama 10 Tahun ini yaitu yang mulai diimplementasikan pada Tahun 2006-2016. Secara konsisten kebijakan tersebut untuk mengembangkan produk-produk unggulan perkebunan serta disisi lain difungsikan untuk meningkatkan nilai tambah khususnya pada ekonomi masyarakat petani, serta perekonomian desa Poncokusumo.

Terakhir, aspek ekonomi pariwisata merupakan ukuran terpenting yang mencerminkan keberlanjutan pengelolaan. Ukuran tersebut dalam wujud nilai tambah maupun manfaat ekonomi lain merupakan energi bagi keberlanjutan aktivitas stakeholder dalam setiap interaksi dan aliran dalam sistem ekonomi pariwisata. Distribusi manfaat mengalir tidak hanya kepada pemerintah, sektor swasta dan penunjangnya, maupun pengunjung, tetapi juga untuk pemberdayaan sosial dan ekonomi penduduk lokal dan konservasi lingkungan. Salah satu stakeholder tidak berfungsi, mengakibatkan kelumpuhan aktivitas ekonomi lainnya dan senantiasa menghasilkan kerugian yang signifikan di pihak penduduk lokal.

Dari paparan diatas secara dimensi transformasi, dimensi kejelasan, dan dimensi konstitensi pelaksanaan kebijakan pengembangan kawasan agrowisata telah jelas terpapar bahwa program ini adalah bentuk transformasi dari pengembangan kawasan agrowisata di Kabupaten Malang yang kemudian di Desa wisata Poncokusumo lebih ditafsirkan dengan pengembangan-pengembangan produk unggulan yaitu melalui pembinaan maupun sosialisasi dari pemerintah. Hal ini bertujuan agar tujuan dan manfaat serta kejelasan masyarakat di Desa wisata Poncokusumo lebih memahami serta ikut serta karena manfaatnya adalah untuk jangka pendek dan jangka panjang keberlanjutan masa depan baik generasireka maupun generasi yang akan datang. Serta dari segi konsistensi program ini telah dilaksanakan dalam tujuh periode, dengan tetap mempertahankan fungsi secara ekonomi. Ini tidak lain

dimaksudkan untuk pengembangan produk unggulan serta kesejahteraan masyarakat.

b. Alokasi Sumber Daya untuk Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan pariwisata daerah di Desa Wisata Poncokusumo.

Sumber daya adalah salah satu bagian terpenting di dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Berhasil atau gagalnya suatu kegiatan sangat di tentukan oleh faktor sumber daya tersebut, sumber daya memiliki beberapa dimensi antara lain, sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya peralatan. Kesemua sumber daya tersebut memiliki pengaruh yang kuat terhadap berhasil maupun gagalnya suatu program kegiatan. Karena setiap elemen memiliki fungsi masing-masing yang saling berpengaruh untuk menunjang dari pada kelancara suatu kegiatan. Kebijakan pengembangan kawasan Agrowisata di Desa wisata Poncokusumo ini juga demikian, artinya memiliki elemen berupa sumber daya (manusia, anggaran dan peralatan) sebagai motor penggerak di dalam berjalannya suatu program sesuai dengan apa yang diharapkan. Efektivitas dalam suatu implementasi atau kebijakn, tergantung pada sumber dayanya itu sendiri, dan menurut thasil wawancara, peran sumber daya memiliki peran yang sangat besar guna mencapai implementasi yang diinginkan.

Pentingnya aspek sumber daya ini seperti yang dikemukakan oleh Edward III bahwa faktor sumber daya ini juga mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Lebih lanjut Edward III juga menegaskan bahwa

bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Jadi dapat disimpulkan bahwa sumber daya baik sumber daya manusia, anggaran maupun peralatan diperlukan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kegiatan maupun program. Begitu juga terkait dengan kebijakan pengembangan kawasan agrowisata di Desa wisata Poncokusumo tersebut, temuan di lapangan bahwasannya telah menguatkan bahwa aspek sumber daya utamanya manusia, peralatan serta anggaran sangat mempengaruhi dari kelancaran kegiatan ini. Selanjutnya terkait dengan aspek sumber daya, kita akan membahas lebih dalam dari sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya peralatan.

Sumber daya adalah menyangkut ketersediaannya khusus kompetensi sumber daya manusia dan kapabilitas untuk melakukan kebijakan secara efektif, dana sumber daya anggaran dimana hal yang penting dalam sebuah kegiatan ataupun berjalannya suatu kebijakan, dua hal yang penting dari sumber daya itu ialah :

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan.

Dimana dalam sebuah persoalan implementasi diperlukan sumber daya sebagai aktor penting di dalamnya. Jika demikian, eektivitas pelaksanaan kebijakan sangat tergantung kepada sumber daya manusia (aparatur) yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan.

Jadi, berdasarkan penjelasan diatas sesuai dengan apa yang kemudian ada di lapangan terkait dengan kebijakan pengembangan kawasan di Desa wisata Poncokusumo, bahwa ada sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Mulai dari keterlibatan para petani serta aparatur desa. Selain keterlibatan semua petani tersebut dalam kegiatan ini juga telah dibentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), untuk mengefektifkan kegiatan yang di jalankan. Pembentukan Pokdarwis ini berdasarkan kesepakatan bersama dari seluruh warga desa dan bertanggung jawab langsung kepada penanggung jawab yakni Balai Desa Wisata Poncokusumo.

a. Sumber Daya Anggaran

Sumber daya yang mempengaruhi eektivitas pelaksanaan kebijakan, selain sumber daya manusia adalah dana (anggaran) dan peralatan yang diperlukan untuk membiayai operasionalisasi pelaksana kebijakan. Tahap implementasi terjadi hanya setelah undang–undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut. (Winarno, 2002; 101-102).

Sumber daya anggaran didalam suatu program atau kegiatan sangatlah penting karena, apabila kurang dalam hal sumberdaya anggaran kondisi tersebut akan menyebabkan para pelaku kebijakan tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal dan mereka tidak mendapat intensif sesuai dengan yang diharapkan sehingga menyebabkan gagalnya pelaksanaan program. Sebagaimana Keberhasilan dan kegagalan negara-negara berkembang semakin tergantung pada bagaimana keberhasilan negara-negara tersebut dalam mengembangkan kebijakan-kebijakan publik yang unggul dan sumber anggaran guna mencapai bentuk implementasi yang baik.

Berdasarkan teori diatas bahwasannya sumber daya anggaran sangatlah diperlukan agar kebijakan, program, maupun kegiatan itu dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Tentu sebagai bagian dari suatu kebijakan pengembangan kawasan agrowisata, kegiatan ini mempunyai anggaran untuk membiayai jalannya program kegiatan, untuk membiayai kualitas produk unggulan, pembangunan sarana dan prasarana, semua ini tentu tidak bisa lepas dari yang namanya anggaran atau biaya. Program dan kegiatan tersebut didukung oleh beberapa sumber dana yaitu Dana APBD dan APBN. Pasal 5 Peraturan Bupati Malang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 Tentang pengelolaan keuangan APBD

Pada setiap tahunnya peningkatan atau penurunan realisasi anggaran pasti terjadi, dan hal tersebut merupakan menjadi sebuah kewajaran

karena realisasi anggaran tersebut berdasarkan peningkatan jumlah SKPD pada setiap tahunnya. Namun realisasi anggaran tersebut dinilai oleh peneliti sudah sesuai dengan realisasi kegiatan karena perkembangan kegiatan sejalan dengan perkembangan realisasi anggaran dari tahun 2011 hingga 2013.

c. Disposisi dalam Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan pariwisata daerah di Desa Wisata Poncokusumo.

Program pengembangan kawasan Agrowisata merupakan program lintas sektor yang melibatkan beberapa sektor terkait dan jumlah pelaksana yang tidak sedikit, sehingga diperlukan kesiapan serta keterpaduan dalam implementasi program di lapangan. Pelaksanaan program tidak hanya terbatas pada instansi terkait, tetapi juga masyarakat banyak, terutama petani yang tinggal di sekitar kawasan Agrowisata. Sikap, dukungan dan kesediaan dari pemerintah daerah dan masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung yang ikut berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi program pengembangan kawasan Agrowisata di Desa wisata Poncokusumo menurut hasil wawancara dimana bentuk perilaku dari pemerintah akan memberikan arahan terhadap para peran dalam mengimplementasikan kebijakan dengan baik

Sikap dan persepsi pelaksana juga turut mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi program-program pengembangan kawasan Agrowisata. Hal ini terkait dengan integrasi peran dan tugas masing-masing.

Mengingat persepsi dari setiap pelaksana berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Sikap merupakan unsure penting dalam implementasi kebijakan dimana sikap menunjukkan kesediaan ataupun ketidaksiediaan pelaksana dalam menyukseskan kebijakan, maka akan timbul komitmen kuat untuk menjlankan kebijakan, sehingga besar kemungkinan kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik. Terbatasnya insentif tersebut tidak akan mampu mengubah sikap dan perilaku (disposisi) para pelaku kebijakan memiliki disposisi (sikap dan perilaku) tinggi dalam melaksanakan kebijakan dipelukan insentif yang cukup.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa sebagian besar instansi yang terkait dengan program pengembangan kawasan Agrowisata ini bersikap positif dan mendukung terhadap adanya program ini. Demikian juga petani yang tinggal di desa Wisata Poncokusumo sebagai kelompok sasaran program, bersikap mendukung terhadap pelaksanaan program ini. Banyak harapan dari pemerintah daerah dan masyarakat agar pelaksanaan pengembangan kawasan Agrowisata di Desa wisata Poncokusumo dapat berjalan lebih baik lagi. Sikap, dukungan dan kesediaan dari pemerintah daerah dan masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung yang ikut berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi program pengembangan kawasan Agrowisata di Desa wisata Poncokusumo.

d. Struktur Birokrasi dalam Kebijakan Pengembangan pariwisata daerah di Desa Wisata Poncokusumo.

Struktur birokrasi yang panjang dapat menyebabkan implementasi kebijakan berjalan tidak efektif, karena kurangnya koordinasi dan kerjasama antar badan/ lembaga pemerintah. Pembentukan tim khusus guna memberikan koordinasi dengan masyarakat dengan baik seperti pada hasil wawancara dimana mengorganisasikan untuk memimpin dan melakukan pengendalian Hal ini serupa bahwa struktur birokrasi dalam kebijakan publik adapun proses pembuatan kebijakan merupakan proses yang kompleks karena melibatkan proses maupun variabel yang harus di kaji. Pendekatan yang dikemukakan adalah melalui kekuasaan eksekutif dan diputuskan dengan cara otoriter.

Berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggaraan implementasi kebijakan publik. Ketika suatu kebijakan sudah dibuat maka tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan, dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut.

Berdasarkan teori diatas dapat diketahui bahwa pemantauan (monitoring) dan evaluasi program pengembangan kawasan Agrowisata dilaksanakan oleh Balai desa secara berkala, yaitu satu kali setiap tahun. Namun jika ditinjau dari segi waktu pelaksanaan monitoring, maka frekwensi tersebut sangat kurang. Karena pada dasarnya monitoring sebuah program dilaksanakan secara terus menerus dengan kerja sama dalam organisasi.

2. Faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dari pengembangan pariwisata di Desa wisata Poncokusumo

Dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan berkelanjutan kawasan agrowisata yang dilaksanakan di Desa wisata Poncokusumo, tentunya dari awal kegiatan sampai akhir pelaksanaan kegiatan tersebut, banyak faktor yang menyebabkan dan mempengaruhi baik itu faktor pendukung maupun penghambat pada kegiatan tersebut. Faktor penghambat dari Sumber daya Manusia ialah kurangnya antusias dari masyarakat desa itu sendiri dan lebih di optimalisasikan penyuluhan kepada masyarakat desa seperti pada hasil wawancara sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan

Dalam upaya untuk mewujudkan pengembangan wisata berbasis edukasi ini menjadi salah satu cara yang dilakukan oleh Desa wisata Poncokusumo. Dan dari konsep pembangunan berkelanjutan dimana ada 4 aspek penting dari faktor penghambat itu sendiri, yaitu :

1. Aspek Ekonomi

Di dalam aspek ekonomi terdapat terdapat 3 hal yaitu:

I. Ekonomi Mikro

Konsep ekonomi mikro dapat diberlakukan di dalam menelaah kegiatan wisata khususnya pariwisata. Hal itu meliputi kajian produk,

kemasan, kualitas dan kuantitas, pelaku dan harga. Keputusan individu masuk dalam industri pariwisata dipengaruhi oleh pilihan-pilihan tersebut. Umumnya produk wisata memiliki karakteristik yang sama dengan barang konsumsi.(Nugroho, 2015 : 54).

Terkait teori di atas terhadap desa wisata Poncokusumo dimana buah apel adalah produk unggulan dari program agrowisata, oleh karena itu apel sendiri bisa menjadi keunggulan sendiri dalam agrowisata tersebut, seperti petik apel, atau membuat sari apel itu sendiri agar bisa di jual kepada konsumen ataupun terhadap wisatawan yang datang.

II. Ekonomi Makro

Kajian makro ekonomi jasa pariwisata umumnya atau ekonomi wisata membahas tentang pembagian ekonomi, pendapatan dan tenaga kerja, maupun ketertarikan ekonomi. Sektor pariwisata tidak berjalan sendirian dalam perekonomian suatu wilayah. Ia membutuhkan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, listrik dan air bersih, selain dukungan dari sektor perdagangan maupun pakaian, makanan dan minuman, baik dari dalam maupun luar negeri. Peran sektor pariwisata dapat dilihat dari ukuran tenaga kerja, pendapatan, PDRB maupun output total.

Terkait teori diatas dijelaskan terhadap sektor wisata dan tenaga kerja atau SDM inilah memiliki fungsi yang sangat penting bagi pembangunan ataupun pengembangan pariwisata itu sendiri selain itu

fasilitas juga sangat berperan penting seperti infrastruktur transportasi, telekomunikasi, listrik dan air bersih, selain itu juga harus adanya ketersediaan makanan untuk para wisatawan ataupun tamu yang datang di desa wisata Poncokusumo.

III. Nilai Ekonomi Lingkungan

Manfaat ekonomi wilayah pariwisata tidak hanya diukur melalui pendekatan pasar. Karenanya upaya memberdayakan penduduk lokal pada dasarnya adalah dengan menghitung peran dan budaya mereka dalam peran konservasi terhadap lingkungannya. Fisik lingkungan dan budaya, yang sehari-hari dihadapi, akan memberikan dampak langsung bagi keberlangsungan hidupnya.

2. Aspek sosial

Aspek sosial menyajikan peran penting dalam mendukung kinerja sektor pariwisata. Aspek sosial bukan hanya menidentifikasi stakeholder tetapi juga mengorganisasikannya sehingga menghasilkan manfaat (dan intensif ekonomi) yang optimal bagi masing-masing stakeholder. Stakeholder dalam sektor pariwisata meliputi siapapun yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sektor pariwisata. Mereka adalah penduduk lokal, pemerintah, kelompok masyarakat nirlaba (LSM atau yang sejenis), sektor swasta, wisatawan, dan pihak lain yang tidak secara langsung terkait dengan pariwisata.

3. Aspek lingkungan

Kualitas lingkungan dalam arti luas, meliputi sumber daya alam dan buatan, memiliki hubungan yang kompleks dengan aktivitas pariwisata. Hubungan tersebut melibatkan beragam aktivitas yang dapat menghasilkan dampak-dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah lahirnya manfaat berupa perlindungan dan konservasi lingkungan, lahirnya kesadaran tentang nilai-nilai lingkungan dan implikasi upaya-upaya komprehensifnya tentang pembiayaan investasi dan pengelolaannya. Sedangkan dampak negatifnya adalah aktifitas-aktifitas selama pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, bandara, dan sebagainya. Dampak-dampak tersebut bisa bersifat langsung atau tidak dapat terprediksi saat sekarang.

Dalam pelaksanaan ada beberapa hal yang mempengaruhi baik itu secara positif maupun negatif, baik dari dalam maupun dari luar program tersebut. Secara negatif ada beberapa hal yang mendukung keberhasilan dari kegiatan ini, diantaranya adalah:

a. Faktor Penghambat

Selain potensi Desa wisata Poncokusumo yang sangat kompleks, masih ada beberapa yang menjadi tantangan untuk pekerjaan Balai desa, diantaranya adalah fenomena kondisi pertumbuhan ekonomi sebelum di jadikan kawasan agrowisata di desa wisata Poncokusumo sifatnya masih kurang baik. Adapun berbagai dukungan yang ada

sehingga kegiatan pengembangan kawasan agrowisata dapat berjalan dengan baik di Desa wisata Poncokusumo, namun di dalam pelaksanaan kegiatan ini juga terdapat beberapa hambatan antara lain:

1) Sumber Daya manusia

Dalam konteks ini sumber daya manusia juga dapat menjadi faktor penghambat atau suatu hambatan dalam pelaksanaan program ini. Hambatan datang dari tingkat antusiasme petani yang berbeda di dalam meningkatkan kualitas hasil panen, hal ini dikarenakan masih rendahnya pengetahuan dari para petani serta minimnya pola pikir petani yang masih bingung menjual hasil panennya kepada siapa dan kurangnya antusias dari masyarakat sendiri.

Artinya bahwa sumber daya manusia juga dapat menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan kebijakan pengembangan kawasan agrowisata di Desa wisata Poncokusumo. Seperti fakta yang menunjukkan bahwa tingkat antusiasme para petani yang berbeda-beda dalam kegiatan tersebut. Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Edward bahwa sumber daya (resources) manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan.

Faktor yang menjadi hambatan dari pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan agrowisata dapat dilihat terlihat pada masalah-masalah peningkatan kualitas produk unggulan, serta masyarakat

terlihat kurang antusias dan serempak dalam melaksanakan kegiatan tersebut dan hanya sebagian saja yang berperan secara antusias dan aktif.

2) Pemerintah Daerah

Dari fakta dilapangan hambatan ini datang dari para Aktor-aktor pelaksana yang bertanggung jawab dalam program Pengembangan Kawasan Agrowisata, yakni Balai Desa sebagai leading sector dalam program tersebut sebagai pihak teknis yang berwenang dalam melaksanakan sosialisasi, pelatihan dan pengawasan/monitoring terhadap program tersebut. Serta dalam hal pendanaan masih menjadi salah satu pengambat juga.

Hal ini sesuai dengan teori Edward III dalam Nugroho bahwa implementasi kebijakan bisa jadi belum efektif karena adanya ketidakefisien struktur birokrasi. Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya.(Nugroho. 2014; 115). Jadi aspek dukungan serta sosialisasi dari pemerintah juga sangat berpengaruh terhadap program ini, sehingga perlu ditingkatkan lagi bentuk pembinaan serta penyuluhan kepada para petani disana untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Desa wisata Poncokusumo.

keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh *Content of implementation* dan *Context of implementation*. *Content of implementation* mencakup kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan; jenis manfaat yang dihasilkan; derajat perubahan yang diinginkan; kedudukan pembuat kebijakan; siapa pelaksana program; dan sumber daya yang dikerahkan. *Context of implementation* mencakup kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat; karakteristik lembaga dan penguasa; dan kepatuhan dan daya tanggap.

3) Sarana dan prasarana

Selain faktor dari sumber daya, sarana dan prasarana juga bisa menjadi penghambat kegiatan pengembangan kawasan agrowisata di Desa wisata Poncokusumo ini, kualitas lingkungan dalam arti luas, meliputi sumber daya alam dan buatan, memiliki hubungan yang kompleks dengan aktivitas pariwisata. Hubungan tersebut melibatkan beragam aktivitas yang dapat menghasilkan dampak-dampak positif dan negatif. Hal ini sesuai dengan Teori Model Kebijakan Publik dari Edward III dalam Widodo (2006:102) sumber daya peralatan (*Facility*) merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah dan sarana. Yang semua akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

Dengan kurangnya berbagai macam fasilitas yang sudah dikembangkan di Desa wisata Poncokusumo seperti Fasilitas Pelayanan diantaranya, fasilitas jalan menuju kebun yang masih perlu perbaikan, suitnya menentukan panen apel ketika wisatawan datang, kurangnya area perkebunan agar bisa menyimpan apel yang sudah panen. kesemuanya itu adalah beberapa faktor penghambat di Desa wisata Poncokusumo sebagai desa wisata berbasis Agrowisata.

b. Faktor Pendukung

1. Sumber Daya

Mengembangkan pariwisata di desa Poncokusumo bukanlah pekerjaan rumah yang mudah. Bukan hanya membangun kawasan agrowisata untuk menjadi sebuah desa agrowisata berbasis edukasi yang layak bagi wisatawan yang datang saja. Pemerintah juga berupaya membangun sumber daya manusia. Desa wisata Poncokusumo sebagai desa agrowisata berbasis edukasi, inilah keunggulan atau nilai lebih dari desa wisata Poncokusumo untuk di bangun berbagai infrastruktur seperti lahan perkebunan yang dijadikan layak dalam hal agrowisata dan fasilitas-fasilitas lainnya seperti parkir untuk para wisatawan agar merasa nyaman ketika sedang berkunjung ke Desa wisata Poncokusumo.

Dalam melaksanakan sebuah kebijakan yang diberikan oleh Balai Desa, sumber daya menjadi hal yang sangat penting untuk selalu ditingkatkan guna mencapai suatu tujuan, hal ini di benarkan dalam teori Edward, Sumber daya adalah menyangkut ketersediannya dan terdiri dari dua sumber daya yaitu :

c. Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan kawasan agrowisata untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat, banyak sumber daya yang mendukung kelancaran kegiatan tersebut, baik itu dari Petani, serta Balai Desa yang sangat antusias yang tinggi menjadi point positif di dalam pelaksanaan kegiatan ini. Dan masih banyak petani yang berkembang dalam hasil pemasarannya sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat serta kesejahteraan mereka juga ikut meningkat.

d. Sumber Daya Anggaran

Selain faktor dari sumber daya manusia, faktor fasilitas juga memudahkan dalam memberikan pelayan terhadap keberhasilan kegiatan pengembangan kawasan agrowisata di Desa wisata Poncokusumo ini, hal ini sesuai dengan Teori Model Kebijakan Publik dari Edward III sumber daya anggaran merupakan hal yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu

kebijakan yang meliputi gedung, tanah dan sarana. Yang semua akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

Dengan dilengkapi berbagai macam fasilitas yang sudah dikembangkan di Desa wisata Poncokusumo seperti Fasilitas Pelayanan diantaranya parkir kendaraan yang luas, fasilitas jalan utama serta jalan poros desa yang mengalami perbaikan, fasilitas perdagangan dan jasa, serta fasilitas penginapan dari rumah warga atau petani sendiri. kesemuanya itu semakin menguatkan peran wilayah Desa wisata Poncokusumo sebagai Desa pengembangan kawasan Agrowisata

2. Pemerintah Daerah

Pemabangunan berkelanjutan tidak begitu saja berhasil dalam proses pengembangannya, dalam proses pengembangannya tidak pernah mengalami kendala dari dukungan pemerintah, cenderung bisa terjun langsung kelapangan. Pemerintah berupaya pengembangan tersebut tidak merugikan masyarakat yang lahannya di alih fungsikan menjadi kawasan agrowisata, tidak memutuskan pertumbuhan penghasilanyang tentunya akan berdampak pada perekonomian yang turun. Pemerintah membuat beberapa ketetapan bahwa pembangunan berkelanjutan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, misalnya dari pengalih

fungsi lahan menjadi kawasan agrowisata seperti menjadi lahan parkir bagi para wisatawan yang datang dan rumah warga yang menjadi tempat persewaan penginapan untuk para wisatawan yang ingin menginap dan belajar berkebun yang sudah menjadi konsep agrowisata, dan juga bisa menjadi wilayah perdagangan barang dan jasa lainnya, dalam pembangunan berkelanjutan tersebut diharapkan menyerap tenaga kerja dari masyarakat, dan usaha perdagangan tersebut hanya di prioritaskan untuk kalangan masyarakat menengah ke bawah. Hal hal tersebut adalah rangkaian solusi yang diberikan Pemerintah Balai Desa Poncokusumo kepada masyarakat yang lahannya menjadi kawasan agrowisata. Sudah jelas bahwa tugas Balai desa dalam pembangunan berkelanjutan desa wisata Poncokusumo tidak hanya melaksanakan pembangunan yang layak dan kompleks namun juga mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak terjadi konflik kedepannya dan memberikan solusi kepada masyarakat terhadap lahannya yang dijadikan kawasan agrowisata.

Kegiatan ini berada dalam lingkungan yang secara luas tidak dapat terlepas dari berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi dimana kegiatan ini dijalankan, keberhasilan juga tentu didukung oleh banyak hal, selain secara internal seperti yang telah dibahas diatas, program ini secara kesuksesan juga tidak bisa dilepaskan oleh faktor eksternal, yaitu terkait dengan Dukungan dari

Pemerintah Desa wisata Poncokusumo dalam mensukseskan kegiatan ini. Seperti dukungan dalam peralatan, pengawasan, serta sosialisasi secara berkala dan juga adanya pelatihan-pelatihan.

Dalam hal ini sesuai dengan Teori Model Implementasi Kebijakan Publik pendorong keberhasilan utama bagi negara-negara berkembang untuk dapat menjadi bangsa yang unggul. Tantangan berikutnya adalah bahwa para pembuat kebijakan terperangkap kedalam keberhasilannya berdasarkan keunggulan kebijakan sebelumnya. Ini dapat berarti pada isi atau proses, atau dapat berarti keduanya, dan di sebut kepuasan dengan diri sendiri.

Selain memberikan dukungan, pengawasan serta pelatihan-pelatihan dan penyuluhan kepada para petani. Pemerintah Daerah Desa wisata Poncokusumo juga membuat Tim khusus dalam pengembangan kawasan agrowisata di Desa wisata Poncokusumo. Susunan Keanggotaan kelompok kerja terdiri dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) /instansi terkait sesuai dengan kewenangan dominan dan karakteristik daerah.

3. Sarana dan prasarana

Selain faktor dari sumber daya manusia, faktor fasilitas juga memudahkan dalam memberikan pelayan terhadap keberhasilan kegiatan pengembangan kawasan agrowisata di Desa wisata Poncokusumo ini, hal ini sesuai dengan Teori Model Kebijakan

Publik dari Edward III dalam Widodo (2006:102) sumber daya peralatan (*Facility*) merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah dan sarana. Yang semua akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

Dengan dilengkapi berbagai macam fasilitas yang sudah dikembangkan di Desa wisata Poncokusumo seperti Fasilitas Pelayanan diantaranya, fasilitas jalan utama serta jalan poros desa yang mengalami perbaikan, fasilitas perdagangan dan jasa, serta fasilitas pupuk dan kebutuhan perkebunan lainnya. kesemuanya itu semakin menguatkan peran wilayah Desa wisata Poncokusumo sebagai desa wisata berbasis Agrowisata.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2006 Bupati Kabupaten Malang menetapkan Desa Poncokusumo masuk ke dalam salah satu kawasan agrowisata, khususnya Desa wisata Poncokusumo. Dan proses implementasi kebijakan pengembangan pariwisata berbasis *Sustainable Development* dimulai tahun 2009 di Desa wisata Poncokusumo. Kemudian Pemerintah Daerah Kabupaten Malang mulai membuat *master plan* sebagai bahan acuan agar dapat terintegrasi dan terkoordinasi semua rencana kegiatan agrowisata yang ada di seluruh wilayah desa yang ada di Desa wisata Poncokusumo. Sebagai salah satu Desa wisata yang mengimplementasikan pengembangan pariwisata berbasis *Sustainable Development*, tentunya tidak terlepas dari komunikasi antara semua anggota di dalam struktur organisasi tersebut. Dalam kebijakan pengembangan kawasan agrowisata di Desa wisata Poncokusumo ini, cara pemerintah berkomunikasi dengan masyarakat ini dengan dilakukannya sosialisasi serta pembinaan. Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan pembinaan yang sudah dikoordinasikan Balai Desa Poncokusumo. Berbagai bentuk sosialisasi yang dilakukan pemerintah akhirnya merumuskan empat

koordinasi yang disingkat dengan 4K, yaitu Kerjasama, Komunikasi, Konsultasi, dan Kebersamaan. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa kesemua bentuk sosialisasi diatas sudah berjalan dengan baik.

2. Kesuksesan implementasi kebijakan pengembangan kawasan agrowisata juga ditunjang dari alokasi sumber daya, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya anggaran. Sumber daya manusia disini berperan dalam menjalankan, merencanakan dan mensukseskan pengembangan kawasan agrowisata adalah seluruh petani kebun di Desa wisata Poncokusumo. Tingkat antusiasme masyarakat yang berbeda-beda terhadap pengembangan kawasan Agrowisata di Desa wisata Poncokusumo menyebabkan tidak meratanya pertumbuhan perekonomian di Desa wisata Poncokusumo. Sedangkan alokasi sumber dana yang digunakan dalam kegiatan ini berasal dari APBD dan APBN.
3. Disposisi atau kesiapan dari para pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengembangan kawasan Agrowisata di Desa wisata Poncokusumo sudah dikatakan cukup siap dan berhasil. Hal ini dapat dilihat dalam program-program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam menunjang pengembangan kawasan Agrowisata di Desa wisata Poncokusumo. Dan sebagian besar instansi yang terkait dengan program pengembangan pariwisata berbasis *Sustainable Development* ini bersikap positif dan mendukung terhadap adanya program ini. Demikian juga petani kebun yang tinggal di wilayah selatan sebagai kelompok sasaran program,

bersikap mendukung terhadap pelaksanaan program ini.. Sikap, dukungan dan kesediaan dari pemerintah daerah dan masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung yang ikut berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi program pengembangan pariwisata berbasis *Sustainable Development* di Desa wisata Poncokusumo.

4. Program pengembangan pariwisata berbasis *Sustainable Development* merupakan pembangunan daerah yang bersifat lintas sektoral, melibatkan lebih dari 5 SKPD dan otomatis juga melibatkan banyak pelaksana. Koordinator program pengembangan kawasan Agrowisata di Desa wisata Poncokusumo adalah Balai Desa yang bertugas untuk mengkoordinasi dan mengevaluasi pelaksanaan program yang dijalankan oleh badan/ instansi terkait. Susunan keanggotaan kelompok kerja terdiri dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD)/ instansi terkait sesuai dengan kewenangan dominan dan karakteristik daerah yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Malang. Dengan adanya struktur birokrasi yang panjang mengakibatkan sulitnya koordinasi antar SKPD dalam implementasi program pengembangan kawasan Agrowisata. Tetapi tetap dilakukan dengan pemantauan (monitoring) dan evaluasi program pengembangan kawasan Agrowisata secara berkala.
5. Perkembangan ekonomi masyarakat terkait Agrowisata di Desa wisata Poncokusumo memiliki dampak positif, dan perkembangan sosialnya terkait pola pikir masyarakatnya masih kurang terhadap antusias desa wisata Poncokusumo, serta dampak lingkungannya mengenai sarana dan

prasarana di desa Poncokusumo memiliki beberapa perubahan yang lebih baik

B. SARAN

1. Lebih ditingkatkan lagi komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, dengan melakukan sosialisasi dan pembinaan ke warga di Desa wisata Poncokusumo. Mengingat masih banyaknya masyarakat yang belum sepenuhnya mengerti tentang pengembangan pariwisata berbasis *Sustainable Development* di Desa wisata Poncokusumo. Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti pada rapat secara berkala antara aktor-aktor pada instansi yang terkait dengan Balai Desa. Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat khususnya petani mengetahui bahwa Desa Poncokusumo, khususnya Desa wisata Poncokusumo dijadikan sebagai kawasan Agrowisata dengan tujuan untuk memberikan edukasi kepada wisatawan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Untuk meningkatkan antusias dari masyarakat perlu adanya tingkat kesadaran diri dan kemandirian dari masyarakat maupun petani kebun yang berada di Desa wisata Poncokusumo tentang pemahaman program pengembangan pariwisata berbasis *Sustainable Development*. Agar tidak hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah saja, dan tidak menjual hasil panen saja. Dan lebih berperan aktif dalam rangka mewujudkan Desa wisata Poncokusumo sebagai kota cepat tumbuh dengan turut serta rutin mengikuti pembinaan dari pemerintah daerah

setempat. Sedangkan untuk alokasi sumber daya anggaran, perlu dilakukan kajian tentang anggaran sarana dan prasarana untuk menunjang pengembangan kawasan Agrowisata di Desa wisata Poncokusumo. Misalnya, di Desa wisata Poncokusumo perlu dibuatkan iklan seperti di internet maupun di jalan besar agar minat wisatawan lebih besar untuk mengunjungi Desa wisata Poncokusumo. Sehingga tidak kesulitan lagi dalam hal pemasaran, secara tidak langsung kesejahteraan hidup masyarakat pun ikut meningkat. Pemerintah sebagai pelaksana kebijakan harus memiliki keinginan yang kuat dalam mengembangkan Desa wisata Poncokusumo yang berbasis agrowisata. Karena sikap dan persepsi pelaksana juga turut mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi program pengembangan pariwisata berbasis *Sustainable Development*. Hal ini terkait dengan peran dan tugas masing-masing instansi pelaksana. Harapan dari masyarakat untuk pemerintah daerah adalah kesiapan, dukungan, serta kesediaannya dalam mewujudkan kesuksesan dari program pengembangan pariwisata berbasis *Sustainable Development* di Desa wisata Poncokusumo.

3. Perlu ditingkatkan lagi kerjasama dan integrasi yang baik antar SKPD untuk mengimplementasikan kebijakan pengembangan kawasan Agrowisata di Desa wisata Poncokusumo, sehingga terbentuk koordinasi tim yang baik. Dan perlu di tinjau kembali monitoring serta evaluasi agar lebih ditingkatkan lagi, jika sebelumnya satu tahun sekali

mungkin bisa ditingkatkan menjadi satu tahun tiga kali, sehingga proses implementasi akan jauh lebih efektif.



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Badan Peneliti dan Pengembangan Kabupaten Malang. Resum APBD dan ADD. <http://balitbang.malangkab.go.id/>
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Malang. Program Agropolitan. bappekab.malangkab.go.id/
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang. Profil. disbudpar.malangkab.go.id
- Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Profil. poncokusumo.malangkab.go.id
- KEPUTUSAN BUPATI MALANG Nomor 188.45/316/KEP421.013/2015. tentang alokasi dana desa di Kabupaten Malang
- KM.59/KP.107/MKP/04 tentang Penetapan Pemberian Penghargaan kepada Juru Pelihara Benda Cagar Budaya/Situs
- Kuncoro, Mudrajad. 2011. *EKONOMI PEMBANGUNAN*. Yogyakarta: PT UPP AMP YKPN. 2011
- Moloeng, L.J.2005. *Metode Penelitian*. Jakarta:Ghalia Indonesia
- Nugroho, Iwan 2015. *EKOWOSATA DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN* . Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar. 2015
- Nugroho, Riant. *KEBIJAKAN PUBLIK DI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar. 2014
- Pemerintah Kabupaten Malang. Profil. www.malangkab.go.id
- Sedarmayanti. 2014. *MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN KEBUDAYAAN DAN INDUSTRI PARIWISATA*. Bandung: PT Refika Aditama. 2014
- Sistem Informasi Kawasan Agropolitan Jawa Timur <http://agropolitan-jatim.net.2011>
- Sjamsuddin, S. 2006. *Dasar-dasar dan Teori Administrasi Publik*, Malang: Agritek YPN
- Sugiyono, 2013 ; *Metode penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Suharso, dan Retnoningsih, A. 2014 ; Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kesepuluh. Semarang : Widya Karya

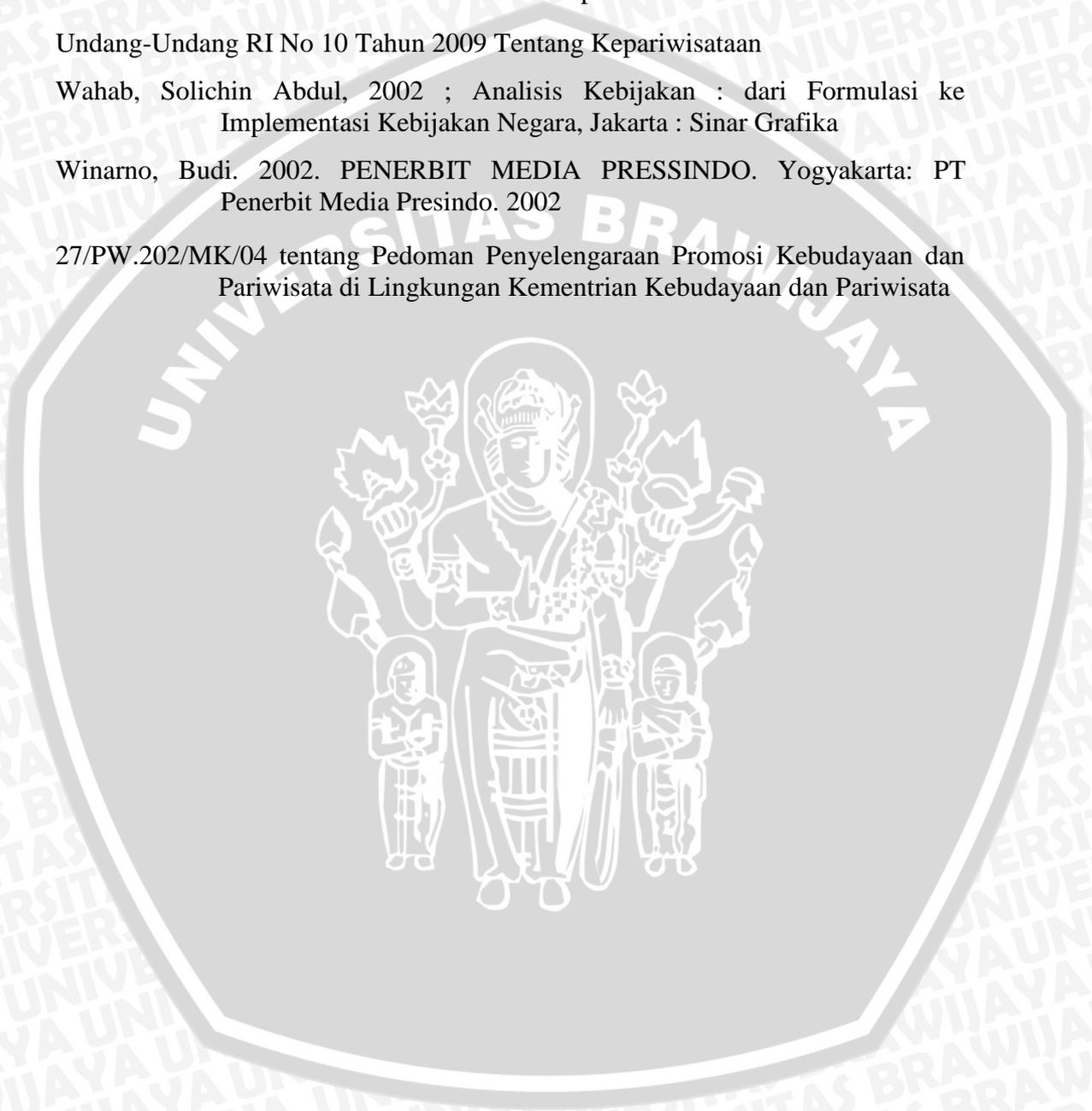
Thoha, Miftah 2008. ILMU ADMINISTRASI PUBLIK KONTEMPORER. Jakarta: PT Prenada Media Group. 2008

Undang-Undang RI No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

Wahab, Solichin Abdul, 2002 ; Analisis Kebijakan : dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Jakarta : Sinar Grafika

Winarno, Budi. 2002. PENERBIT MEDIA PRESSINDO. Yogyakarta: PT Penerbit Media Presindo. 2002

27/PW.202/MK/04 tentang Pedoman Penyelenggaraan Promosi Kebudayaan dan Pariwisata di Lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata





PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan KH. Agus Salim No. 7 Telp. (0341)366260 Fax. 366260
MALANG - 65119

SURAT KETERANGAN

Nomor : 072/975/421.205/2015

Untuk melakukan Survey / Research / Penelitian / KKN / PKL / Magang

Menunjuk : Surat dari Dekan Fakultas Administrasi Universitas Brawijaya Malang Nomor :
17474/UN.10.3/PG/2015 Tanggal 30 Nopember 2015 Perihal Survey

Dengan ini kami **TIDAK KEBERATAN** dilaksanakannya kegiatan Survey oleh :

Nama / Instansi : Muhammad Dimas Nugroho/ Mhs Fakultas Administrasi
Universitas Brawijaya Malang
Alamat : Jl. MT Haryono 163 Malang
Thema/Judul/Survey/Research : Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Daerah
Berbasis Sustainable Development
Daerah/tempat kegiatan : di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab Malang
Lamanya : 1 Bulan
Pengikut : -

Dengan Ketentuan :

1. Mentaati ketentuan - ketentuan / Peraturan yang berlaku
2. Sesampainya ditempat supaya melapor kepada Pejabat setempat
3. Setelah selesai mengadakan kegiatan harap segera melapor kembali ke Bupati
Malang Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang ;
4. Surat Keterangan ini tidak berlaku apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas

Malang, 07 Desember 2015

An. KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK



TEMBUSAN :

Yth.

1. Sdr. Dekan Fakultas Administrasi Universitas Brawijaya Malang
2. Sdr. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab Malang
3. Sdr. Mhs Ybs
4. Arsip

NIP : 19671204 199303 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KECAMATAN PONCOKUSUMO
KANTOR DESA PONCOKUSUMO
Jl. Diponegoro No 732 Telp (0341) 787341

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 470 /368 / 37.07.07.2015 / 2016

Yang bertanda tangan dibawah ini Pj Kepala Desa Poncokusumo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD DIMAS NUGROHO
Tempat / tanggal lahir : Malang, 11 April 1993
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki - laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Desa Teluk Pucung RT 006 / RW 007
Asal instansi : UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG (Fakultas Ilmu Administrasi Jurusan Administrasi Publik)

Surat keterangan ini dipergunakan untuk ijin melaksanakan penelitian di desa Poncokusumo selama 1 (satu) bulan.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada yang berkepentingan untuk menjadikan periksa adanya.

Poncokusumo , 25 Juli 2016

Pj. Kepala Desa Poncokusumo



(Lilik Tri Setiawati S.TP)



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Jalan Raya Singosari No. 275 ☎ (0341) 456644 Fax. (0341) 456622
MALANG 65153

SURAT TUGAS

NOMOR : 556/ /35.07.108/2016

Dengan ini Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang,
Menugaskan kepada :

Nama : MUHAMMAD DIMAS NUGROHO

NIM : 115030107111010

Fakultas Ilmu Administrasi, Jurusan Administrasi Publik

Universitas Brawijaya Malang

Akan melaksanakan penelitian di Desa PONCOKUSUMO Kec.Poncokusumo
selama 1 (Satu) Bulan, terhitung mulai tgl 5 Januari sd 5 Februari 2016.

Sehubungan dengan hal tersebut dimohon bantuan Saudara untuk dapat
memberikan keterangan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh mahasiswa dimaksud.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 4 Januari 2016

An. KEPALA DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA



Dr. AJINUR ROFIQ MANSUR

Pembina Tk. I

NIP. 19680305 199602 1 002

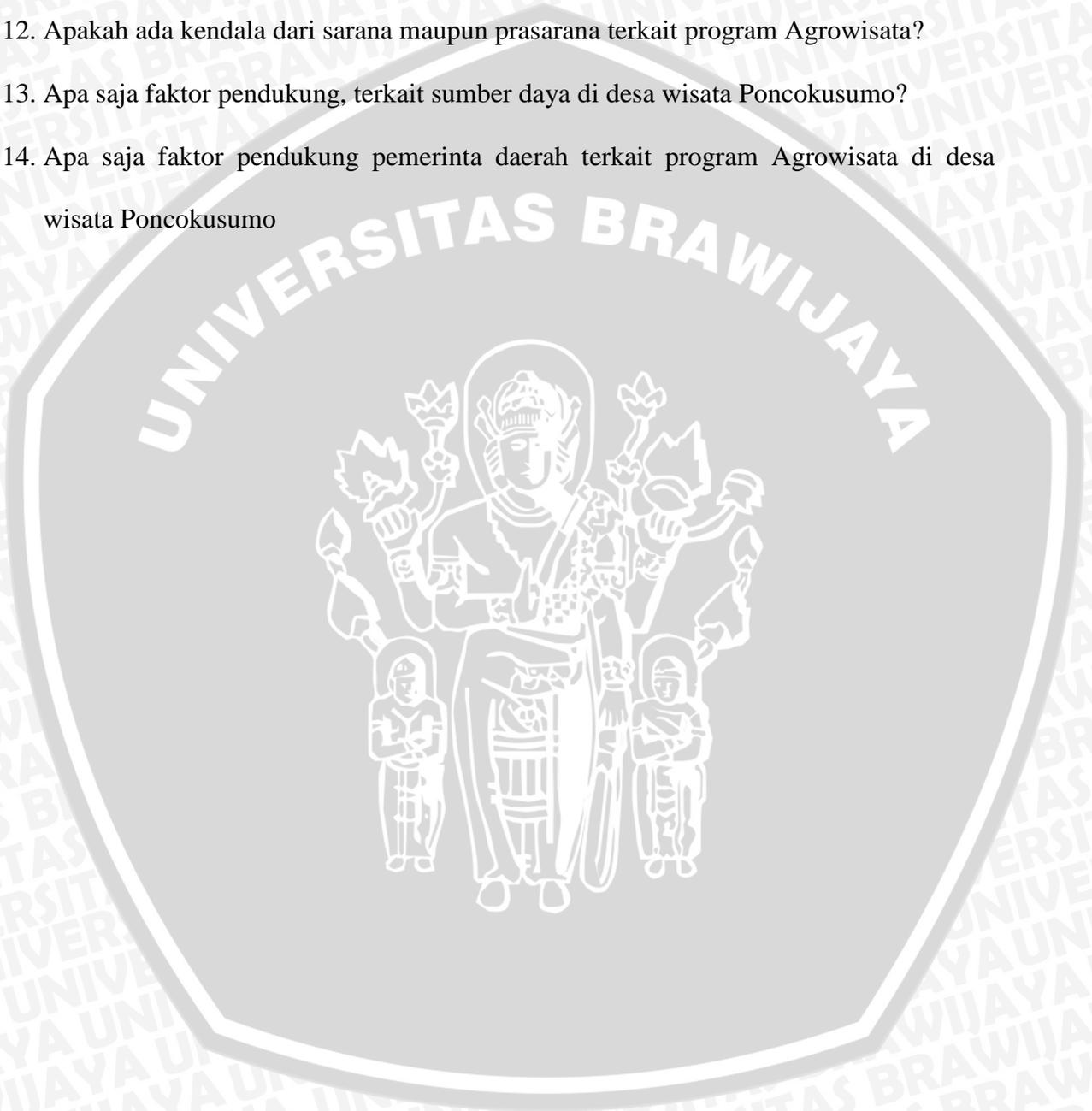
Daftar pertanyaan wawancara kepada
Kantor Balai Desa Poncokusumo Kabupaten Malang

1. Bagaimana cara Agar Masyarakat bisa lebih terbuka, terkait dengan Agrowisata yang ada di Desa?
2. Apakah masyarakat sudah memanfaatkan program pemberdayaan tenaga kerja dari pemerintah untuk meningkatkan produk dari Agrowisata?
3. Bagaimana Sumber Dana terkait Pengembangan Agrowisata di Desa Poncokusumo?
4. Bagaimana bentuk peran Pemerintah daerah dalam memberikan sikap terhadap masyarakat desa guna mencapai Implementasi dengan baik untuk program Agrowisata?

Pertanyaan berikut dibuat sesuai dengan teori yang digunakan oleh penulis.

5. Menurut teori yang peneliti gunakan yaitu dalam buku yang dituliskan Nugroho, dalam Komunikasi Antar Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Bagaimana cara Agar Masyarakat bisa lebih terbuka, terkait dengan Agrowisata yang ada di Desa?
Dalam hal ini bagaimana saja caranya agar bisa berkomunikasi dengan baik.
 - a. Apakah Balai Desa memberikan sosialisasi dengan baik?
 - b. Apa saja cara pendekatan dari Balai Desa Kepada Masyarakat?
6. Apakah masyarakat sudah memanfaatkan program pemberdayaan tenaga kerja dari pemerintah untuk meningkatkan produk dari Agrowisata?
 - a. Bagaimana bentuk sosialisasi agar pemberdayaan tenaga kerja berjalan dengan baik?
7. Bagaimana Sumber Dana terkait Pengembangan Agrowisata di Desa Poncokusumo?
8. Bagaimana bentuk peran Pemerintah daerah dalam memberikan sikap terhadap masyarakat desa guna mencapai Implementasi dengan baik untuk program Agrowisata?

- repository.ub.ac.id
9. Apakah ada struktur Birokrasi guna mencapai Kebijakan dalam program Agrowisata?
 10. Apa saja faktor penghambat dalam optimalisasi pembangunan berkelanjutan Agrowisata?
 11. Apakah ada kendala dari pemerintah daerah terkait program Agrowisata?
 12. Apakah ada kendala dari sarana maupun prasarana terkait program Agrowisata?
 13. Apa saja faktor pendukung, terkait sumber daya di desa wisata Poncokusumo?
 14. Apa saja faktor pendukung pemerintah daerah terkait program Agrowisata di desa wisata Poncokusumo

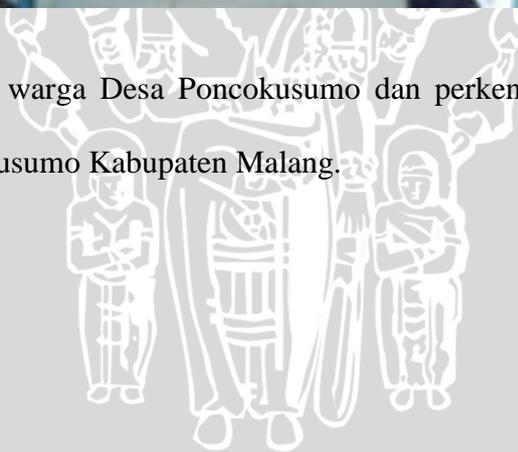




Gambar : Proses setelah wawancara dengan Pak Hadi (Kanan) selaku Informan Desa wisata Poncokusumo dan Ketua Pokdarwisa (Kelompok Sadar Wisata) dan Mas Dedi (Kiri) selaku Anggota Pokdarwis Desa Wisata Poncokusumo Kabupaten Malang.



Gambar : Proses Musyawarah warga Desa Poncokusumo dan perkenalan Bu Lilik selaku Sekretaris Kepala Desa Poncokusumo Kabupaten Malang.



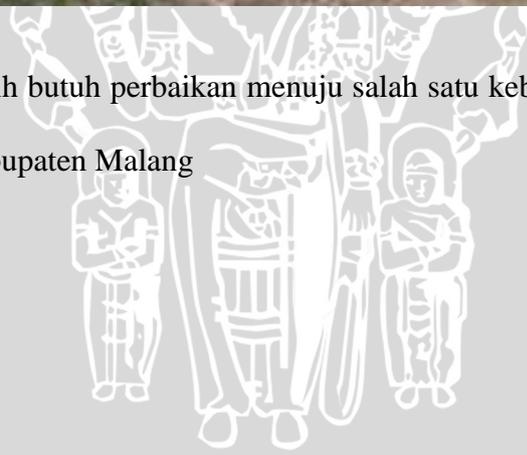


Gambar : Foto bersama dengan beberapa staf dan Kepala Desa Poncokusumo Kabupaten Malang



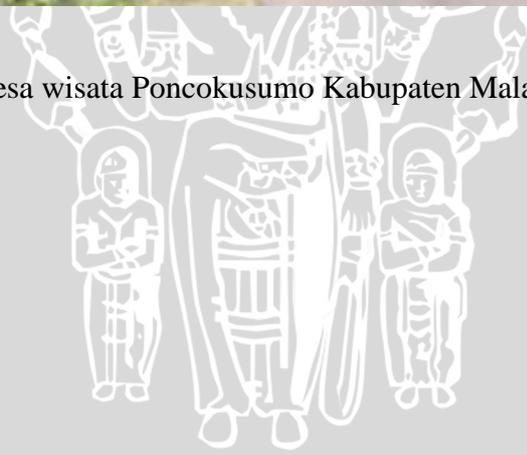


Gambar : Foto Jalan yang masih butuh perbaikan menuju salah satu kebun Apel milik petani Desa wisata Poncokusumo Kabupaten Malang





Gambar : Foto Jalan menuju Desa wisata Poncokusumo Kabupaten Malang





Gambar : Foto Jalan menuju Desa wisata Poncokusumo Kabupaten Malang





Gambar : Foto Kebun Apel milik salah satu Petani Desa wisata Poncokusumo Kabupaten Malang

